

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI
(KWT) “HEMARA” DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN KELUARGA**

(Studi pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Fadlika Kurniawan

135030107111112



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018



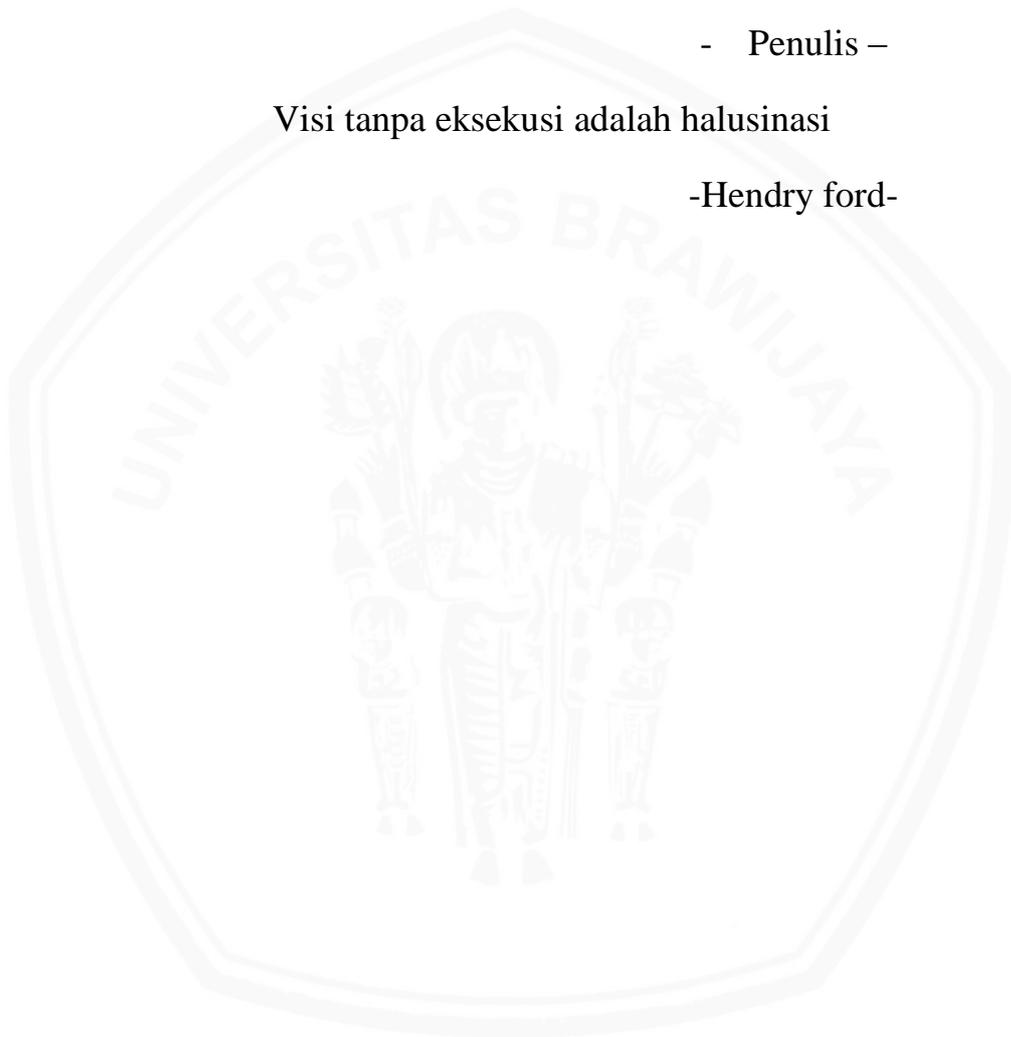
MOTTO

Be the best of the best

- Penulis –

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi

-Hendry ford-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) "HEMARA"
dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi pada UPT
Balai Pertanian Karangploso Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Fadlika Kurniawan

NIM : 135030107111112

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 2 Juli 2018

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Dr Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 2 Juli 2018

Mahasiswa



Fadlika Kurniawan

135030107111112

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Desember 2018
Waktu : 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Fadlika Kurniawan
Judul : Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) “HEMARA” dalam meningkatkan pendapatan keluarga. (Studi pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

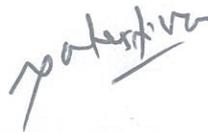


Dr.Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP.19690524 200212 2 002



Dr.Mochammad Makmur,MS
NIP. 19511028198003 1 002

Anggota



Nana Abdul Aziz, S.Ap,M.Ap
NIP. 19840713 2015 04 1 004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsiku

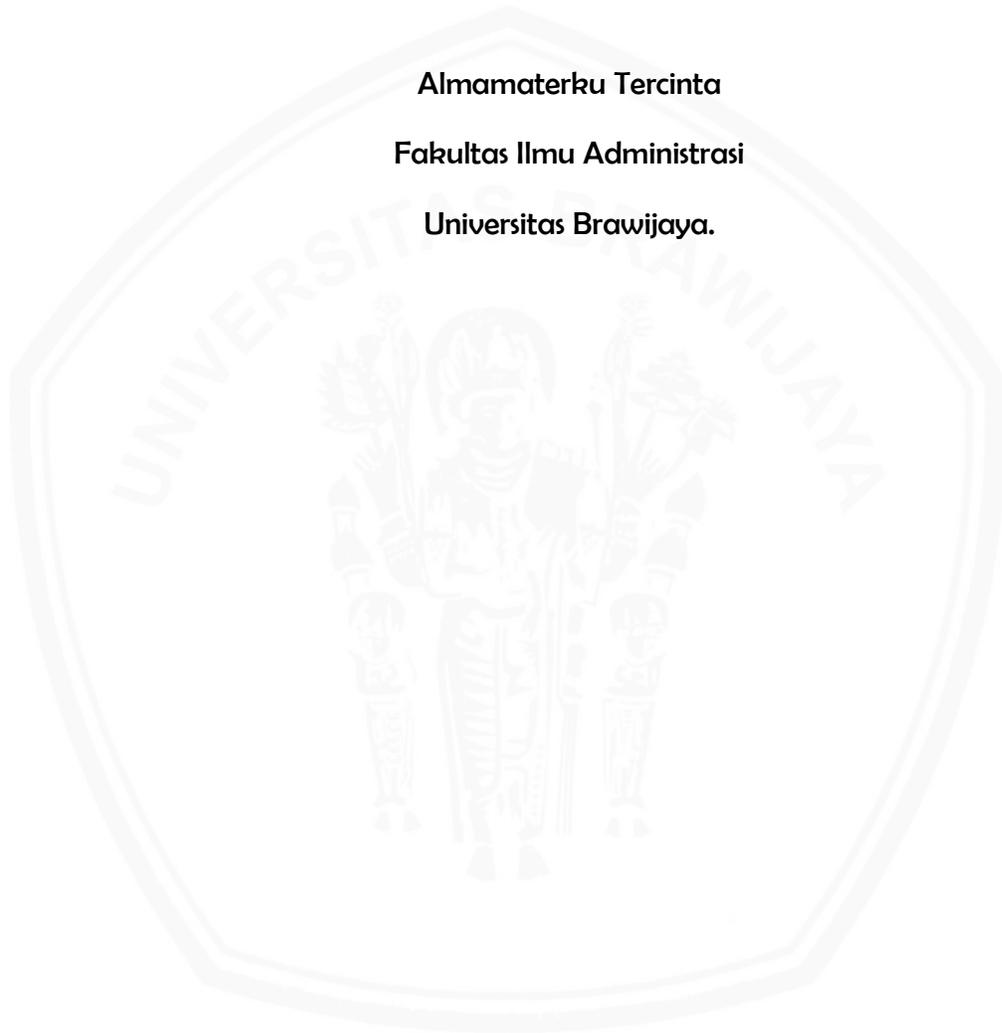
Kepada

Kedua Orang tuaku

Almamaterku Tercinta

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya.



Fadlika Kurniawan. 2018. **Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) “Hemara” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ketua Komisi Pembimbing: Dr Lely Indah Mindarti, M.Si 152 halaman + xv

RINGKASAN

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani diperlukan keterlibatan penyuluh, melalui program-program dan kegiatan-kegiatan di Bidang Penyuluhan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Penyuluh dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan perannya masing-masing di dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Dengan adanya keterlibatan penyuluh dapat melakukan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan perannya masing-masing di dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Dengan adanya keterlibatan Penyuluh dalam hal ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Malang, sedangkan situsnya berada di UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso dan Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan keluarga, yaitu pemukiman, penguatan, perlindungan dan penyokongan. Sedangkan tahap-tahap pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan keluarga, meliputi tahap kesadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Pendapatan yang diperoleh anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” termasuk dalam kategori sedang. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan keluarga adalah adanya Balai Penyuluhan Pertanian, Kompetensi Penyuluh, Potensi Sumber Daya Alam, dan Jalur Pariwisata. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Pendapatan

Fadlika Kurniawan. 2018. **Female Women Group Empowerment "Hemara" In Improving Family Revenues (Study at UPT Agricultural Counseling Center Karangploso Malang Regency)**. Undergraduate Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Brawijaya University. Head of Advisors Commission: Dr Lely Indah Mindarti,M.Si. 152 pages + xv

SUMMARY

Empowerment of Women Farmer Group is needed involvement of extension workers, through programs and activities in Extension Field which has been set by the Agriculture and Plantation Office of Malang Regency. Extension workers can perform their duties and functions based on their respective roles in empowerment of Women Group Empowerment. With the involvement of extension workers can perform their duties and functions based on their respective roles in empowering Women Group Empowerment. With the involvement of extension workers in this case is expected to give a positive impact for the sustainability of empowerment of Women Farmer Group Karangploso District Malang Regency.

The type of descriptive research with qualitative approach located in Malang Regency, while the site is in UPT Agricultural Counseling Center Karangploso and Ngijo Village, District Karangploso, Malang Regency. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the theme. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The results showed that the empowerment process of Women Group Empowerment "Hemara" in increasing family income, namely settlement, strengthening, protection and support. While the stages of empowerment of Women Farmer Group "Hemara" in increasing family income, including the stage of awareness and the formation of behavior, the stage of capability transformation, and the stage of intellectual ability improvement. Revenues earned by members of the "Hemara" Farmer Group are included in the medium category. Supporting Factors in the Empowerment of Women Farmers Group "Hemara" in increasing family income is the Agricultural Counseling Center, Extension Extension, Natural Resources Potential, and Tourism Line. While the inhibiting factor is the lack of competence of Human Resources.

Keywords: Empowerment, Women, Income

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) “Hemara” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

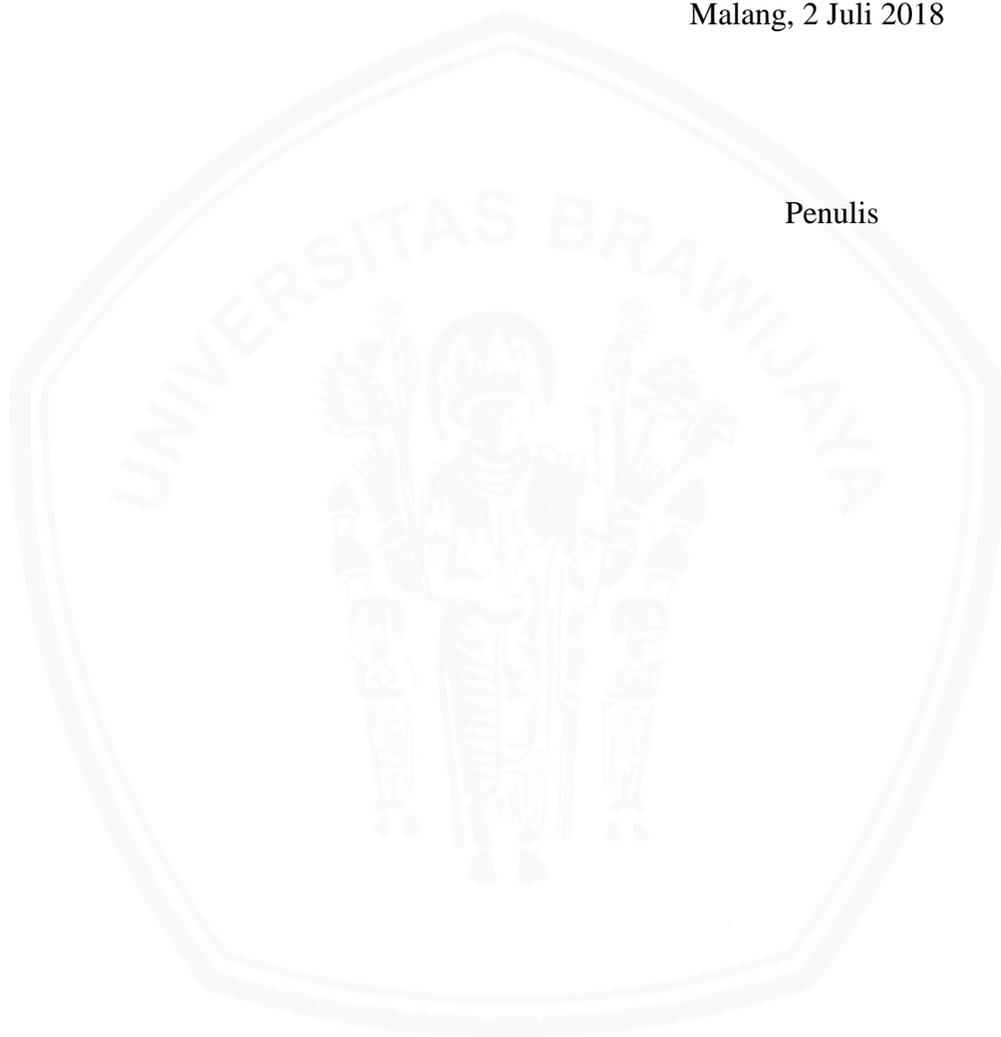
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Dr Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Keluarga Besar UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang dan Kelompok Wanita Tani “Hemara” yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
7. Orang tua penulis, Edhi Susilowanto dan Yayuk Endarwati serta keluarga besar penulis, yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Alisha Asmi selaku sahabat, teman, saudara, partner bisnis saya sekaligus pasangan saya. Terimakasih sudah memberikan dukungan, perhatian, doa, semangat dan selalu menemani saya di dalam proses pembuatan skripsi ini
9. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi Publik dan teman-teman seperjuangan publik 2013 yang telah memberikan masukan baik kritik maupun saran serta semangat untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi.
10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penting penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2 Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Administrasi Publik	15
B. Administrasi Pembangunan.....	16
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	19
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2. Prinsip Pemberdayaan	21
3. Komponen Pemberdayaan.....	22
4. Strategi Pemberdayaan	24
5. Proses Pemberdayaan	28
D. Pemberdayaan Perempuan	33
1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan	33
2. Peran Pemberdayaan Perempuan	34
3. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga.....	36
4. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pertanian	37
E. Kelompok Wanita Tani	39
1. Pengertian Kelompok Wanita Tani	39
2. Fungsi Kelompok Wanita Tani	40
F. Pendapatan.....	43
1. Pengertian Pendapatan	43
2. Pendapatan Keluarga.....	44

3. Metode Perhitungan Pendapatan	45
4. Indikator Peningkatan Pendapatan Keluarga	46
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	50
G. Analisis Data	51
H. Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	54
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	54
2. Gambaran Umum Kecamatan Karangploso	61
3. Gambaran Umum Desa Ngijo	63
4. Gambaran Umum Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso.....	66
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	67
1. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga	67
a. Proses Pemberdayaan	67
1) Pemukiman	70
2) Penguatan.....	74
3) Perlindungan	75
4) Penyokongan	77
b. Tahap Pemberdayaan.....	80
1) Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku.....	80
2) Tahap Transformasi Kemampuan	84
3) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual	88
c. Indikator Pendapatan	90
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara”	93
a. Faktor Pendukung.....	93
1) Adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).....	93
2) Kompetensi Penyuluh.....	95
3) Potensi Sumber Daya Alam (SDA)	96
4) Jalur Pariwisata.....	98
b. Faktor Penghambat, yaitu Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).....	99
C. Analisis Data.....	101

1. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga	101
a. Proses Pemberdayaan	101
1) Pemukiman	101
2) Penguatan.....	104
3) Perlindungan	107
4) Penyokongan	109
b. Tahap Pemberdayaan.....	110
1) Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku.....	110
2) Tahap Transformasi Kemampuan	113
3) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual.....	115
c. Indikator Pendapatan	117
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara”	120
a. Faktor Pendukung.....	120
1) Adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).....	120
2) Kompetensi Penyuluh.....	123
3) Potensi Sumber Daya Alam (SDA)	127
4) Jalur Pariwisata.....	130
b. Faktor Penghambat, yaitu Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).....	133
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa di Kecamatan Karangploso	64
Tabel 2. Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Components of data analysis: Interactive Model</i>	52
Gambar 2. Peta Kabupaten Malang	54
Gambar 3. Peta Wilayah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso	63
Gambar 4. Grafik Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan	65
Gambar 5. Kumpulan Ibu-Ibu dalam penyuluhan Kelompok Wanita Tani.....	71
Gambar 6. Kumpulan Ibu-Ibu dalam penyuluhan Kelompok Wanita Tani.....	72
Gambar 7. Peneliti <i>sharing</i> dengan Kumpulan Ibu-Ibu Kelompok Wanita.....	74
Gambar 8. Hasil Olahan Gabin Susu	74
Gambar 9. Silaturahmi dan <i>sharing</i> mengenai Pemberdayaan	77
Gambar 10. Produk Kelompok Wanita Tani.....	79
Gambar 11. Pendampingan Kelompok Wanita Tani	79
Gambar 12. Produksi Olahan Keripik Tempe.....	82
Gambar 13. Produksi Olahan Daging Kelinci Menjadi Abon	83
Gambar 14. Produksi Olahan Coklat	83
Gambar 15. Produksi menggunakan Olahan Bahan Baku Pertanian	85
Gambar 16. Produksi Keripik Pisang.....	86
Gambar 17. Produksi Tas.....	86
Gambar 18. Sayur di Supermarket yang di suplai Ibu Ida	92
Gambar 19. Olahan Jamu Milik Ibu Siti	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir (Siagian, 2014:5). Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik. Begitu juga dengan apa yang diinginkan Bangsa Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajat dan sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju hingga dapat tercapainya tujuan akhir yang diharapkan. Adanya pelaksanaan pembangunan nasional oleh bangsa Indonesia yang pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang berarti sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus di usahakan secara terus menerus. Tujuan itu pula yang hendak dicapai bangsa Indonesia agar dapat berkembang kearah yang lebih baik, untuk mencapai tujuan itu memerlukan pemikiran yang matang melalui program – program yang rinci dan bertahap.

Dalam melaksanakan pembangunan di setiap daerah, Indonesia menerapkan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi yaitu kewenangan pengelolaan urusan publik dilimpahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota (Dwiyanto, 2006:46). Hal tersebut agar pembangunan dapat dilakukan secara merata oleh pemerintah dan pemerintah dapat melakukan sesuai tugas dan fungsinya. Menurut (Sulistiyani, 2004:94), Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat antara lain, formulasi, penetapan kebijakan, implementasi, pengawasan, evaluasi dan mediasi. Selanjutnya (Sulistiyani, 2004:94) menjelaskan bahwa peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Fasilitas tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral / departemental, maupun batasan- batasan normatif lain. Disamping itu fasilitas dapat berupa tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil dan lain lain, sehingga peran pemerintah daerah dalam pembangunan menjadi besar, karena daerah telah memberi wewenang untuk mengatur urusan pemerintahnya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang penting dalam mengatur urusan daerah.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen di dalam pembangunan yang perlu dikembangkan, oleh sebab itu pembangunan terhadap masyarakat diperlukan dalam meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Seperti ungkapan

Sihombing (2001:73) yang menyatakan bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif sangat diperlukan untuk memasuki era baru, karena setiap daerah akan berlomba untuk memantapkan keberdayaan daerahnya menuju kemakmuran masyarakatnya, sehingga pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesinambungan mempunyai arah dan tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti pembangunan tidak mengejar kemajuan saja akan tetapi pembangunan mempunyai tujuan yaitu pemenuhan akan kebutuhan hidup masyarakat sebagai salah satu bidang pembangunan.

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat kota maupun desa yang ada di dalamnya. Masyarakat desa mempunyai jumlah cukup besar yang bergerak di sektor pertanian. Pemberdayaan masyarakat, dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat. organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya (Suhendra, 2006:75).

Secara sederhana, adanya kegiatan pemberdayaan adalah bagaimana membuat individu yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, artinya pemberdayaan memberikan suatu proses individu untuk mengembangkan kemampuannya supaya lebih berdaya atau berkemampuan, sehingga upaya pemberdayaan sangat cocok dan potensial diberikan pada masyarakat tani di

pedesaan (kelompok tani). Dengan potensi yang dimiliki kelompok tani, maka kelompok wanita tani perlu ikut diberdayakan agar lebih mampu dan mandiri mengembangkan dirinya serta dapat mengembangkan potensi, kapasitas, dan aktualisasi diri. Kelompok tani yang berkualitas dapat dikatakan sebagai potensi dan aset pembangunan nasional hal tersebut dikarenakan kelompok tani berada diposisi strategis sebagai pelaku pembangunan di masa sekarang maupun penerus pembangunan di masa datang.

Tantangan pembangunan dalam menghadapi era agribisnis pada kenyataannya masih didominasi oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan oleh rumah tangga petani. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan karena dengan skala usaha petani yang tidak ekonomis mengakibatkan rendahnya produktivitas, efisiensi dan kualitas mutu produk yang dihasilkan. Permasalahan lain yang dihadapi oleh petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, teknologi inovasi dan manajemen organisasi yang masih lemah serta pola usaha tani yang subsisten (belum berorientasi pasar). Selain itu di sisi eksternal, para petani masih dihadapkan pada perubahan dan disparitas harga yang tidak menguntungkan akibat posisi tawar yang lemah, kebijakan keuangan yang belum berpihak pada kepentingan petani akibat tingginya faktor resiko usaha di bidang pertanian.

Kelompok tani memiliki tanggung jawab dan peran strategis di segala dimensi pembangunan pertanian yang perlu ditingkatkan, pengaturan dan penataannya di mana pembangunan pertanian secara nasional berorientasi pada ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, menurut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selama ini kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan kelompok yang diawali dengan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan asosiasi petani. Kelompok tani dan/atau gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usaha taninya di tingkatkan kemampuannya untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Kelembagaan ekonomi petani merupakan lembaga petani yang memiliki kegiatan usaha produktif di sektor pertanian dari hulu sampai hilir yang di tumbuhkan oleh masyarakat tani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, memperluas pendapatan keluarga atau rumah tangga dan pendapatan yang menunjang kegiatan industri serta peningkatan ekonomi. Pendapatan sangat diperlukan bagi petani, pendapatan petani adalah hasil yang diperoleh dikurangi biaya yang dikeluarkan, karena itu salah satu upaya untuk menambah pendapatan keluarga atau rumah tangga tani adalah dengan memberi kesempatan berusaha bagi perempuan-perempuan tani yang merupakan sumber tenaga yang potensial.

Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan mencari nafkah tidak lain karena pendapatan lelaki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Keikutsertaan anggota keluarga mencari nafkah merupakan upaya peningkatan pendapatan guna mengatasi masalah memenuhi kebutuhan dan ekonomi hidup rumah tangga. Tekanan ekonomi yang tinggi menyebabkan banyak perempuan yang bekerja di luar rumah tangga. Penghasilan tambahan perempuan diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga.

Setiap anggota keluarga pasti berkeinginan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan keluarganya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya meningkatkan perekonomian bagi petani di pedesaan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tani memang penting karena petani merupakan pelaku utama untuk mengembangkan usaha taninya. Memberdayakan masyarakat petani agar kualitas hidupnya lebih baik, secara partisipatif memang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, maupun dilakukan kalangan swadaya masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat petani masih banyak yang hidupnya belum layak, kurang beruntung. Tidak hanya peran dari Pemerintah saja tetapi peran partisipasi seluruh masyarakat di butuhkan demi kelancaran pembangunan pertanian tidak terkecuali peran perempuan.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan di segala bidang mutlak sangat diperlukan, karena merupakan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Untuk mensejahterakan tenaga kerja perempuan dalam konsep-konsep kerja bukan semata-mata masalah mengejar kepentingan segi ekonomis

atau peningkatan pendapatan, akan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi atau peranan perempuan dalam masyarakat. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam sektor publik walaupun angkanya masih kecil. Namun disisi lain dalam adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan meningkatkan dapat menjadi faktor penghambat dalam partisipasi perempuan (Hati, 2005:62).

Perkembangan peran dan posisi kaum perempuan sejak masa lampau hingga saat ini telah menempatkan perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan kaum laki-laki. Perempuan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi majunya pembangunan negara ini termasuk di dalamnya peran dalam bidang pembangunan pertanian. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu diberdayakan agar mandiri dan tangguh dalam berusaha tani, sehingga memperoleh berbagai alternatif pengembangan agribisnis di pedesaan.

Dalam rangka mensukseskan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan tersebut, pemerataan hak kaum perempuan dalam berkarya, serta kesetaraan gender, Kelompok Wanita Tani (KWT) "HEMARA" Dusun Kagrengan Desa Ngijjo Karangploso telah tepat memposisikan dirinya sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, mengolah hasil produksi pertanian menjadi produk olahan, yang tentunya akan menambah nilai jual yang tadinya hanya menggantungkan diri kepada suami kini sudah mampu menghasilkan Rp.2.500.000 sampai Rp.3.500.000 perbulannya. Kelompok Wanita Tani (KWT) "HEMARA" yang kedudukannya di Dusun Kagrengan

Ngijo Karangploso berdiri atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama dengan motto “dengan tetap mempertahankan fungsi kodrat sebagai ibu rumah tangga kita bisa” sehingga mereka mampu bersaing dengan segala kemampuan, daya dukung potensi sumber daya alam, dan pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sehingga terbentuklah Kelompok Wanita Tani “HEMARA” pada tanggal,4 Desember 2014 berdasarkan surat keputusan Bupati Malang nomor 411.61/05/421.207.132/2014.

Implikasinya, penyelenggaraan penyuluhan harus lebih dinamis dengan berorientasi kebutuhan petani (*farmer led extension*) dan dihelai oleh kebutuhan pasar (*market driven extension*) yang memberikan pelayanan untuk meningkatkan kapasitas dalam penguasaan teknis budidaya/produksi, manajemen usahatani dan pemasaran dengan mengoptimalkan rantai nilai untuk produk pertanian dengan nilai ekonomis tinggi. Beberapa program pemberdayaan petani yang telah dilaksanakan oleh Kementrian Pertanian seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang mulai di laksanakan pada tahun 2008; kegiatan penyuluhan yang berorientasi agribisnis yang ditunjukan dengan tumbuhnya kelompok-kelompok usaha bersama dan kelembagaan ekonomi petani. Inisiatif yang telah mulai berkembang ini perlu untuk di tindak lanjuti melalui kegiatan yang pembiayaannya tidak lagi bergantung pada anggaran yang berasal dari donor.

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan

penyuluhan pertanian yang di hela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan petani. Dengan adanya model ini di harapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani yang dapat meningkatkan roda perputaran usaha di sektor pertanian. Sasaran petunjuk pelaksanaan ini adalah para penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, penyuluh pertanian serta kelembagaan ekonomi petani.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pertanian. Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam Pelaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Perkebunan memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik dibidang pertanian dan perkebunan. Dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang di tingkat Kecamatan di dukung oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) merupakan *home base* dari penyuluh pertanian yang mengawal tiap-tiap desa yang menjadi wilayah binaannya di Kecamatan tersebut. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan, perikanan, dan kehutanan yaitu:

1. Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
 - a. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota;

- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - e. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
 3. Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan Kabupaten/ kota yang pembentukannya di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Arah kebijakan dan program pusat Penyuluhan Pertanian 2012 meliputi :

- (a) Pengembangan kelembagaan penyuluhan diarahkan untuk membangun kelembagaan yang andal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
- (b) Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh, serta menempatkan satu desa satu penyuluh dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh swadaya/swasta, dan THL-TB PP;
- (c) Pemberdayaan kelembagaan petani ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan usaha tani serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan tani;
- (d) penyelenggaraan penyuluhan pertanian diarahkan untuk

mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian; (e) Peningkatan dukungan sarana-prasarana dan pembiayaan ditunjuk untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pemberdayaan masyarakat perempuan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dari yang berawa menggantungkan pendapatan dari suami kini aPembinaan dari penyuluh untuk kelompok wanita tani sangat terasa besar karena penambahan pendapatan dari wanita Rp.2.500.000,- Rp.3.000.000 per bulan.

Kabupaten Malang merupakan daerah otonom dengan luas daerah 353.486 km² atau sama dengan 353.486 Ha yang terbagi dalam 33 Kecamatan dan 378 desa. Jumlah penduduk menurut data statistik tahun 2016 tercatat sebanyak 2.487.120 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.247.180 jiwa, perempuan 1.239.940 jiwa. Berdasarkan penggunaan lahan sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dengan jumlah kelompok tani sebanyak 1.342 kelompok. Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan salah satu Kecamatan yang dipilih sebagai tempat penelitian karena secara teknik pelaksanaan mudah terjangkau dan mempunyai Rencana Strategi Pembangunan (RENSTRA) Kecamatan Karangploso 2016 salah satunya melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memperdayakan kaum wanita melalui pertumbuhan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang bergerak di sektor pertanian. Dilihat dari luas wilayah memiliki 5.114.639 km² atau sama dengan 5.114.639 Ha dan seluas 3.294.878 Ha atau

70% dari luas lahan di usahakan sebagai lahan pertanian dengan melibatkan 21.169 jiwa yang terorganisasi dalam 51 kelompok tani.

Jumlah penduduk kecamatan Karangploso tercatat 87.233 jiwa dimana 44.702 jiwa laki- laki dan 42.531 jiwa perempuan. Pembangunan sektor pertanian Kecamatan Karangploso dilakukan melalui pemberdayaan wanita tani dengan penumbuhan kelompok (organisasi) dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pendapatan petani melalui kegiatan antara lain:

1. Pembuatan kompos dari limbah ternak yang dapat di manfaatkan sebagai pupuk tanaman organik;
2. Pembuatan olahan hasil produk pertanian seperti keripik, nugget, sosis, abon, minuman;
3. Sayuran organik dan bibit sayuran.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, untuk mewujudkan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani diperlukan keterlibatan penyuluh, melalui program-program dan kegiatan-kegiatan di Bidang Penyuluhan yang telah di tetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Penyuluh dapat menjalankan tugas dan fungsinya bedasarkan perannya masing-masing di dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Dengan adanya keterlibatan penyuluh dapat melakukan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan perannya masing-masing di dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Dengan adanya keterlibatan Penyuluh dalam hal ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan

pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti mengambil judul **“Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) “HEMARA” Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam meningkatkan pendapatan keluarga?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam meningkatkan pendapatan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik secara teoritis maupun praktis terhadap permasalahan. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi ilmu administrasi publik khususnya yang berhubungan dengan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaku Penyuluhan, terutama pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui pengembangan Kelompok Wanita Tani.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri latar belakang masalah dan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan guna mendapatkan pemecahan masalah yang diharapkan yang terdiri dari: Administrasi Publik, Administrasi Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Wanita Tani, dan Pendapatan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari: penyajian hasil penelitian yang berupa gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta analisis dan interpretasi data dengan dasar teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari: kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Pada dasarnya administrasi publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*public administration*” yang sering juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan (Sjamsuddin, 2010:113). Hughes (1994:4-9) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan aktivitas pelayanan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah yang memiliki makna luas karena menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beranekaragam kepentingan dan kebutuhannya.

Pemberian pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya, mengharuskan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik. Maka dari itu diperlukan peningkatan kemampuan pemerintah yang berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dibutuhkan adanya kinerja aparatur yang berkompeten memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Administrasi publik menurut Pasalong (2008:7) menjelaskan bahwa proses dimana sumber daya dan publik dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik

yang ditentukan. Sedangkan Nigro dalam Pasalong (2008:8) memaparkan administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah yang meliputi tiga cabang yaitu, eksekutif, legislatif, serta peranan penting dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk dapat mendengarkan dan mengolah aspirasi masyarakat agar dapat mencapai pembangunan modern.

Selain itu, pola koordinasi dan komunikasi yang perlu dibangun, tidak hanya kerjasama dengan eksternal instansi pemerintahan, namun juga pada internal pemerintahan atau internal organisasi. Pada dasarnya administrasi publik terfokus pada proses, prosedur dan keputusan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah suatu proses dan usaha dari kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, ekonomi, agar pembangunan dapat berhasil. Menurut Kartasmita (1997:22), pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Sedangkan menurut Siagian (2014:5) definisi administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:

“Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara umum yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Jadi definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan akhirnya”.

Masih menurut Siagian (2014:7), fungsi administrasi pembangunan dapat meliputi dua segi yaitu:

1. Segi yang pertama adalah usaha penyempurnaan administrasi negara sering disebut sebagai pembangunan bidang administrasi. Untuk hal tersebut dilakukan berbagai usaha penyempurnaan dibidang organisasi dan kelembagaan, kepegawaian, tata cara dan tata laksana administrasi negara. Sering kali pula ditambahkan dengan usaha penyempurnaan mengenai sarana-sarana fisik administrasi negara. Oleh karena itu, disebut juga sebagai penyempurnaan kembali administrasi negara.
2. Segi yang kedua adalah pembinaan dibidang administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sering juga

disebut sebagai administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, diusahakan perbaikan-perbaikan misalnya dalam sistem pelaksanaan rencana dan perencanaan operasional tahunan, memperkuat unit-unit perencanaan dalam departemen-departemen operasional dan daerah-daerah penyempurnaan dalam perencanaan program dan proyek-proyek penyerasian siklus perencanaan dan siklus penyusunan anggaran, penyempurnaan dalam sistem pembiayaan pembangunan, penyempurnaan manajemen proyek, penyempurnaan program pembangunan, koordinasi antara perencanaan nasional dan daerah, hubungan dengan sektor swasta serta pembinaan lembaga-lembaga ekonomi/keuangan, penyempurnaan serta administrasi penelitian dan statistik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan memiliki masing-masing pengertian meliputi administrasi dan pembangunan. Pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi Negara. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27), istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan dan dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan sebagainya. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidup ke arah yang lebih sejahtera.

World Bank (2001) dalam Totok dan Poerwoko (2012:27) mengartikan pemberdayaan yaitu upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan sebagainya) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap

kemandirian masyarakat. Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Ambar (2004:79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.

Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Menurut Chatarina (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Ambar (2004:77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003:43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority dan to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

2. Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menyatakan bahwa: “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan menurut Totok dan Poerwoko (2012:105) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal.
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial.
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal.
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja.
- e. Menggunakan pendekatan partisipasif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek.
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan.

Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya.

3. Komponen Pemberdayaan

Komponen pemberdayaan Menurut Nugroho (2003:1-4) Komponen pokok yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat, yakni:

- a. Penelitian untuk penggalan data dan informasi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan rencana strategis (*strategic plan*) sesuai kebutuhan (*needs*). Metodologi yang dapat digunakan antara lain *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *Participatory Learning Action Planning (PLAP)*, *Participatory Action Research (PAR)*, *Participatory Rapid Community Appraisal (PARCA)*, *Focused Group Discussion (FGD)*, dan *Benchmark (Baseline Study)*;
- b. Pelatihan dengan fokus pengembangan kapasitas (*capacity building*) terhadap target pemberdayaan;
- c. Kerjasama dan inovasi: Pelatihan akan berjalan efektif apabila dilengkapi jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepakaran dan komitmen, serta mengandung muatan inovasi spesifik lokasi. Sinkronisasi semua komponen tersebut diwujudkan dari hasil penelitian;

- d. Pemangku kepentingan dan tenaga pendamping ini seyogyanya gabungan dari petugas instansi pemerintah dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tinggal dan kontak langsung dengan masyarakat dalam rangka fasilitasi diskusi dan implementasi pemberdayaan. Disamping itu, tenaga pendamping juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan sponsor program pemberdayaan.
- e. Pengawasan dan evaluasi merupakan masukan untuk modifikasi dan penyempurnaan kegiatan pemberdayaan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien.

Semua komponen tersebut diimplementasikan dalam konsepsi “partisipatif”. Menurut Kindervatter dalam Mu’arifuddin (2011:27-28) pelaksanaan pemberdayaan memiliki sebelas dimensi, yaitu:

- a. *Structure*, penekanan pada struktur pembentukan yang dilatarbelakangi adanya kesamaan tujuan;
- b. *Setting time*, penggunaan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. *Rule of learner*, tugas warga belajar dan fasilitator kerja sama dalam menentukan dan membuat keputusan secara bersama;
- d. *Role of fasilitator*, tugas fasilitator membantu warga belajar dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi;
- e. *Relationship between learners and fasilitator*, hubungan diantara warga belajar dan fasilitator;

- f. *Need assesement*, kebutuhan diidentifikasi dari warga belajar beserta fasilitator;
- g. *Curriculum development*, tujuan yang ingin dikembangkan;
- h. *Subject matter*, menunjukkan pada isi pemberdayaan, fasilitator 21 membantu warga belajar dalam menyelesaikan masalah;
- i. *Material*, bahan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan;
- j. *Methods*, metode yang digunakan;
- k. *Evaluation*, tindakan evaluasi sebagai wujud keberhasilan pemberdayaan.

4. Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya upaya pemberian kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat terutama kaum marjinal. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra (2006:87) antara lain kemauan politik yang mendukung, suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh, motivasi, potensi masyarakat, peluang yang tersedia, kerelaan mengalihkan wewenang, perlindungan, dan kesadaran. Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan cara, metode yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Suharto (2010:66), strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra yaitu:

- a. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap *klien* secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih *klien* dalam menjalankan tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered aproach*).
- b. Aras mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media *intervensi*. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap *klien* agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- c. Aras Makro, pendekatan ini di sebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen politik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang *klien* sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi, dan untuk memiliki serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Menurut Dubois dan Miley dalam Suharto (2010:68) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Membangun relasi pertolongan yang meliputi:
 - 1) Merefleksikan respon empati;
 - 2) Menghargai pilihan dan hak *klien* menentukan nasibnya sendiri;
 - 3) Menghargai perbedaan dan keunikan individu;
 - 4) Menekankan kerjasama *klien*.
- b. Membangun komunikasi yang meliputi:
 - 1) Menghormati martabat dan harga diri *klien*;
 - 2) Mempertimbangkan keragaman individu;
 - 3) Berfokus pada *klien*;
 - 4) Menjaga kerahasiaan *klien*.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang meliputi:
 - 1) Memperkuat partisipasi *klien* dalam semua aspek proses pemecahan masalah;
 - 2) Menghargai hak-hak *klien*;
 - 3) Merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar;
 - 4) Melibatkan *klien* dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui:
 - 1) Dua puluh tiga ketaatan terhadap kode etik profesi;

- 2) Keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan;
- 3) Penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik;
- 4) Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Menurut Suhendra (2008:104-113) mengemukakan terdapat beberapa teknik pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Teknik *Participatory Rural Appraisai* (PRA), menurut Driyamedia dalam Suhendra (2006:105) *Participatory Rural Appraisai* (PRA) yaitu pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaann serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat.
- b. Metode partisipasi asesmen dan rencana, metode ini terdiri dari empat langkah yaitu:
 - 1) Menemukan masalah
 - 2) Menemukan potensi
 - 3) Menganalisis masalah dan potensi
 - 4) Memilih solusi pemecahan masalah.
- c. Metode loka karya, metode ini efektif untuk memotivasi anggota peserta menyampaikan aspirasi dan kretivitas. Loka karya bermanfaat untuk mengambil keputusan untuk sesuatu fokus permasalahan secara musyawarah dan ditemukan suatu konsensus.

- d. Teknik *Brainstorming*, teknik ini dapat memotivasi untuk munculnya kreativitas anggota dalam memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi, dan teknik ini merupakan wujud dari “*bottom up*” hingga dapat memunculkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab.
- e. CO-CD (*community organization community development*).

5. Proses Pemberdayaan

Proses Pemberdayaan menurut Widjajanti (2011:18) yaitu proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun non formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, perencanaan program, pelaksanaan program, dan keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan. Soetomo (2013:95-124) mengemukakan apabila program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya.

Langkah-langkah pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Reorientasi merupakan peninjauan ulang terhadap pemberian kewenangan kepada *stakeholder*, reorientasi perlu dilakukan karena perspektif memiliki orientasi dan pandangan yang berbeda tentang

kapasitas masyarakat dan tentang posisi masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai pihak terutama Negara dan pasar.

- b. Gerakan sosial dapat menciptakan iklim sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mendorong pengambilan kebijakan untuk memperlihatkan nilai pemberdayaan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan masyarakat.
- c. Institusi lokal sebagai pendewasaan dan penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan, pendewasaan dan penyempurnaan tersebut melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- d. Pengembangan kapasitas merupakan unsur utama dari proses pemberdayaan disamping pemberian kewenangan.

Pada dasarnya dapat digunakan dua prinsip dasar dalam penyampaian stimuli eksternal agar hasilnya cukup efektif. Pertama, stimuli eksternal harus dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menggali dan mengaktualisasikan potensi dan modal sosial dalam masyarakat. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam memberikan stimuli harus disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan. Semakin meningkat kapasitas kelembagaan kapasitas dalam masyarakat, semakin berkurang proporsi stimuli eksternal yang yang diberikan.

Sulistiyani (2004:118) mengemukakan proses pemberdayaan adalah seluruh kegiatan atau langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu, yang terdiri dari:

- a. Pendekatan *capacity building* untuk memberdayakan kelembagaan agen pembaharu;
- b. Pendekatan *New Public Management* (NPM) untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal;
- c. Pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi agen pembaharu;
- d. Pendekatan substansial melalui pengorganisasian *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan substansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Proses ini dapat dicapai dengan melakukan pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (2010:33), yaitu:

- a. Pemukiman: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemampuan mandiri.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas dari kelompok yang kuat, menghindari

terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dari tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat agar berdaya dan dapat mencapai kesejahteraan.

6. Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh lagi (Sulistiyani, 2004:83). Sebagaimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini menggambarkan bahwa pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat

sesungguhnya lebih pada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Seungguhnya penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Masyarakat akan mengalami proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang terjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang masyarakat butuhkan. Masyarakat akan hanya dapat memberikan peran partisipasinya pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di lingkungannya. Apabila

masyarakat telah mencapai tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

Konsep pembangunan masyarakat menggambarkan bahwa pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan pada subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

D. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Telah banyak dilakukan berbagai penelitian mengenai pemberdayaan perempuan diberbagai belahan dunia utamanya di negara miskin dan sedang berkembang hal ini menunjukkan bahwa perempuan diberbagai belahan dunia dahulu tidak memiliki “day” pada dekade terakhir ini dilakukan usaha pemberdayaan oleh organisasi-organisasi dunia dan pemerintah negara-negara tersebut. Seperti orang lanjut usia, anak-anak dan penyandang cacat, perempuan juga termasuk kelompok yang tidak berdaya (Sadan, 2004:98). Sebagian besar perempuan tidak berdaya karena budaya yang masih mengakar pada masyarakat.

Budaya yang membatasi ruang gerak perempuan, karena menganggap perempuan lebih rendah posisinya dibandingkan dengan laki-laki, yang mengakibatkan ketidakberdayaan perempuan di dalam rumah tangga

maupun lingkungan publik yang lebih luas, sehingga mengakibatkan ketidakberdayaan ganda pada perempuan, yaitu sebagai anggota dari suatu rumah tangga miskin dan sebagai perempuan dalam subordinasi pria. Namun harus diakui bahwa peran biologis perempuan sebagai ibu mendorong subordinasi dalam urutan patriaki. Kehamilan, aborsi dan kelahiran, ditambah dengan ketergantungan baik terhadap ibu sebagai sumber pangan dan gizi (konsumsi ASI) mengingat perempuan dalam lingkungan dalam lingkungan domestik.

2. Peran Pemberdayaan Perempuan

Begitu kompleksnya peran perempuan dalam rumah tangga (keluarga) serta beratnya beban yang ditanggung oleh perempuan dalam keluarga miskin, maka diperlukan pemikiran tentang konsep pemberdayaan perempuan yang mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi peran perempuan tersebut. Perempuan penting untuk ditingkatkan keberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh perempuan merupakan kehilangan bagi laki-laki melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian (*self reliance*) dan kekuatan dalam dirinya (*Internal Strength*) (Priyono, 1996:199). Pemberdayaan tidak lepas dari peran perempuan, menurut Sumodiningrat dalam Sulistyani (2004:78) mengatakan bahwa

pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu bergerak secara mandiri.

Memperdayakan perempuan pertanian untuk kualitas hidup yang lebih baik merupakan masalah penting dan lebih diperdalam kesenjangan gender dalam produksi pertanian. Sehingga pemberdayaan dapat terjadi dalam masyarakat dengan daya terbatas sehingga potensinya dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian (Sulistiyani, 2004:79). Dengan demikian sesuai dengan tujuan pemberdayaan perempuan dimaksudkan agar perempuan dapat mencapai kemandirian.

Kemandirian masyarakat (bisa diterjemahkan sebagai suatu komunitas perempuan) adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan, dan melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan seperti kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Dengan demikian sebuah proses untuk memberdayakan perempuan juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi lokal.

3. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga

Peran perempuan dalam rumah tangga dikaitkan dengan fungsi domestik atau pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan rumah sehari-hari. Maksud dari perempuan disini adalah perempuan yang dianggap dapat melakukan pekerjaan baik pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan diluar rumah untuk menambah pendapatannya (bukan anak-anak/usia kurang lebih 15 tahun seperti yang dikategorikan di BPS). Pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang dimaksud adalah kesibukan rumah tangga setiap hari seperti memasak (bisa juga menyiapkan makanan bila makanan dibeli dari luar), membersihkan rumah, mencuci barang- barang rumah tangga/ pakaian, merawat anak-anak dan orang tua (usia lanjut), serta kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat.

Apabila perempuan berada dalam posisi keluarga yang miskin akibatnya beban pekerjaan akan bertambah karena perempuan juga memiliki kewajiban untuk menambah pendapatannya dengan cara bekerja di luar rumah. Keterlibatan perempuan dalam menghasilkan perekonomian bukanlah sesuatu yang baru kemarin penting tetapi memang merupakan bagian dari hidup. Menurut (Quah, 2000:7), kontribusi dalam produksi kebutuhan rumah tangga berada dalam dua masalah utama yaitu jumlah yang diproduksi dan nilai ekonomi dari waktu yang diperlukan untuk memproduksinya. Jumlah dari waktu yang dihitung adalah waktu yang diperlukan untuk jasa keseharian dalam keperluan untuk memasak,

membersihkan rumah, mencuci, dan berbagi kebutuhan lain yang di perlukan dalam kehidupan rumah tangga.

4. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pertanian

Peran perempuan di bidang pertanian dimulai semenjak orang mengenal alam dan bercocok tanam. Semenjak itu pula mulai berkembang pembagian kerja nyata antara laki-laki dan perempuan yang beragam pekerjaan baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat luas. Perempuan mempunyai peran ganda yaitu sebagai pembina rumah tangga (sektor domestik) dan pencari nafkah (sektor publik).

Keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan sering tidak diperhitungkan. Di sektor publik perlu adanya peningkatan status perempuan tani dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara memberikan dukungan agar perempuan tani lebih banyak berperan sebagai subyek, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan lebih banyak untuk berperan sebagai perencana dan pengambil keputusan dalam bidang pertanian. Meningkatkan kesadaran tentang situasi diri dan kemampuan mengungkapkan kebutuhan perempuan sendiri.

Pembangunan pertanian pedesaan telah menyebabkan gejala modernisasi dan urbanisasi serta berbagai perubahan sosial ekonomis dalam masyarakatnya. Terjadinya perubahan dalam sistem nilai sosial ekonomis dalam masyarakatnya. Terjadinya perubahan dalam sistem nilai sosial, norma dan perilaku, serta pola hubungan antar pria dan perempuan. Ironisnya,

keadaan tersebut juga menimbulkan terjadinya gejala disintegrasi dan diskriminasi dalam “pembagian kerja” antara pria dan perempuan di berbagai bidang.

Hubungan pria dan perempuan dalam masyarakat agraris sebetulnya mencerminkan: pertama, kedudukan yang “berbeda tapi setara”, dimana pria-perempuan berperan untuk kepentingan bersama saling melengkapi. Pemisahan peran dan pengaruh antar *gender* bersifat komplementer, dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dalam rumah tangga dan masyarakat. Meski diakui dan dibenarkan, serta dianut dalam berbagai program pembangunan dan berbagai ideologi/norma masyarakat, namun implementasinya bahkan bertolak belakang.

Kedua, kedudukan yang “berbeda dan tidak setara”, merupakan dua pandangan yang saling bertentangan, yang mencerminkan “kekuasaan perempuan nyata tapi tersembunyi”, dan terdapatnya “penundukan (intimidasi/penindasan) perempuan nyata tapi tersembunyi”. Pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian antara lain nampak dalam bentuk kelompok tani. Tidak setiap kumpulan orang adalah kelompok.

Sekumpulan orang disebut kelompok kalau: (1) saling kenal dan memiliki ikatan batin satu sama lain, (2) memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama, (3) Keanggotaannya relatif stabil untuk jangka waktu yang lama, (4) Ada batas jelas yang membedakan anggota dengan bukan anggota, (5) Ada struktur, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas diantara anggotanya, (6) Ada aturan kelompok yang disepakati dan

ditaati oleh para anggotanya, dan (7) ada kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama (Kementrian Dalam Negeri, 2003). Kelompok perempuan tani antara lain diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar dicapai kehidupan ekonomi, sosial dan budaya keluarga yang lebih baik dan sejahtera. Kelompok ini diharapkan dapat memacu kegiatan ekonomi produktif di lini terkecil yaitu keluarga.

E. Kelompok Wanita Tani

1. Pengertian Kelompok Wanita Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang terikat secara non formal dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok Wanita Tani atau disingkat “KWT” merupakan kelompok swadaya yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jumlah anggota kelompok idealnya berkisar 20-30 orang atau disesuaikan dengan kondisi dan wilayah kerja kelompok tidak melampaui batas administrasi desa. Anggota kelompok tani dapat berupa petani dewasa dan pemuda, wanita dan pria. Anggota keluarga petani (istri dan anak) yang berperan membantu kegiatan usaha tani keluarga, tidak dimasukan menjadi anggota kelompok tetapi diarahkan membentuk kelompok wanita tani atau pemuda tani.

Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan istri petani yang membantu kegiatan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Menurut UPTBP3K penumbuhan kelompok tani didasarkan pada prinsip-prinsip (<http://uptbp3k.com>): kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan dan kemitraan. Dengan demikian kelompok wanita tani merupakan kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan kemauan serta kesadaran masyarakat sendiri guna ikut berpartisipasi aktif meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

2. Fungsi Kelompok Wanita Tani

Belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti pada peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Menurut Slameto (2003:27), belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, belajar juga memiliki berbagai manfaat:

- a. Melalui proses belajar dapat menumbuhkan kebiasaan pada individu atau kelompok;

- b. Melalui proses belajar dapat menumbuhkan motivasi pada individu atau kelompok dan adapat menjadikannya sukses;
- c. Melalui proses belajar akan menambah banyak ilmu pengetahuan;
- d. Melalui proses belajar, individu atau kelompok dapat dibutuhkan oleh lingkungan sekitar;
- e. Melalui proses belajar, dapat menambah keterampilan dalam diri individu atau kelompok.

Dalam proses belajar banyak yang harus dilalui dan terdapat berbagai ujian dan juga evaluasi. Kelompok wanita tani yang merupakan salah satu media atau wadah para petani wanita untuk belajar karena salah satu fungsi kelompok wanita tani adalah sebagai kelas belajar. Proses belajar pada kelompok wanita tani berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani meliputi beberapa hal di bawah ini:

- a. Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar;
- b. Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar;
- c. Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota kelompok wanita tani;
- d. Melaksanakan proses pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib;
- e. Menjalani kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
- f. Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;

- g. Aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangi dan berkonsultasi kepada kelembagaan penyuluhan pertanian, sumber-sumber informasi lainnya;
- h. Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota kelompok wanita tani;
- i. Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompok wanita tani;
- j. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam kelompok wanita tani, antar kelompok tani.

Salah satu metode penyuluhan pembangunan pertanian yang sampai saat ini lebih sering digunakan adalah metode pertemuan kelompok secara langsung dengan media lisan, cetak, maupun terproyeksi. Metode ini biasanya dilakukan dalam dua bentuk pertemuan kelompok, yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Bentuk pertama lebih bersifat *top-down* karena informasi lebih banyak bersumber dari penyuluh, sedangkan bentuk yang kedua lebih bersifat *bottom-up* karena penyuluh hanya berstatus sebagai fasilitator berlangsungnya diskusi kelompok sehingga informasi lebih banyak bersumber dari peserta.

Keefektifan kedua bentuk pertemuan dalam penyuluhan pembangunan pertanian tersebut tidak dapat dibandingkan satu dan lainnya karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi penyuluhan pembangunan pertanian akan efektif jika dilakukan dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan karakteristik kelompok sarannya. Beberapa

langkah di atas yang merupakan fungsi kelompok wanita tani sebagai kelas belajar saling berkesinambungan. Dimana kelompok wanita tani menggali dan merumuskan apa yang hendak dipelajari, membuat pertemuan berkala, mendatangkan konsultan di bidang pertanian dan aktif saling belajar mengajar.

Fungsi sebagai kelas belajar bagi masyarakat perempuan di pertanian tersebut, merupakan salah satu pola kegiatan dalam memenuhi tujuan kelompok tani itu sendiri. Pada proses pembelajaran telah ditetapkan beberapa persiapan dan tujuan yang hendak dicapai dalam belajar. Dari proses pembelajaran di atas, dapat di tangkap maksud dari tujuan dari fungsi kelompok wanita tani sebagai kelas belajar. Tujuan-tujuan itu diantaranya adalah, menjadikan anggota kelompok wanita tani menjadi wanita yang memiliki pengetahuan yang luas, hal ini diperlihatkan dengan adanya penyuluhan dengan mendatangkan konsultan dari bidang pertanian. Menjadikan anggota kelompok wanita tani menjadi petani yang sukses, disiplin, dan juga aktif. Beberapa tujuan-tujuan itu dijalankan oleh kelompok wanita tani melalui fungsinya sebagai kelas belajar.

F. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang disumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.

Pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun (Wahyu Adji, 2004:3). Bambang Swasta Sunuharjo dalam Buku Kemiskinan dan Kebutuhan pokok yang dikutip Agustin (2010:23) merinci pendapatan dalam 3 kategori yaitu:

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi;
- b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa;
- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributif dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

2. Pendapatan Keluarga

Menurut Gilarso (2003:63), Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi". Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari:

- a. Usaha itu sendiri: misalnya berdagang, bertani, membuka usaha sebagai wiraswastawan;
- b. Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan;

c. Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain.

Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang. Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah. Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem.

Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya. Sedangkan pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dengan konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat kecil (Nugraheny Mustika, 2009:15). Berkaitan dengan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan keluarga adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem. Dalam penelitian ini yang dimaksud pendapatan keluarga adalah pendapatan keseluruhan yang diterima keluarga perempuan pemilik sekaligus pengelola *home industry* baik dari hasil *home industry* maupun *non-home industry*

3. Metode Perhitungan Pendapatan

Menurut Soediyono yang dikutip oleh Agustin (2010: 26-27) perhitungan pendekatan pendapatan sebagai berikut:

a. Pendekatan hasil produksi

Besarnya pendapatan dapat dihitung dengan mengumpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa untuk suatu unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendapatan dapat dihitung dengan mengumpulkan data tentang pendapatan yang diperoleh oleh suatu rumah tangga keluarga.

c. Pendekatan Pengeluaran

Menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi.

Pendekatan perhitungan pendapatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendapatan yang mengumpulkan semua pendapatan yang diperoleh keluarga baik itu dari hasil bekerjanya di usaha *home industry*, pekerjaan pokoknya maupun pekerjaan sampingannya.

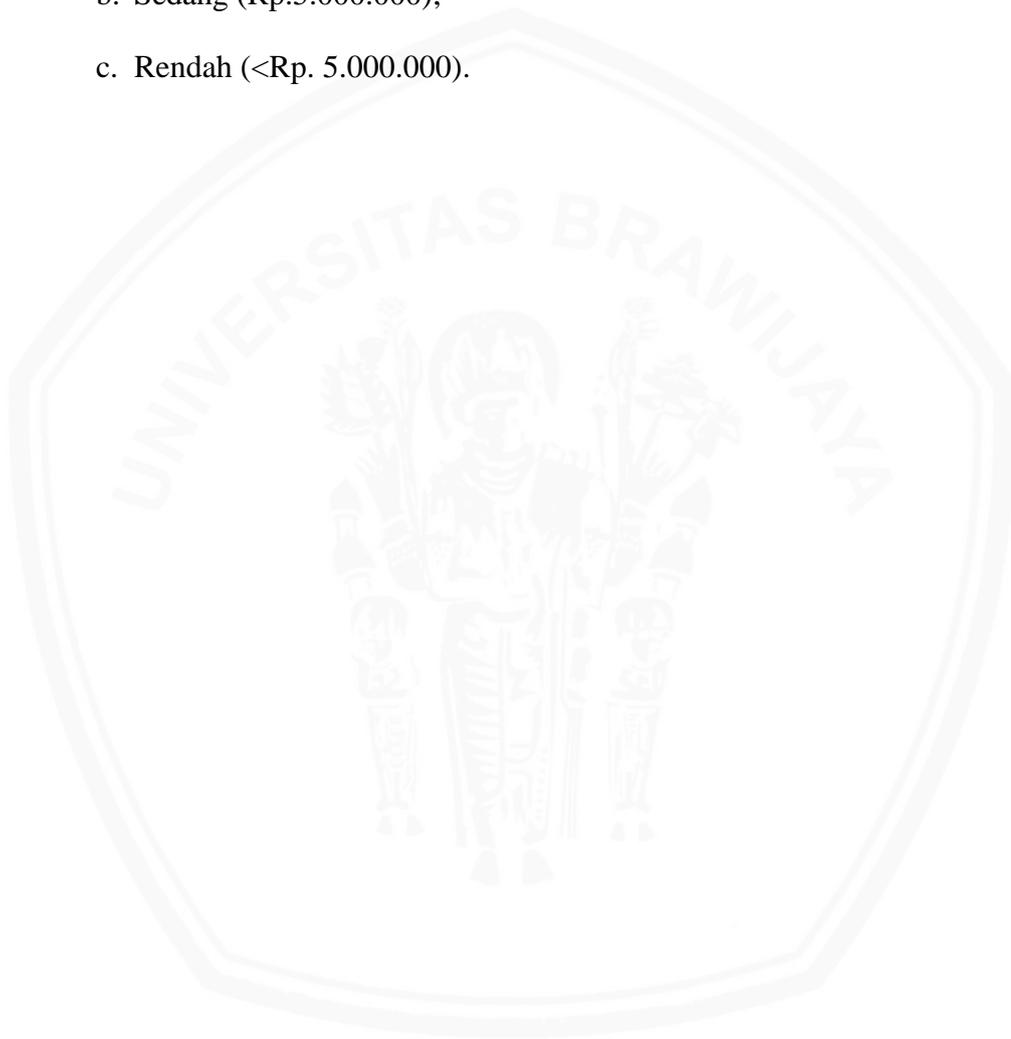
4. Indikator Peningkatan Pendapatan Keluarga

Menurut Badan Pusat Statistik dalam penelitian Sugiarto (2007:112) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi, atau pengeluaran keluarga, kemudahan

mandapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Adapun

Indikator Peningkatan Pendapatandi golongan menjadi 3 item yaitu:

- a. Tinggi (>Rp.10.000.000);
- b. Sedang (Rp.5.000.000);
- c. Rendah (<Rp. 5.000.000).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini dianggap paling tepat untuk menjangkau, menjelaskan dan menggambarkan segala permasalahan dan data yang ada dengan lebih mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Moleong (2014:6) penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain) secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan jenis penelitian deskriptif, menurut Sukmadinata dalam (Mardalis, 2014:26) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku dengan upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif ini dipilih untuk mengetahui tentang Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan (Studi pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang), maka akan memperoleh pemahaman mengenai kejadian atau fenomena yang diteliti dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

B. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif, membutuhkan suatu fokus untuk melihat situasi dan kondisi nyata di lapangan. Fokus penelitian memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih rinci dan terarah. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga, yaitu:
 - a. Proses Pemberdayaan, meliputi:
 - 1) Pemukiman
 - 2) Penguatan
 - a. Penyadaran dan Pembentukan Perilaku
 - b. Transformasi Kemampuan
 - c. Peningkatan Kemampuan Intelektual.
 - 3) Perlindungan
 - 4) Penyokongan
 - b. Indikator Peningkatan Pendapatan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

- 2) Kompetensi Penyuluh
 - 3) Potensi Sumber Daya Alam (SDA)
 - 4) Jalur Pariwisata
- b. Faktor Penghambat, yaitu Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Moleong (2014:128) menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap peristiwa atau fenomena yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Malang dikarenakan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan di Karangploso Kabupaten Malang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan pembangunan di Karangploso Kabupaten Malang.

Peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang diteliti, sehingga keakuratan data diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang diperoleh. Sehingga tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dengan situs dalam penelitian ini adalah

Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang karena Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tupoksi di bidang penyuluhan dan pemberdayaan petani dalam menjalankan pembangunan pertanian khususnya kesejahteraan petani dan mudah di akses oleh penyuluh.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dalam (Moleong, 2014:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh Karena itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) antara lain:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Pihak yang akan dijadikan sumber data yaitu:

- a. Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang;
- b. Penyuluh Pertanian Karangploso Kabupaten Malang;
- c. Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara”;
- d. Sekretaris Kelompok Wanita Tani “Hemara”;
- e. Bendahara Kelompok Wanita Tani “Hemara”;
- f. Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya yang dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, artikel-artikel yang terdapat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Selain itu, data

yang diambil bisa berasal dari internet, surat kabar dan jurnal-jurnal. Data yang diperoleh yaitu:

- a. Laporan-Laporan dari Balai Penyuluhan Pertanian.
- b. Artikel-artikel dari Internet.
- c. Surat Kabar Online terkait Kelompok Wanita Tani Kabupaten Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan antara lain dilakukan dengan:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Sugiyono (2014:157-161) wawancara dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, digunakan untuk sebagai teknik pengumpulan data, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.
- b. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Jadi, berdasarkan jenis wawancara di atas peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai pertanyaan yang telah disusun secara garis besar berdasarkan fokus penelitian yang akan ditanyakan kepada Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sugiyono (2014:164-156) observasi berdasarkan proses pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Observasi Berperanserta, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti.
- b. Observasi Nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi Nonpartisipan yaitu peneliti mengobservasi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan keluarga (Studi pada UPT Balai

Penyuluh Pertanian Karangploso Kabupaten Malang) dan sejauh mana dampak yang diberikan kepada Kelompok Wanita Tani dari tugas dan fungsi UPT Balai Penyuluhan Karangploso Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

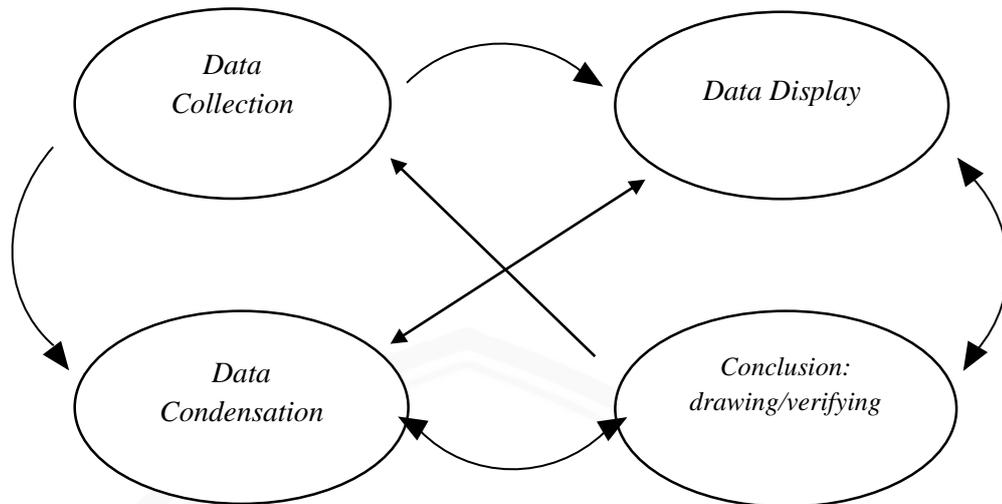
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil penelitiannya (Moleong, 2014:168). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan antara lain:

1. Peneliti sendiri, dengan melakukan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara, berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan.
3. Perangkat penunjang, berupa catatan, alat tulis, alat perekam untuk memudahkan dalam memperoleh data yang mungkin belum didapatkan dari dokumen tertulis.

G. Analisis Data

Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dinilai belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik yaitu yang diperoleh di lapangan, kearah suatu temuan yang bersifat umum, yang muncul melalui analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Sesuai dengan penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, M.B Miles, A.M. Huberman dan J. Saldana (2014:14) mengemukakan bahwa ada tiga bentuk analisis yaitu: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Gambar model interaktif yang diajukan M.B Miles, A.M. Huberman dan J. Saldana:



Gambar 1. Components of data analysis: Interactive Model

(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana 2014:14)

Tahapan-tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkum, dimana penulis memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Kondensasi data dilakukan setelah peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kondensasi data juga dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah peneliti tentukan sebelumnya.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, berupa bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya dalam penyajian data yang biasa digunakan dan yang peneliti gunakan adalah penyajian data yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion: drawing/verifying*)

Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan Faktor pendukung serta faktor penghambat baik pada kondisi internal maupun eksternal.

H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan untuk menguji tingkat kepercayaan maupun kebenaran dari penelitian yang ditentukan dengan standar yang ada, dalam hal ini yang digunakan oleh penulis untuk melakukan keabsahan data adalah:

1. Melakukan *Peer Debriefing*

Teknik ini dilakukan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari peneliti lain melalui suatu diskusi.

2. Triangulasi

Keabsahan data dalam penelitian ini dibuktikan dengan triangulasi data. Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik seperti yang sudah dijelaskan dalam jenis dan sumber data. Peneliti melaksanakan konfirmasi jawaban suatu informan dengan membandingkan dengan jawaban informan lain atau dengan jawaban yang diperoleh dari data wawancara, observasi maupun data dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Malang



Gambar 2. Peta Kabupaten Malang
Sumber: Pemerintah Kabupaten Malang 2018

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua



setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.544.315 jiwa (tahun 2015). Ibukota Kabupaten Malang adalah Kepanjen. Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya (malangkab.go.id, 22 Juni 2018).

b. Sejarah Kabupaten Malang

Gambaran Umum Kabupaten Malang dijelaskan dalam malangkab.go.id (22 Juni 2018). Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok

mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 - 1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya Kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah.

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674-1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati.

Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang

ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum'at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan.

c. Visi dan Misi Kabupaten Malang

Visi Kabupaten Malang adalah

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP".

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena

itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Misi Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
- 2) Memperluas penerapan dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- 3) Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengembangan produk unggulan desa;
- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;

- 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu:

- 1) Konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil.
- 2) Konsep dan arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil (malangkab.go.id, 22 Juni 2018).

d. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Malang terletak pada $112^{\circ}17'10,90''$ sampai $112^{\circ}57'00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ sampai $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan (malangkab.go.id, 22 Juni 2018). Batas wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Malang adalah:

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang
- 3) Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- 4) Sebelah selatan : Samudra Indonesia.

e. Geologi

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang merupakan Daerah Dataran Tinggi, wilayah ini dipagari oleh:

- 1) Utara : Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399m)

- 2) Timur : Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)
- 3) Barat : Gunung Kelud (1.731m)
- 4) Selatan: Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)
(malangkab.go.id, 22 Juni 2018).

f. Topografi

- 1) Daerah dataran rendah terletak pada ketinggian 250-500m diatas permukaan air laut
- 2) Daerah dataran tinggi
- 3) Daerah perbukitan kapur
- 4) Daerah lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300m diatas permukaan air laut)
- 5) Daerah Lereng Tengger-Semeru di Bagian Timur (500-3600m di atas permukaan air laut) (malangkab.go.id, 22 Juni 2018).

g. Fisiologi

Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri (malangkab.go.id, 22 Juni 2018).

h. Hidrologi

Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian yang agraris yaitu:

- 1) Kali Brantas : bermata air Dk. Sumber Brantas, Desa Tulungrejo (Batu), membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan di wilayah ini berakhir di Bendungan Karangates
- 2) Kali Konto : mengalir melintasi wilayah Kabupaten Pujon dan Ngantang dan berakhir di Bendungan Selorejo (Ngantang)
- 3) Kali Lesti : mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan Turen, Dampit dan sekitarnya. Disamping puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting
- 4) Kali Amprong: mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang (malangkab.go.id, 22 Juni 2018).

2. Gambaran Umum Kecamatan Karangploso

Kecamatan Karangploso Merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan ini terdiri dari sembilan desa, diantaranya desa Ampeldento, Bocek, Donowarih, Girimoyo, Kepuharjo, Ngenep, Ngijo, Tawangargo, dan Tegalgondo. Secara administratif, Kecamatan Karangploso dikelilingi oleh Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang yaitu:

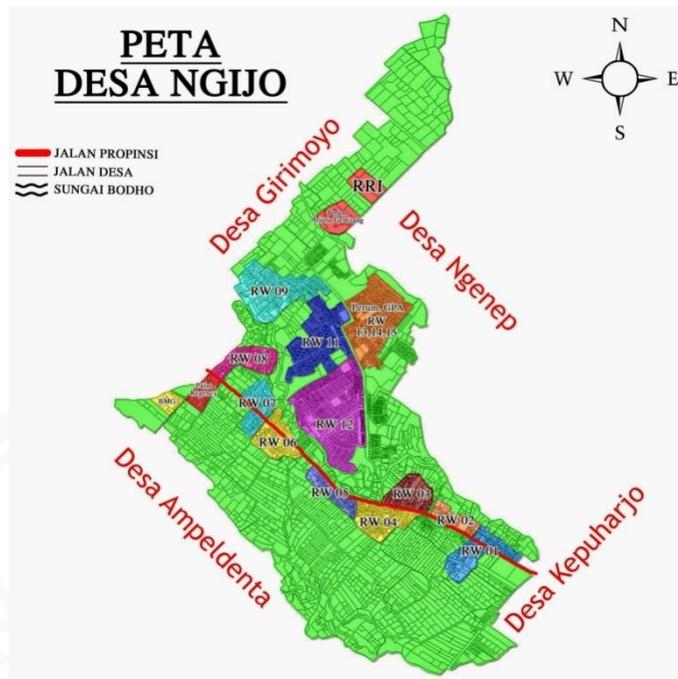
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari
- b. Sebelah Timur : Singosari dan Kota Malang

- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Dau, Kecamatan Junrejo, dan Kota Batu
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Bumiaji dan Kota Batu.

Kecamatan Karangploso memiliki luas wilayah 5.967.898 Ha. Sebagian besar wilayah kecamatan ini didominasi oleh area tegal, kebun, hutan dan sawah. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Berkembangnya pabrik-pabrik di wilayah kecamatan ini juga mempengaruhi peralihan mata pencaharian warga yang tadinya buruh tani menjadi karyawan pabrik.

Sektor peternakan juga menjadi produk andalan Kecamatan Karangploso. Sapi perah yang menghasilkan susu segar menjadi asset potensial bagi kecamatan ini. Susu segar hasil sapi-sapi yang dirawat warga menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan susu kemasan di wilayah Jawa Timur. Susu segar terlebih dulu disetorkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) setempat untuk kemudian di kirim ke pabrik-pabrik susu hingga ke luar Malang. Sektor pertanian terutama sayur-sayuran menjadi andalan dan merupakan pemasok terbesar di pasar Batu dan Malang terutama jenis wortel, kentang, sawi, dan umbi umbian.

3. Gambaran Umum Desa Ngijo



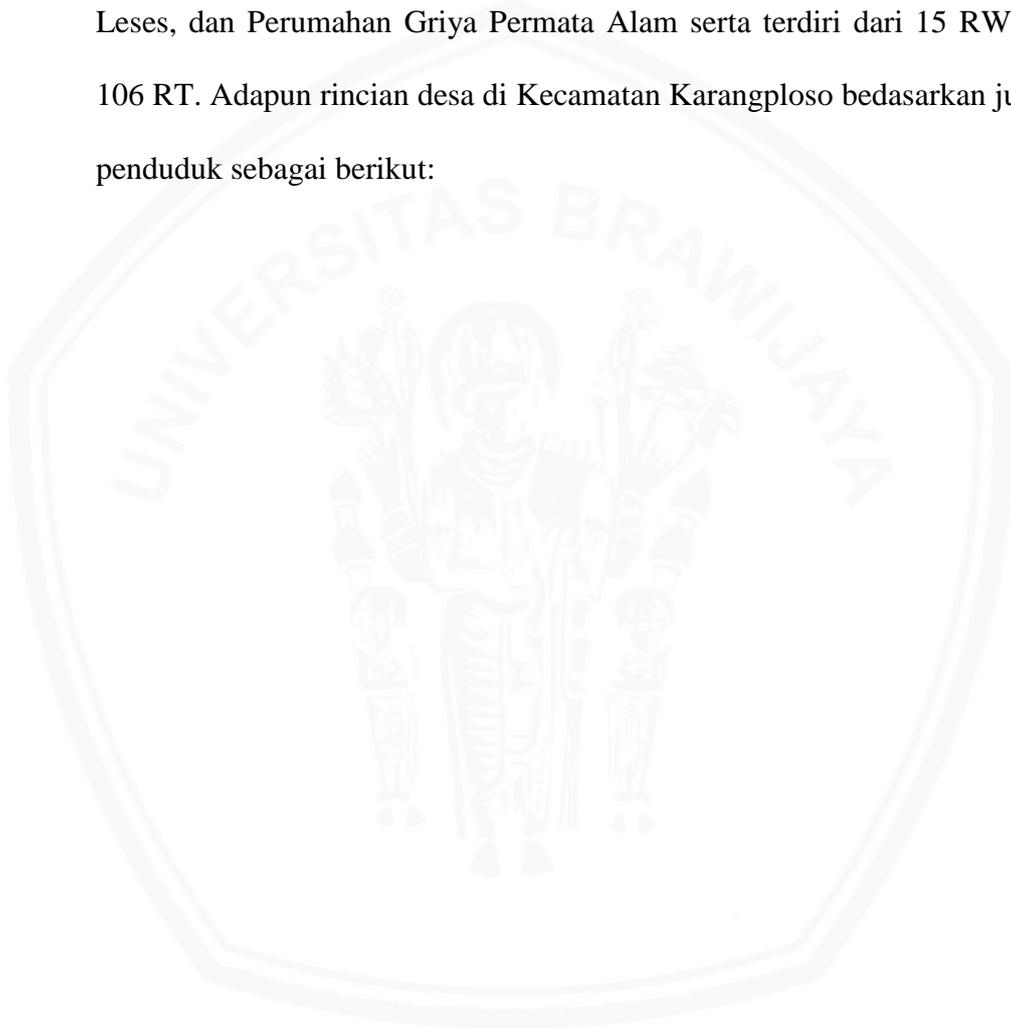
Gambar 3. Peta Wilayah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso
 Sumber: malangkab.go.id, 22 Juni 2018

Secara Geografis, Desa Ngijo Kecamatan Karangploso terletak sebelah utara Kabupaten Malang. Desa Ngijo $7^{\circ}20'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}08'-110^{\circ}10'$ Bujur Timur. Luas wilayah Desa Ngijo yaitu 399,904 Ha, sedangkan data orbitrasi atau jarak desa dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut jarak dengan kecamatan 3 km, jarak dengan pemerintahan Kabupaten 17 km, jarak dengan Propinsi Jawa Timur 65 km. Desa Ngijo terletak di wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Ngenep
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Ampeldento
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Dusun Kedawung

d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kepuh Harjo.

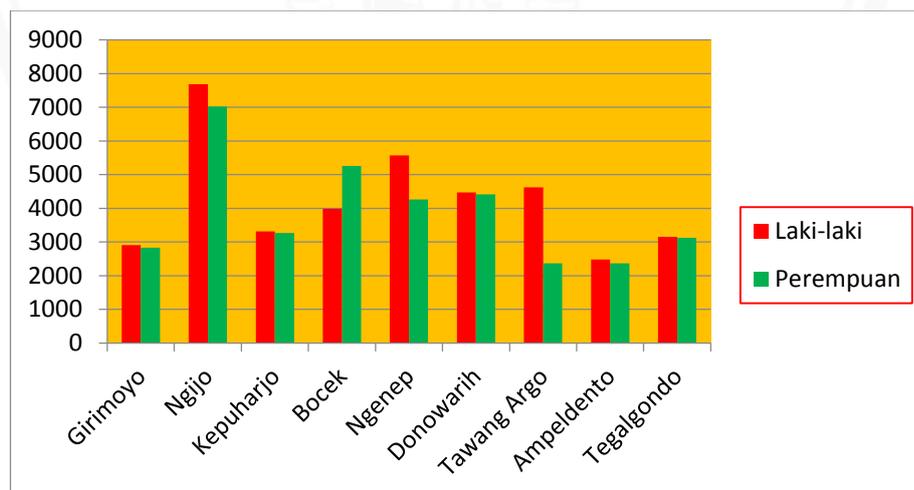
Secara administratif Kecamatan Karangploso terbagi dalam 9 (Sembilan) desa dengan jumlah dusun sebanyak 7 (tujuh) dusunnya itu dusun Kagrengan, Kedawung, Ngijo, krajan, Ngepeh, Takeran, Kendalsari, Leses, dan Perumahan Griya Permata Alam serta terdiri dari 15 RW serta 106 RT. Adapun rincian desa di Kecamatan Karangploso berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:



Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Desa di Kecamatan Karangploso

No.	D e s a	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		L	P	JUMLAH
1.	Girimoyo	2904	2830	5734
2.	Ngijo	7681	7020	14701
3.	Kepuharjo	3317	3268	6585
4.	Bocek	3990	3686	7676
5.	Ngenep	5567	5256	10823
6.	Donowarih	4466	4261	8727
7.	Tawang Argo	4623	4411	9034
8.	Ampeldento	2479	2362	4841
9.	Tegalgondo	3149	3121	6270
	JUMLAH	38176	36215	74391

Sumber: Program Kecamatan Karangploso Tahun 2018



Gambar 4. Grafik jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan

Sumber: Program Kecamatan Karangploso Tahun 2018

4. Gambaran Umum Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangploso

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, selama ini telah menjalankan fungsinya sebagai tempat interaksi para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Oleh karenanya, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) jadi garda terdepan dalam pengawalan dan sinergi program-program pembangunan pertanian, terutama mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) agar semakin baik kinerjanya dan semakin lengkap fasilitasnya adalah hal wajib yang harus dilakukan Kementerian Pertanian. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi beberapa yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan segala kegiatan penyuluhan. Pada hakekatnya komisi penyuluhan merupakan kelembagaan yang independen sesuai undang-undang.

Kelembagaan penyuluhan pada saat ini berubah atas Undang Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dimana penyuluhan berada di eselon IV yaitu seksi penyuluhan di UPTD Balai Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pertanian dan Perkebunan dalam Naungan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Sehingga penyuluh merasakan sendiri akan tugas dan fungsi penyuluhan cukup berat terkait dengan kegiatan serta anggaran yang diberikan baik anggaran daerah maupun anggaran pusat. Keberadaan penyuluhan saat ini, cukup memperhatikan pada setiap kabupaten/kota se provinsi. Bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian pada masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda ada di dinas pertanian dan juga ada dinas ketahanan pangan. Selain itu juga penyuluh ada dibidang eselon III dan ada juga kelembagaan penyuluhan di seksi eselon IV. Sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyuluhan pada setiap kabupaten/kota yang ada.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga, meliputi:

a. Proses Pemberdayaan

Dalam rangka mensukseskan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan tersebut, pemerataan hak kaum perempuan dalam berkarya, serta kesetaraan gender, Kelompok Wanita Tani (KWT) “HEMARA” Dusun Kagrengan Desa Ngijo Karangploso telah tepat memposisikan dirinya sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, mengolah hasil produksi pertanian menjadi produk olahan, yang tentunya akan menambah nilai jual dan nilai estetika bagi produk

pertanian lokal serta meningkatkan produktivitas pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelompok Wanita Tani (KWT) “HEMARA” yang berlokasi di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Karangploso berdiri atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama dengan motto yaitu “Tetap Mempertahankan Fungsi Kodrati Sebagai Ibu Rumah Tangga *KITA BISA!*” sehingga mampu bersaing dengan segala kemampuan, daya dukung potensi sumber daya alam (SDA), dan pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sehingga terbentuklah Kelompok Wanita Tani “HEMARA” pada tanggal, 4 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 411.61/05/421.207.132/2014. Berikut anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) “HEMARA”:

Tabel 2. Anggota Kelompok Wanita Tani “HEMARA”

No	NAMA	NIK	L/P	PENDIDIKAN	ALAMAT	Juml. Keluarga
1	Binti Niswatul Mufida	35073347 03860001	P	S1	Kagrengan RT 11/01 Ngijo	4
2	Luluk Fusmawati	35072365 09740004	P	SLTA	Kagrengan RT10/01 ngijo	4
3	Luluk Hidayati	35072341 1650005	P	SLTA	Kagrengan Rt10/01 Ngijo	4
4	Eny	35072352	P	SLTA	Kagrengan	3

No	NAMA	NIK	L/P	PENDIDIKAN	ALAMAT	Juml. Keluarga
	Rahmawati	05780005			Rt10/01 Ngijo	
5	Ifa Maulidia	35072347 02630002	P	SLTA	Kagrengan Rt 10/01 Ngijo	5
6	Farida	35072351 05730001	P	SLTA	Kagrengan Rt 10/01 NGijo	4
7	Mudrika	35072346 00475000 1	P	SLTA	Kagrengan Rt 10/01 Ngijo	3
8	Siti	35072344 09850002	P	SLTA	Kagrengan Rt10/10 Ngijo	6
9	Lailatul Badriah	35072344 04820001	P	SLTA	Kagrengan 04/01 Ngijo	4
10	Puji Rahayuning Asri	35072359 06820001	P	SLTA	Kagrengan0 1/01 Ngijo	4
11	Khumrotin	35072360 05800001	P	SLTA	Kagrengan0 4/01 Ngijo	5
12	Pujiastutik	35072342 03880000 1	P	SLTA	Kagrengan 04/01 Ngijo	6
13	Ucik Eli Emawati	35072367 09720002	P	SLTP	Kagrengan 06/01 Ngijo	2
14	Bibi Winda Listyawati	35072352 05690002	P	SLTP	Kagrengan 08/01 Ngijo	9

No	NAMA	NIK	L/P	PENDIDIKAN	ALAMAT	Juml. Keluarga
15	Kholifah	35072455 0680004	P	SLTP	Kagrengan 08/01 Ngijo	4
16	Hartutik	35072350 01800001	P	SLTP	Kagrengan 08/01 Ngijo	6
17	Aan Sugiarti	35072349 06820010	P	D-3	Kagrengan 10/01 Ngijo	4
18	Uswatun Chasanah	35072349 07880001	P	SLTP	Kagrengan 08/01 Kagrengan	6

Sumber: Profil Kelompok Wanita Tani (KWT) "HEMARA" 2017

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan masyarakat. Hal itu juga dapat berarti peningkatan kemampuan untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan, mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu hidup. Jadi pemberdayaan merupakan suatu proses terencana untuk meningkatkan mutu hidup. Proses Pemberdayaan dapat dibagi menjadi pemukiman, penguatan, perlindungan dan penyokongan.

1) Pemukiman

Pemukiman merupakan penciptaan suasana yang dapat menciptakan potensi masyarakat secara optimal untuk menciptakan hal tersebut penyuluh memberikan stimulasi agar Kelompok Wanita Tani "Hemara" dapat menciptakan karya yang dapat membantu

wanita tani untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian yang dihasilkan dalam kegiatan ibu-ibu. Menurut Ibu Ida sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani “hemara” menyampaikan sebagai berikut.

“Penyuluh memberikan bantuan berupa penyuluhan kepada Kelompok Wanita Tani contohnya menstimulasi agar Kelompok Wanita Tani semangat untuk dapat membuat karya-karya yang dapat diperjual belikan agar nantinya dapat mendukung perekonomian setiap keluarga di anggota Kelompok Wanita Tani khususnya untuk para ibu-ibu dapat lebih sejahtera kehidupannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Luluk Fismawati selaku Sekretaris Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyatakan bahwa:

“Banyak sekali yang saya dapat dari kegiatan kegiatan ini, mas. Pak yus (Penyuluh) sering sekali memberikan *wejangan-wejangan* kepada kami disini mengenai administrasinya agar baik dan terus semangat membuat keripik tempe dan teman teman yang lain untuk membuat hasil karya teman-teman yang lain. Seperti membantu memberi saran dari kemasannya gimana produk kami dikemas semenarik mungkin supaya bisa bersaing dengan olahan olahan pabrikan.” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.15 WIB).



Gambar 5. Kumpulan ibu-ibu dalam penyuluhan Kelompok Wanita Tani
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Bapak Yustanto selaku penyuluh Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

“Potensi Kelompok Wanita Tani awalnya sangat sederhana dan terbatas pada kegiatan rumah tangga. Pengetahuan, sikap dan keterampilan Kelompok Wanita Tani yang belum berkembang, maka saya memberikan penyuluhan penyuluhan terus-menerus melalui pertemuan dengan ketua kelompok dan memberikan motivasi kelompok dengan memberikan materi-materi sosial, ekonomi, dan teknis, materi penyuluhan sosial yang dimaksud adalah bagaimana pentingnya berkelompok (organisasi) dengan memperkuat kelembagaannya, secara ekonomi meliputi bagaimana mengatur dan memperkuat manajemen usaha terutama tentang pengelolaan anggaran dan cara mendapatkan modal usaha, sedangkan kegiatan teknis, antara lain budidaya sayuran organik, budidaya ternak kelinci, olahan bahan pangan serta

keterampilan tangan dengan merajut.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).



Gambar 6. Kumpulan ibu-ibu dalam penyuluhan Kelompok Wanita Tani
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa ibu-ibu Kelompok Wanita Tani dapat merasakan manfaat berorganisasi (Kelompok) dengan pengolahan manajemen yang baik dapat menciptakan usaha yang produktif dapat memumuk modal usaha dan dapat melakukan kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kegiatan penyuluh sangat berperan penting dalam mengubah pola pikir ibu-ibu yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, dan yang tadinya para ibu-ibu hanya menjadi ibu rumah

tangga yang menganggur dan berkumpul tidak menghasilkan apa-apa kini para ibu-ibu berkumpul bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat menghasilkan produk yang kreatif untuk dikembangkan terus menerus dan menjadi usaha milik pribadi yang hasilnya dapat dinikmati oleh ibu-ibu tersebut.

2) Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat menciptakan hal tersebut, maka penyuluh juga memperbanyak kegiatan yang dibuat sebagai hal dasar untuk memberikan penyuluhan dengan pelatihan maupun memberikan teori-teori yang dapat membangun karakter ibu-ibu. Bapak Yustanto selaku penyuluh Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan yang dimiliki Kelompok Wanita Tani dilakukan melalui pemberian materi-materi penyuluhan yang berkelanjutan dan dengan materi inovasi teknologi dari berbagai sektor melalui agenda pertemuan kelompok, desa ataupun kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).

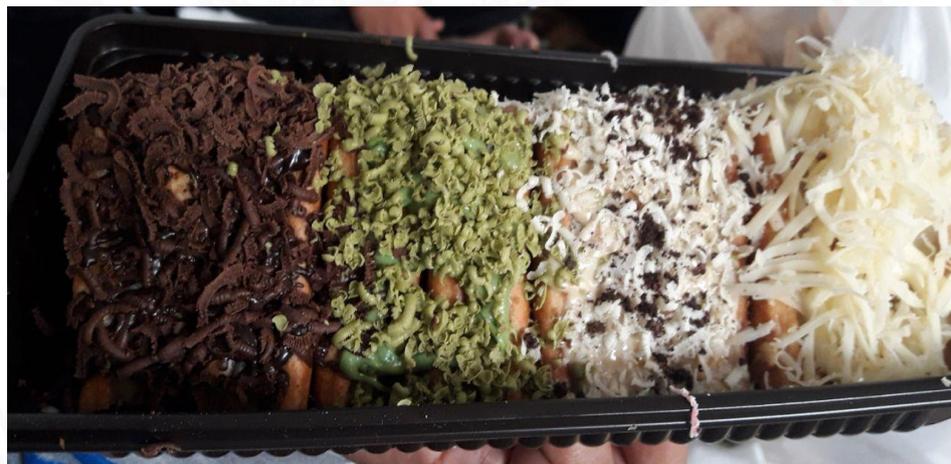
Hal tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan bahwa:

“Kita sangat senang jika penyuluh mengadakan pertemuan karena di setiap penyuluh mengadakan pertemuan disitu saya dan temen temen dapat pengetahuan baru seperti contohnya mas fadli yang saat ini memberikan demonstrasi cara membuat gabin susu dari situ dan teman-teman mendapatkan ide yang spontan untuk mengembangkan pengolahan gabin susu tersebut menjadi olahan makanan yang enak dan menarik untuk diperjual belikan.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).





Gambar 7. Peneliti *sharing* dengan Kumpulan ibu-ibu Kelompok Wanita Tani
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018



Gambar 8. Hasil Olahan Gabin Susu
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Luluk Fismawati selaku Sekretaris Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyatakan bahwa:

“Sangat senang karena kita disini mempunyai tradisi sebelum melakukan pertemuan kita biasanya mengadakan pengajian disitu menjadi awal pembuka acara pertemuan rutin dan disitu juga kita berdoa bersama untuk kelancaran usaha kita, dan kemudian

dilanjutkan dengan pembekalan dari penyuluh serta contohnya mas fadli saat ini yang memberikan pengetahuan tentang gabin susu dan biasanya juga ada demonstrasi dari orang-orang yang di bawa sama pak yus (Penyuluh) nah disitu kita biasanya *curhat* kepada penyuluh tentang masalah-masalah yang kita hadapi agar mendapatkan solusinya.” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dapat perlahan-lahan membangun dan memotivasi agar Kelompok Wanita Tani “Hemara” dapat terus bersemangat berkarya, tidak patah semangat dengan lebih banyak mendapatkan inovasi-inovasi teknologi yang menjadi peluang dalam berwirausaha. Peran penyuluh dengan memberikan materi penyuluhan yang bersifat memotivasi ibu-ibu dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

a. Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri masyarakat petani, khususnya ibu-ibu tani sebagai ibu kepala keluarga sangat tergantung pada kegiatan bapak-bapak sebagai kepala keluarga, dimana tugas-tugas sehari-hari yang dilakukan terbatas pada kegiatan masak-

memasak, mencuci dan membersihkan rumah selanjutnya berkumpul dengan ibu-ibu tetangga yang lainnya dilakukan secara rutin atau menjadi karakter ibu-ibu di tingkat pedesaan dengan hasil yang tidak dapat menambah kapasitas diri sebagai ibu yang berpotensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat lebih menguntungkan dan menghasilkan. Bapak Yustanto selaku penyuluh Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

“Kegiatan ibu-ibu Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam pertemuan rutinnnya itu berkegiatan keagamaan seperti tahlil dan mengaji, oleh sebab itu saya selaku penyuluh mencoba masuk dalam kegiatan tersebut dengan kehidupan sehari hari yang dilakukan untuk dapat memberikan hasil dengan perubahan penambahan pendapatan dalam keluarga. Dari situlah mulai terbentuk perubahan pengetahuan dan muncul perubahan perilaku-perilaku untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan potensi yang dimiliki.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan hal yang sama, yaitu:

“Perkembangan ibu-ibu didapat dengan adanya penyuluh yang mengadakan kegiatan penyuluhan rutin kami sangat terasa perkembangannya terhadap perilaku ibu-ibu yang muncul untuk dapat berbuat dengan menghasilkan suatu produk untuk dapat dijual mengingat Kecamatan Karangploso merupakan jalur pariwisata.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.00 WIB).

Ibu Luluk Fismawati selaku Sekretaris Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyatakan bahwa:

“Yang diajari oleh penyuluh di setiap pertemuan selalu memberikan inspirasi terhadap saya maupun ibu-ibu yang lain untuk berbuat sesuatu yang menghasilkan seperti membuat keripik tempe, olahan daging kelinci yang jadi abon itu mas, terus coklat terus ada eskrim dan lain-lain.” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.15 WIB).



Gambar 12. Produksi Olahan Keripik Tempe
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018



Gambar 13. Produksi Olahan Daging Kelinci Menjadi Abon
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018



Gambar 14. Produksi Olahan Coklat
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Ibu Luluk Fismawati selaku Sekretaris Kelompok Wanita Tani

“Hemara” menyatakan bahwa:

“Saya itu selalu memikirkan, mas, gimana caranya menghasilkan usaha untuk membantu menambah pendapatan keluarga saya dan saya mencoba mengikuti pertemuan penyuluh terus dari situ saya

mendapatkan inspirasi tentang pengolahan apa yang bisa saya buat es krim dan keripik usus.” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan informal, misalnya kegiatan tahlilan, kumpul bersama, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan informal tersebut, pendampingan akan dilaksanakan dan saling berdiskusi untuk memberikan motivasi satu sama lain. Hal tersebut sangat berpengaruh baik kepada masyarakat, khususnya perempuan agar mempunyai keinginan dan motivasi untuk menghasilkan usaha serta membantu pendapatan keluarga.

b. Transformasi Kemampuan

Berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Wawasan pengetahuan dilakukan melalui pendampingan yang berkelanjutan terhadap kelompok masyarakat dengan memberikan ilmu yang bersifat teknis, sosial dan ekonomi sesuai dengan potensi kebutuhan kelompok masyarakat yang menjadi tujuan pembinaan atau pendampingan. Pengetahuan yang diterima kelompok masyarakat akan membuka

wawasan untuk dapat menambah sikap dan perubahan-perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam pembangunan masyarakat mandiri, dengan perubahan sikap akan berlanjut pada perbuatan atau perilaku yang membangun sesuai potensi pribadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat keterampilan yang menguntungkan.

Bapak Yustanto selaku penyuluh Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

“Jadi penyuluh itu menyampaikan bahwa pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilakukan secara berkelanjutan dengan materi penyuluhan pemanfaatan potensi lingkungan ataupun individu dan kelompok. Salah satu contoh pembuatan olahan dari bahan baku hasil pertanian setempat seperti jahe, kunir, bawang putih, pisang, dan lain sebagainya untuk dibuat keripik selain itu kegiatan merajut membuat tas, topi, dan lain-lain. Dengan kegiatan tersebut akan memberikan wawasan pengetahuan yang akhirnya akan bergerak pada perubahan sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 12.00 WIB).



Gambar 15. Produksi menggunakan Olahan Bahan Baku Pertanian
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018



Gambar 16. Produksi Keripik Pisang
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018



Gambar 17. Produksi Tas
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyatakan bahwa:

“Kita selalu didampingi dengan Pak Yus dan biasanya Pak Yus melihat apa potensi sekitar yang bisa dimanfaatkan sebagai alat atau sumber untuk bisa diolah menjadi sesuatu yang bisa dijual dan terkadang kita juga sering menyarankan kepada Pak Yus agar bisa mencari tahu gimana caranya mengolah makanan dari bahan yang ada agar bisa membantu pertanian setempat dan Kelompok Wanita Tani “Hemara”.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 11.10 WIB).

Ibu Siti selaku anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan bahwa:

“Saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana mengolah bahan yang banyak di sekitar kami dan dapat bisa diperjual belikan. Saya konsultasi dengan Pak Yus dan akhirnya saya dan Pak Yus menemukan ide dengan mengolah bahan herbal dengan membuat coklat dan bawang putih menjadi *black garlic*.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilakukan secara berkelanjutan dengan materi penyuluhan pemanfaatan potensi lingkungan ataupun individu dan kelompok. Kegiatan tersebut akan memberikan wawasan pengetahuan dan akan bergerak pada perubahan

sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat. Masyarakat mendapatkan ilmu tentang pengelolaan bahan yang banyak di sekitar lingkungan masyarakat dan dapat bisa diperjual belikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan beberapa penyuluh dan sesama masyarakat lainnya serta mendapatkan pendampingan secara intens.

c. Peningkatan Kemampuan Intelektual

Kecakapan keterampilan terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian. Peningkatan kemampuan intelektual dilakukan pendampingan secara berkelanjutan melalui materi teknologi introduksi dengan inovasi teknologi yang lebih kompetitif dan dapat bersaing dengan pasar. Kecakapan keterampilan dilakukan secara terus menerus dengan modifikasi teknologi tertentu akan terjadi keinginan atau inisiatif untuk melakukan secara mandiri dan lebih profesional dengan hasil yang dapat diterima masyarakat umum. Bapak Yustanto selaku penyuluh di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menyebutkan bahwa:

“Pendampingan di kelompok itu secara berkelanjutan dan dengan memberikan materi penyuluhan berdasarkan inovasi teknologi yang berkembang saat ini dilakukan melalui keterampilan yang terus dikembangkan melalui orientasi pasar, maka akan terbentuk kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terjadi inisiatif untuk melaksanakan kegiatannya secara mandiri dan profesional. Salah satu contoh kemandirian yang muncul yaitu keinginan kelompok untuk

mengurus ijin usaha (PIRT) pada produk yang dibuat, sehingga lebih mudah bersaing di pasar.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.00 WIB).

Hal yang hampir sama dijelaskan oleh Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” yang menyatakan bahwa:

“Pendampingannya itu secara terus-menerus atau berkelanjutan dilakukan oleh penyuluh jadi semua produk olahan Kelompok Wanita Tani “Hemara” sudah mempunyai standar jual di pasar dengan ijin produksi (PIRT) yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).

Ibu Luluk Fismawati selaku Sekretaris Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan bahwa:

“Kita sudah mempunyai PIRT setelah kita diberikan penyuluhan terus-menerus kita sadar mas kalau PIRT itu sangat penting untuk menunjang hasil produksi kita jika nggak ada PIRT nggak ada yang mau menerima, supermarket-supermarket itu, setelah kita dibombing sama Pak Yus terus kita belajar mengenai itu. Kita sekarang sudah punya PIRT di setiap produk kita jadi produk kita juga bisa masuk ke pusat oleh-oleh, dan lain-lain.” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendampingan di Kelompok Wanita Tani “Hemara” secara berkelanjutan dan dengan memberikan materi penyuluhan berdasarkan

inovasi teknologi yang berkembang saat ini. Pendampingan tersebut dilakukan melalui keterampilan yang terus dikembangkan melalui orientasi pasar, maka akan terbentuk kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terjadi inisiatif untuk melaksanakan kegiatannya secara mandiri dan professional. Salah satu contoh kemandirian yang muncul yaitu keinginan kelompok untuk mengurus izin usaha (PIRT) pada produk yang dibuat, sehingga produk yang dihasilkan masyarakat lebih mudah bersaing di pasar. Kegiatan pendampingan dan pemberian materi mengenai penyuluhan ini dilakukan secara berkala dan terus-menerus, sehingga dapat membantu masyarakat dalam melakukan pemasaran produk.

3) Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas dari kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Menurut Ibu Kris selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangploso menyatakan bahwa:

“Perlindungan itu saya lakukan terhadap dua permasalahan yaitu permasalahan dalam kelompok (*Intern*) dan permasalahan antar

kelompok khususnya di Kecamatan Karangploso. Permasalahan didalam kelompok itu biasanya terjadi perbedaan pendapat terhadap ide-ide atau perbedaan sosial, sehingga para penyuluh melakukan pemberian pemahaman terhadap permasalahan yang ada kepada ibu-ibu dengan menjelaskan pentingnya beorganisasi dimana semua anggota ataupun ketua kelompok mempunyai kedudukan yang sama dengan satu tujuan yaitu kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Sedangkan diluar kelompok biasanya dilakukan pertemuan pertemuan dengan kelompok lain se Kecamatan Karangploso dalam satu kegiatan tertentu, sehingga dapat bertemu dan saling betukar pendapat dan pengalaman disitu biasanya terbentuk kerjasama antar kelompok yang baik.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 14.00 WIB).

Hal serupa diungkapkan juga dengan Ibu Ida selaku Kelompok Wanita Tani “Hemara” terkait pertemuan yang diadakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Beliau menyatakan bahwa:

“Balai Penyuluhan Pertanian sering melibatkan saya dan kelompok dalam acara rapat dengan membahas tentang *problem-problem* yang kita hadapi dengan kelompok kita sendiri maupun dengan kelompok lain. Diadakannya rapat untuk menjalin silaturahmi terhadap penyuluh serta Kelompok Wanita Tani yang lain. Dari situ kita saling bertukar pikiran.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.30 WIB).

Hal tersebut didukung juga dengan pernyataan Ibu Ifa selaku Bendahara Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan bahwa:

“Bapak ibu penyuluh biasanya mengajak kita silaturahmi untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar kelompok dan Kelompok Wanita Tani yang lain dan mengajak kita tentang bagaimana cara berkelompok dengan baik.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 13.00 WIB).



Gambar 9. Silaturahmi dan *sharing* mengenai Pemberdayaan
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Kerjasama yang baik akan mendapatkan hasil yang baik, dimana para penyuluh memupuk Kelompok Wanita Tani agar dapat berkelompok dan menjalin tali silaturahmi yang baik, sehingga kerjasama antar kelompok dan antar anggota kelompok mendapatkan hasil yang baik. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan. Oleh karenanya

keberhasilan proses pemberdayaan tidak diukur dari seberapa jauh *transfer* pengetahuan, keterampilan atau perubahan perilaku, melainkan seberapa jauh terjadinya dialog, diskusi, dan pertukaran pengalaman (*sharing*).

4) Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dari tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat agar tidak patah semangat dalam proses mencapai suatu tujuan. Menurut pendapat Bapak Yustanto selaku penyuluh Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menyebutkan bahwa:

“Pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilakukan secara berkesinambungan melalui bimbingan dan dukungan agar mampu menjalankan kegiatan yang mampu menambah kualitas produk, cita rasa produk dan perijinan produk agar bisa diterima pasar seperti supermarket enak *eco*, *lotte mart* (Sidoarjo), gudang oleh oleh, dan lain sebagainya.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).

Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” yang menjelaskan bahwa:

“Disini semuanya kompak mulai dari penyuluh, kepala Dusun, RT, RW dalam membantu kami membuat perijinan agar produk kami dapat diperjual belikan di supermarket dan pusat oleh

oleh.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.30 WIB).

Begitupun dengan Ibu Luluk Fismawati selaku Sekretaris Kelompok Wanita Tani “Hemara” yang menyebutkan hal yang sama, yaitu:

“Semua membantu mas, nggak ada yang membuat sulit untuk mengurus perijinan. Pak yus membimbing kami untuk melakukan langkah-langkah dalam membuat perijinan supaya produk kami bisa diperjual belikan di supermarket. Semuanya mudah kok mas nggak ada yang membuat kesulitan.” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.00 WIB).



Gambar 10. Produk Kelompok Wanita Tani
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018



Gambar 11. Pendampingan Kelompok Wanita Tani
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilakukan secara berkesinambungan melalui bimbingan dan dukungan agar mampu menjalankan kegiatan yang mampu menambah kualitas produk, cita rasa produk dan perijinan produk agar bisa diterima pasar. Selain itu, semua pihak juga ikut membantu dalam melakukan perijinan dalam penjualan produk. Proses pemberdayaan merupakan aktivitas untuk memperkuat daya (kemampuan, posisi tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Penguatan kapasitas dilakukan pada individu, kelembagaan/organisasi maupun jaringan.

b. Indikator Peningkatan Pendapatan

Pada dasarnya tujuan orang bekerja adalah untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan merupakan balas jasa bekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pekerja dipengaruhi jam kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang disumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.

Pendapatan keluarga adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem yang diterima keluarga perempuan pemilik sekaligus pengelola *home industry* baik dari hasil *home industry* maupun non industri. Indikator peningkatan pendapatan keluarga merupakan jumlah pendapatan keseluruhan yang diterima keluarga sebelum dan sesudah berkelompok dengan melakukan kegiatan *home industry* pekerjaan pokoknya maupun pekerjaan sampingan. Kategori Indikator Peningkatan Pendapatan ada tiga golongan yaitu tinggi dengan pendapatan di atas Rp. 10.000.000,00 sedang dengan pendapatan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan dibawah Rp. 5.000.000,00 dikatakan hasil pendapatan yang tergolong rendah. Bapak Yustanto selaku penyuluh di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

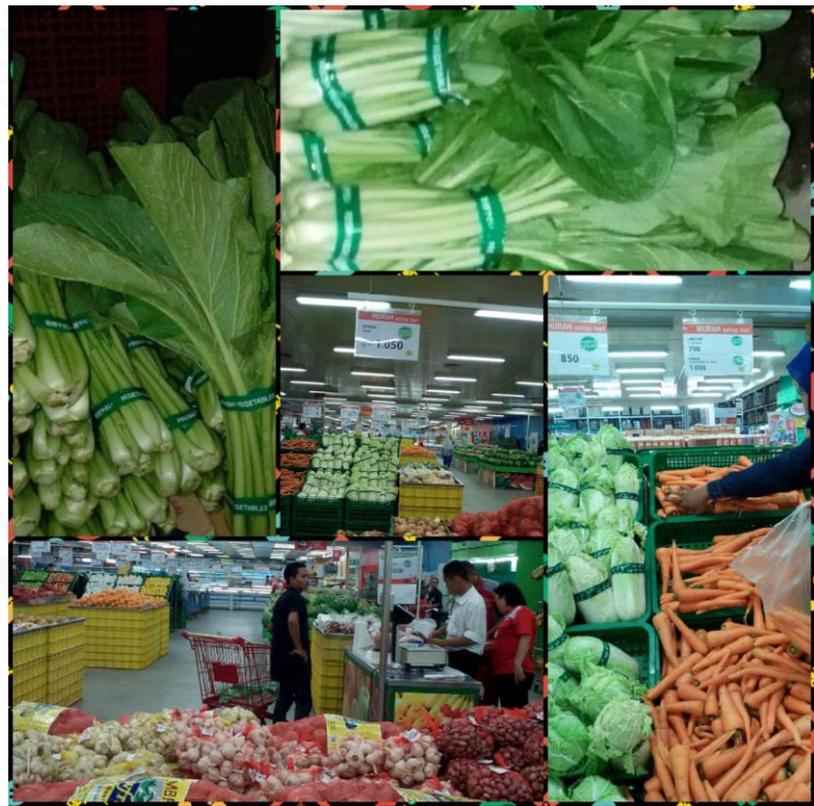
“Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” itu merupakan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” melalui kegiatan kita yang terus menerus dan berkelanjutan dengan inovasi kelompok agar dapat menambah pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui metode dan materi penyuluhan dengan orientasi inovasi teknologi pengolahan bahan pangan dikatakan berhasil keberhasilannya itu dapat dilihat sebelum mereka berkelompok dan sesudah mereka berkelompok misalnya yang dulu itu kumpul kumpul tidak menghasilkan apa apa namun pada saat ini ibu ibu sudah dapat mengelola usahanya dalam bentuk olahan secara mandiri dan uang yang merupakan hasil dari kerja keras tersebut yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 11.45 WIB).

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyebutkan bahwa:

“Pemberdayaan dari penyuluh sangat membantu sekali, baik untuk saya pribadi maupun terhadap ibu-ibu anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” pada umumnya. Saya kira merasakan dan menikmati dimana sebelumnya saya dalam keluarga tidak mempunyai peran dalam menambah penghasilan keluarga tapi saat ini saya mempunyai usaha sendiri yaitu olahan daging kelinci dalam bentuk abon, dan steak, saya juga menjadi suplaier sayur di supermarket dengan menambahkan sumbangan pendapatan terhadap keluarga saya sebesar Rp 3.000.000,00 sampai Rp 3.500.000,00.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.15 WIB).

Ibu Siti selaku Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyebutkan hal yang sama, yaitu:

“Pembinaan dari penyuluh sangat terasa sangat besar karena memberikan perubahan dalam keluarga saya karena sekarang saya mempunyai usaha pembuatan coklat dari bahan herbal dan jamu yang sangat membantu dalam pendapatan keluarga dengan penghasilan biasanya Rp 2.500.000,00 per bulan.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 13.00 WIB).



Gambar 18. Sayur di Supermarket yang disuplai Ibu Ida
 Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018



Gambar 19. Olahan Jamu Milik Ibu Siti
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui metode dan materi penyuluhan yang berorientasi pada inovasi teknologi berbasis potensi wilayah dapat lebih efektif merubah pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”. Status dan profesi dalam keluarga dapat lebih mandiri melalui kegiatan keterampilan yang berkelanjutan dapat menghasilkan uang untuk menambah pendapatan keluarga sekaligus perubahan kesejahteraan keluarga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

a. Faktor Pendukung

1) Adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Faktor Pendukung dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” untuk meningkatkan pendapatan keluarga, salah satunya

yaitu adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di setiap Kecamatan yang menjadi pusat informasi teknologi pertanian dan rumah bagi petani umumnya dan wanita tani khususnya. Program pembangunan pertanian secara maksimal akan menjadi program Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat lapangan untuk dapat diaplikasikan pada petani maupun penyuluh pertanian, sehingga dapat difungsikan sebagai sarana belajar maupun praktek-praktek keterampilan oleh petani maupun wanita tani.

Bapak Yustanto selaku penyuluh di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

“Begini mas Kelompok Wanita Tani Hemara sebagian besar kegiatan pemberdayaan itu dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sini yang terkait dengan penyampaian materi penyuluhan maupun praktek pengolahan panen dan budidaya tanaman.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 11.00 WIB).

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan bahwa:

“Saya sangat bersyukur dan sangat senang mungkin bukan saya saja seluruh anggota kelompok mungkin juga sama seperti saya sangat senang juga dengan adanya karena seluruh penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian yang sangat mendukung kelompok dalam setiap proses belajar, praktek-prakteknya dan vasilitas yang ada dapat digunakan dan dapat di manfaatkan oleh kami.” (Hasil

wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).

Ibu Siti selaku Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan bahwa:

“Sangat didukung banget mas dari proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam setiap kegiatan praktek pembuatan olahan itu sering dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian dengan berbagai peralatan dan bahan bahan praktek yang sudah disediakan.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mendukung pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Beberapa kegiatan pemberdayaan banyak yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Selain itu, di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) juga disediakan beberapa alat-alat untuk mendukung kegiatan pemberdayaan, misalnya pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengolahan hasil pertanian.

2) Kompetensi Penyuluh

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas,

pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk itu kegiatan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif. Penyuluhan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

Bapak Yustanto selaku penyuluh Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menyatakan bahwa:

“Saya jelaskan sedikit tentang penyuluh mas adanya Penyuluh pertanian itu adalah profesi seseorang yang memberikan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keberadaan penyuluh pertanian ini sangat mendorong pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Hemara desa Ngijo kecamatan Karangploso dalam mewujudkan kegiatan keterampilan tangan dan pengolahan bahan pangan danlainya yang bisa di terima pasar.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 13.00 WIB).

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyatakan bahwa:

“Arti seorang penyuluh menurut saya ya terutama penyuluh itu sangat membantu kita dalam dan di setiap urusan organisasi dan

lainnya yang hampir selalu dibantu dengan Bapak Yustanto yang mendampingi kami mulai dari pembentukan kelompok sampai terjadi penambahan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada Kelompok Wanita Tani “Hemara” dengan melakukan Kegiatan keterampilan tangan dan membuat olahan pangan dari produksi pertanian yang ada di daerah sini.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 09.00 WIB).

Ibu Siti selaku Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyebutkan hal yang sama, yaitu:

“Dengan adanya penyuluh sangat membantu sekali, mas. Kita dibimbing, kemudian didampingi dan diajari untuk lebih terampil dalam mengelola hasil perkebunan maupun hasil pertanian.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 16.00 WIB).

Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatnya kesejahteraan petani dan keluarganya adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan peran serta penyuluh didukung dengan kompetensi dan hubungan yang baik dengan anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” dapat mendukung kegiatan pelaksanaan pemberdayaan bagi ibu-ibu, anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

3) Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam (SDA) adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber Daya Alam (SDA) bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, di dalam air, di permukaan tanah, di udara, mulai dari kutub utara dan sebagainya. Sebagai contoh sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya, serta sumber daya pertanian.

Bapak Yustanto selaku penyuluh di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

“Potensi pertanian di Kecamatan Karangploso itu merupakan penghasil sayur-sayuran dan ternak kelinci terbesar di Kota Malang. Kelompok Wanita Tani “Hemara”, kami arahkan agar mempunyai kegiatan-kegiatan dalam pembuatan olahan pangan dengan memanfaatkan potensi yang banyak ada di sekitar lingkungan daerah lokasi Kelompok Wanita Tani “Hemara” yaitu salah satunya adalah olahan daging kelinci dapat dibuat abon, steak, dan kerupuk.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 13.30 WIB).

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyebutkan bahwa:

“Kegiatan kelompok kami tidak jauh dari Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerah sini merupakan faktor pendukung, jadi

kami nggak pernah bingung bahan bakunya untuk buat olahan kami, karena bahan baku dihasilkan dari para petani yang ada di wilayah kami.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.00 WIB).

Ibu Siti selaku Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyebutkan hal yang sama, yaitu:

“Banyak mas potensi alam disini, tanahnya subur jadi sangat mendukung, sehingga hasil pertanian nya juga melimpah. Potensi pertanian di Kecamatan Karangploso itu merupakan penghasil sayur-sayuran dan ternak kelinci terbesar di Kota Malang. Kelompok Wanita Tani “Hemara”.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 16.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kecamatan Karangploso merupakan faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya potensi pertanian yang ada. Hasil potensi pertanian tersebut, dapat dijadikan sebagai hasil olahan yang mempunyai nilai beli lebih, dibanding bahan mentah hasil pertanian. Kelompok Wanita Tani “Hemara” melakukan pengolahan terhadap hasil potensi pertanian yang ada tersebut.

4) Jalur Pariwisata

Industri wisata merupakan tempat yang tidak pernah sepi pengunjung, khususnya ketika memasuki masa libur panjang. Hal tersebut dapat berdampak baik terhadap kegiatan wirausaha di sekitar tempat wisata yang dapat memberikan keuntungan. Bapak Yustanto selaku penyuluh di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menyebutkan bahwa:

“Desa Ngijo itu kan merupakan jalur pariwisata menuju ke kota Batu, dengan tersedianya tempat istirahat, tempat pariwisata, rumah makan, tempat oleh-oleh. Jadi disitu yang dapat menunjang agar hasil karya dari Kelompok Wanita Tani dapat dikenal oleh para pendatang yang berwisata di sini dan maupun sejenak istirahat saja supaya bisa dibeli dan menambah pemasukan bagi Kelompok Wanita Tani Hemara.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 13.30 WIB).

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyatakan hal yang sama, yaitu:

“Hasil olahan kelompok kami tidak kesulitan untuk kita titipkan dimana-mana mas karena hasil olahan kami sudah layak untuk diperjual belikan dan di sekitar sini banyak toko oleh oleh yang mau kami titipkan produk olahan kami di sekitar sini juga merupakan jalur transportasi pariwisata.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.00 WIB).

Ibu Siti selaku Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan bahwa:

“Tempatnya strategis karena tempat kami pasok ini merupakan jalur wisata mas, untuk orang-orang yang rekreasi ke Kota Batu atau ke tempat-tempat wisata di sekitar sini.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 16.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, lokasi Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang merupakan daerah jalur wisata menuju Kota Batu. Hal tersebut menyebabkan potensi wirausaha yang sangat strategis bagi para ibu-ibu, Kelompok Wanita Tani “Hemara”. Kelompok Wanita Tani “Hemara” menitipkan hasil olahan pertanian ke toko-toko terdekat area tempat wisata.

b. Faktor Penghambat, yaitu Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor Penghambat pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam meningkatkan pendapatan keluarga, yaitu masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok Wanita Tani merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pemberdayaan, begitu juga dalam berorganisasi. Dalam sektor pertanian, Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam mengadopsi teknologi pertanian, oleh sebab itu pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri bisa mempengaruhi kegiatan pertanian.

Bapak Yustanto selaku penyuluh di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

“Penghambat dalam pemberdayaan adalah kemampuan kelompok wanita tani masih rendah, padahal itu merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan kelompok yang maksimal. Dilihat dari tingkat pendidikan Kelompok Wanita Tani Hemara kurang lebih 80% lulusan tingkat SLTP dan 20% sisanya lulusan SLTA, sehingga dalam pendampingan kelompok memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi untuk merubah pengetahuan, sikap dan keterampilannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 13.30 WIB).

Ibu Ida selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Hemara” menyatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam melakukan pengolahan maupun melaksanakan kegiatan usaha, dasarnya memang anggota ini tidak ada *basic* mengenai wirausaha maupun pengolahan hasil pertanian-pertanian, sehingga harus dilaksanakan pendampingan secara matang dan juga pelatiha melihat masing-masing potensi yang bisa dikerjakan oleh tiap individu anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 10.00 WIB).

Ibu Siti selaku Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” menjelaskan bahwa:

“Maklum kami kan baru belajar juga, mas. Dan kita juga belum cukup terampil, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM)nya begini kemampuannya masih terbatas.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada pukul 16.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Wanita Tani “Hemara” masih kurang dalam hal pengetahuan tentang berorganisasi dan informasi teknologi pengolahan hasil pertanian serta pemasarannya. Hal ini menjadi salah satu penghambat berjalannya kegiatan dalam kelompok, karena apabila Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mengerti atau belum mengerti tentang pentingnya berkelompok dan pengolahan produk pertanian menjadi bahan olahan yang mempunyai nilai ekonomi, maka hasil yang diharapkan kurang maksimal.

C. Analisis Data

1. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga, yaitu:

a. Proses Pemberdayaan, meliputi:

1) Pemukiman

Nigro dalam Pasalong (2008:8) memaparkan administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah yang meliputi tiga cabang yaitu, eksekutif, legislatif, serta peranan penting dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk dapat mendengarkan dan mengolah aspirasi masyarakat agar dapat mencapai pembangunan modern. Selain itu, pola koordinasi dan komunikasi yang perlu dibangun, tidak hanya kerjasama dengan eksternal instansi pemerintahan, namun juga pada internal pemerintahan atau internal organisasi. Pada dasarnya administrasi

publik terfokus pada proses, prosedur dan keputusan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah suatu proses dan usaha dari kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan dan dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan sebagainya. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidup ke arah yang lebih sejahtera.

Begitu kompleksnya peran perempuan dalam rumah tangga (keluarga) serta beratnya beban yang ditanggung oleh perempuan dalam keluarga miskin, maka diperlukan pemikiran tentang konsep pemberdayaan perempuan yang mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi peran perempuan tersebut. Perempuan penting untuk ditingkatkan keberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh perempuan merupakan kehilangan bagi laki-laki melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kemampuan perempuan

untuk meningkatkan kemandirian (*self reliance*) dan kekuatan dalam dirinya (*Internal Strength*) (Priyono: 1996:199).

Pemukiman dalam pemberdayaan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Ini berhubungan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan dengan program yang simultan dan jelas antara *input*, pemberdayaan, dan *output*.

Masyarakat menjadi bagian dari pemberdayaan dengan pelibatan langsung untuk ikut serta memikirkan bagaimana kelanjutan dan hasil yang diharapkan. Masyarakat bukan sebagai objek semata, mereka adalah bagian terintegrasi yang harus mendapatkan dampak langsung dari program pemberdayaan. Ini menuntut adanya pola terarah dengan program-program dan rumusan pelaksanaan di lapangan yang mengarah pada aspek kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Adanya pelibatan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan

ekonominya. Dengan demikian, ada proses pembelajaran manajemen dari masyarakat sendiri. Nantinya akan didapatkan simpul-simpul jaringan pemberdayaan yang timbul dari faktor internal.

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang terikat secara non formal dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok Wanita Tani atau disingkat “KWT” merupakan kelompok swadaya yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jumlah anggota kelompok idealnya berkisar 20-30 orang atau disesuaikan dengan kondisi dan wilayah kerja kelompok tidak melampaui batas administrasi desa. Anggota kelompok tani dapat berupa petani dewasa dan pemuda, wanita dan pria. Anggota keluarga petani (istri dan anak) yang berperan membantu kegiatan usaha tani keluarga, tidak dimasukan menjadi anggota kelompok tetapi diarahkan membentuk kelompok wanita tani atau pemuda tani.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa bahwa ibu-ibu Kelompok Wanita Tani dapat merasakan manfaat berorganisasi (Kelompok) dengan pengolahan manajemen yang baik dapat menciptakan usaha yang produktif dapat memumuk modal usaha dan dapat melakukan kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kegiatan penyuluh sangat berperan penting dalam mengubah pola pikir ibu-ibu yang tadinya tidak produktif menjadi

produktif, dan yang tadinya para ibu-ibu hanya menjadi ibu rumah tangga yang menganggur dan berkumpul tidak menghasilkan apa-apa kini para ibu-ibu berkumpul bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat menghasilkan produk yang kreatif untuk dikembangkan terus menerus dan menjadi usaha milik pribadi yang hasilnya dapat dinikmati oleh ibu-ibu tersebut.

2) Penguatan

Pemberian pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya, mengharuskan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik. Maka dari itu diperlukan peningkatan kemampuan pemerintah yang berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dibutuhkan adanya kinerja aparatur yang berkompeten memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

World Bank (2001) dalam Totok dan Poerwoko (2012:27) mengartikan pemberdayaan yaitu upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan sebagainya) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan

masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Ambar (2004:79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.

Masyarakat adalah bagian dari struktur paguyuban yang notabene tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, kerja sama di antara mereka amat diperlukan demi membangun konsolidasi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Konsep pendekatan kelompok sangat diperlukan agar masyarakat dapat saling berbagai dalam upaya memahami dan menjalani. Selain itu, kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Pemberdayaan tidak lepas dari peran perempuan, menurut sumodiningrat dalam Sulistiyani (2004:78) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu bergerak secara mandiri. Dengan demikian sesuai dengan tujuan pemberdayaan perempuan dimaksudkan agar perempuan dapat mencapai kemandirian. Dengan demikian sebuah proses untuk

memberdayakan perempuan juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi lokal.

Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan istri petani yang membantu kegiatan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Menurut UPTBP3K penumbuhan kelompok tani didasarkan pada prinsip-prinsip (<http://uptbp3k.com>): kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan dan kemitraan. Dengan demikian kelompok wanita tani merupakan kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan kemauan serta kesadaran masyarakat sendiri guna ikut berpartisipasi aktif meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Penguatan dalam pemberdayaan dapat memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemampuan mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dapat perlahan-lahan membangun dan memotivasi agar Kelompok Wanita Tani “Hemara” dapat terus bersemangat berkarya, tidak patah semangat dengan lebih banyak mendapatkan inovasi teknologi yang menjadi peluang dalam berwirausaha. Peran penyuluh dengan memberikan materi

penyuluhan yang bersifat memotivasi ibu-ibu dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

a. Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra (2006:87) antara lain kemauan politik yang mendukung, suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh, motivasi, potensi masyarakat, peluang yang tersedia, kerelaan mengalihkan wewenang, perlindungan, dan kesadaran.

Penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Penyadaran dan pembentukan ini menggambarkan bahwa pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Seutuhnya penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran tentang perlunya

memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:83).

Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri.

Keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan sering tidak diperhitungkan. Di sektor publik perlu adanya peningkatan status perempuan tani dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara memberikan dukungan agar perempuan tani lebih banyak berperan sebagai subyek, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan lebih banyak untuk berperan sebagai perencana dan pengambil keputusan dalam bidang pertanian. Meningkatkan kesadaran tentang situasi diri dan kemampuan mengungkapkan kebutuhan perempuan sendiri.

Pemberdayaan perempuan merupakan program yang berfungsi dan berperan dalam memberdayakan dalam hal ini melatih, memberikan ketrampilan, memandirikan perempuan, sehingga bisa berkontribusi dan turut serta dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan motivasi berwirausaha agar mampu dalam mengelola usaha. Motivasi berwirausaha ini merupakan aspek pertama dan utama yang harus diberikan dalam rangka menciptakan masyarakat wirausaha. Motivasi berwirausaha ini dipandang sebagai pondasi bagi seseorang yang berniat menjadi wirausahawan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pada Penyadaran dan Pembentukan Perilaku, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan informal, misalnya kegiatan tahlilan, kumpul bersama, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan informal tersebut, pendampingan akan dilaksanakan dan saling berdiskusi untuk memberikan motivasi satu sama lain. Hal tersebut sangat berpengaruh baik kepada masyarakat, khususnya perempuan agar mempunyai keinginan dan motivasi untuk menghasilkan usaha serta membantu pendapatan keluarga.

b. Transformasi Kemampuan

Pada dasarnya dapat digunakan dua prinsip dasar dalam penyampaian stimuli eksternal agar hasilnya cukup efektif. Pertama,

stimuli eksternal harus dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menggali dan mengaktualisasikan potensi dan modal sosial dalam masyarakat. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam memberikan stimuli harus disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan. Semakin meningkat kapasitas kelembagaan kapasitas dalam masyarakat, semakin berkurang proporsi stimuli eksternal yang yang diberikan.

Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Masyarakat akan mengalami proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang terjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang masyarakat butuhkan. Masyarakat akan hanya dapat memberikan peran partisipasinya pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan (Sulistiyani, 2004:83).

Belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti pada peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain.

Menurut Slameto (2003:27), belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar memiliki kesehatan fisik dan mental, serta didik dan kuat *inovatif*, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi, sedangkan pembangunan masyarakat adalah suatu hal yang perlu di minit untuk kemampuan masyarakat itu sendiri. Kelompok Wanita Tani “Hemara” yang ada di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kaum perempuan.

Rutinitas kegiatan kelompok yang ditekuni ternyata mampu membawa perubahan warga masyarakat pedesaan khususnya perempuan ke arah yang lebih baik. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman baru yang diperoleh mampu diterapkan dalam kegiatan sehari-hari baik dalam kelompok maupun dalam masyarakat. Melalui interaksi yang terjadi antar anggota maupun dengan pihak lain seperti ketua dan Pembina ternyata mampu membentuk kepribadian masing-masing anggota untuk dapat berkembang dan mengalami kemajuan. Sehingga keberadaan Kelompok Wanita Tani “Hemata” dapat

berperan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan partisipasi perempuan pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilakukan secara berkelanjutan dengan materi penyuluhan pemanfaatan potensi lingkungan ataupun individu dan kelompok. Kegiatan tersebut akan memberikan wawasan pengetahuan dan akan bergerak pada perubahan sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat. Masyarakat mendapatkan ilmu tentang pengelolaan bahan yang banyak di sekitar lingkungan masyarakat dan dapat bisa diperjual belikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan beberapa penyuluh dan sesama masyarakat lainnya serta mendapatkan pendampingan secara intens.

c. Peningkatan Kemampuan Intelektual

Proses Pemberdayaan menurut Widjajanti (2011:18) yaitu proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun non formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, perencanaan program, pelaksanaan program, dan keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan. Soetomo (2013:95-124)

mengemukakan apabila program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya.

Peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan (Sulistiyani, 2004:83).

Dalam proses belajar banyak yang harus dilalui dan terdapat berbagai ujian dan juga evaluasi. Kelompok wanita tani yang merupakan salah satu media atau wadah para petani wanita untuk belajar karena salah satu fungsi kelompok wanita tani adalah sebagai kelas belajar. Proses belajar pada kelompok wanita tani berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Pendampingan di Kelompok Wanita Tani “Hemara” secara berkelanjutan dan dengan memberikan materi penyuluhan berdasarkan inovasi teknologi yang berkembang saat ini.

Pendampingan tersebut dilakukan melalui keterampilan yang terus dikembangkan melalui orientasi pasar, maka akan terbentuk kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terjadi inisiatif untuk melaksanakan kegiatannya secara mandiri dan professional. Salah satu contoh kemandirian yang muncul yaitu keinginan kelompok untuk mengurus ijin usaha (PIRT) pada produk yang dibuat, sehingga produk yang dihasilkan masyarakat lebih mudah bersaing di pasar. Kegiatan pendampingan dan pemberian materi mengenai penyuluhan ini dilakukan secara berkala dan terus-menerus, sehingga dapat membantu masyarakat dalam melakukan pemasaran produk.

3) Perlindungan

Chatarina (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Ambar (2004:77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Memperdayakan perempuan pertanian untuk kualitas hidup yang lebih baik merupakan masalah penting dan lebih diperdalam kesenjangan gender dalam produksi pertanian. Sehingga pemberdayaan dapat terjadi dalam masyarakat dengan daya terbatas sehingga potensinya dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian (Sulistiyani, 2004:79).

Perlindungan dalam pemberdayaan dapat melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas dari kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Kerjasama yang baik akan mendapatkan hasil yang baik, dimana para penyuluh memupuk Kelompok Wanita Tani agar dapat berkelompok dan menjalin tali silaturahmi yang baik, sehingga kerjasama antar kelompok dan antar anggota kelompok mendapatkan hasil yang baik. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan. Oleh karenanya keberhasilan proses pemberdayaan tidak diukur dari seberapa jauh *transfer* pengetahuan, keterampilan atau perubahan perilaku,

melainkan seberapa jauh terjadinya dialog, diskusi, dan pertukaran pengalaman (*sharing*).

4) Penyokongan

Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003:43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Penyokongan dalam pemberdayaan dapat memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dari tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat agar berdaya dan dapat mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilakukan secara berkesinambungan melalui bimbingan dan dukungan agar mampu menjalankan kegiatan yang mampu menambah kualitas produk, cita rasa produk dan perijinan produk agar bisa diterima pasar. Selain itu, semua pihak juga ikut membantu dalam melakukan perijinan dalam penjualan produk. Proses pemberdayaan merupakan aktivitas untuk memperkuat daya (kemampuan, posisi tawar) agar

masyarakat semakin mandiri. Penguatan kapasitas dilakukan pada individu, kelembagaan/organisasi maupun jaringan.

b. Indikator Peningkatan Pendapatan

Apabila perempuan berada dalam posisi keluarga yang miskin akibatnya beban pekerjaan akan bertambah karena perempuan juga memiliki kewajiban untuk menambah pendapatan keluarganya dengan cara bekerja di luar rumah. Keterlibatan perempuan dalam menghasilkan perekonomian bukanlah sesuatu yang baru kemarin penting tetapi memang merupakan bagian dari hidup. Menurut (Quah, 1990:7), kontribusi dalam produksi kebutuhan rumah tangga berada dalam dua masalah utama yaitu jumlah yang diproduksi dan nilai ekonomi dari waktu yang diperlukan untuk memproduksinya. Jumlah dari waktu yang dihitung adalah waktu yang diperlukan untuk jasa keseharian dalam keperluan untuk memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan berbagi kebutuhan lain yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga.

Peran perempuan di bidang pertanian dimulai semenjak orang mengenal alam dan bercocok tanam. Semenjak itu pula mulai berkembang pembagian kerja nyata antara laki-laki dan perempuan yang beragam pekerjaan baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat luas. Perempuan mempunyai peran ganda yaitu sebagai pembina rumah tangga (sektor domestik) dan pencari nafkah (sektor publik).

Kelompok perempuan tani antara lain diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar dicapai kehidupan ekonomi, sosial dan budaya keluarga yang lebih baik dan sejahtera. Kelompok ini diharapkan dapat memacu kegiatan ekonomi produktif di lini terkecil yaitu keluarga. Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang disumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.

Pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun (Wahyu Adji, 2004:3). Menurut Gilarso (2003:63), Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi". Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain.

Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang. Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah. Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem.

Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya. Sedangkan pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dengan konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat kecil (Nugraheny Mustika, 2009:15).

Menurut Badan Pusat Statistik dalam penelitian Eko Sugiarto (2007:112) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi, atau pengeluaran keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Adapun Indikator Peningkatan Pendapatan di golongan menjadi 3 item yaitu Tinggi (>Rp.10.000.000); Sedang (Rp.5.000.000); dan Rendah (<Rp. 5.000.000).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan perempuan di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang termasuk dalam kategori sedang. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui metode dan materi penyuluhan yang berorientasi pada inovasi teknologi berbasis potensi wilayah dapat lebih efektif merubah pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota Kelompok Wanita Tani "Hemara". Status dan profesi dalam keluarga dapat lebih mandiri melalui kegiatan keterampilan yang berkelanjutan dapat

menghasilkan uang untuk menambah pendapatan keluarga sekaligus perubahan kesejahteraan keluarga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

a. Faktor Pendukung

1) Adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap kegiatan pemberdayaan adalah mengenai fasilitas. Sarana kegiatan pemberdayaan, umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut, seperti: tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemberdayaan, alat-alat yang mendukung dan sebagainya. Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Untuk menciptakan keberhasilan dalam bekerja, kantor harus menjamin dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan anggota dalam mengikuti dan berpartisipasi di kegiatan pemberdayaan, khususnya bagi anggota Kelompok Wanita Tani

“Hemara”. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja saja tidak cukup untuk melakukan sebuah kegiatan, tetapi harus didukung dengan adanya fasilitas agar pencapaian kerja sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu, kegiatan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” harus sangat memperhatikan tentang pentingnya sarana dan prasarana dengan kelengkapannya agar pencapaian kerja menghasilkan hasil yang sangat memuaskan.

Fasilitas/sarana adalah alat yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja anggota dalam berwirausaha dan berpartisipasi dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara”, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai.

Selain dalam hal pencapaian kerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” nyaman dalam bekerja dan mengikuti kegiatan. Untuk itu, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat diperhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dalam mengupayakan sarana dan prasarana, dibutuhkan manajemen sarana

dan prasarana yaitu proses pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan produksi maupun berkumpul dalam pemberdayaan perempuan Kelompok Wanita Tani “Hemara”, yaitu adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Balai Penyuluhan adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mendukung pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Beberapa kegiatan pemberdayaan banyak yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Selain itu, di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) juga disediakan beberapa alat-alat untuk mendukung kegiatan pemberdayaan, misalnya pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengolahan hasil pertanian.

2) Kompetensi Penyuluh

Pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menyatakan bahwa: “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah

diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pemangku kepentingan dan tenaga pendamping ini seyogyanya gabungan dari petugas instansi pemerintah dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tinggal dan kontak langsung dengan masyarakat dalam rangka fasilitasi diskusi dan implementasi pemberdayaan. Disamping itu, tenaga pendamping juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan sponsor program pemberdayaan.

Salah satu metode penyuluhan pembangunan pertanian yang sampai saat ini lebih sering digunakan adalah metode pertemuan kelompok secara langsung dengan media lisan, cetak, maupun terproyeksi. Metode ini biasanya dilakukan dalam dua bentuk pertemuan kelompok, yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Bentuk pertama lebih bersifat *top-down* karena informasi lebih banyak bersumber dari penyuluh, sedangkan bentuk yang kedua lebih bersifat *bottom-up* karena penyuluh hanya berstatus sebagai fasilitator berlangsungnya diskusi kelompok sehingga informasi lebih banyak bersumber dari peserta.

Tugas utama fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi-politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog sehingga mempunyai kapasitas transaksional dan diharapkan bisa mengambil posisi tawar yang kuat dengan kekuatan lain. Upaya-upaya itu harus disertai dengan menggalang kemampuan untuk membentuk aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan lain agar mampu mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kehidupan.

Fungsi sebagai kelas belajar bagi masyarakat perempuan di pertanian tersebut, merupakan salah satu pola kegiatan dalam memenuhi tujuan kelompok tani itu sendiri. Pada proses pembelajaran telah ditetapkan beberapa persiapan dan tujuan yang hendak dicapai dalam belajar. Dari proses pembelajaran di atas, dapat di tangkap maksud dari tujuan dari fungsi kelompok wanita tani sebagai kelas belajar. Tujuan-tujuan itu diantaranya adalah, menjadikan anggota kelompok wanita tani menjadi wanita yang memiliki pengetahuan yang luas, hal ini diperlihatkan dengan adanya penyuluhan dengan mendatangkan konsultan dari bidang pertanian.

Menjadikan anggota kelompok wanita tani menjadi petani yang sukses, disiplin, dan juga aktif. Beberapa tujuan-tujuan itu dijalankan oleh kelompok wanita tani melalui fungsinya sebagai kelas belajar.

Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran, yaitu Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”, juga para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan, dan penyuluh di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang tergolong memiliki kompetensi yang baik dalam mendampingi serta membimbing anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

Komponen Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang juga berupa keberadaan insan profesional yang bergerak dibidang pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini termasuk memikirkan dan mengupayakan terselenggaranya program pemberdayaan untuk masyarakat khususnya perempuan. Pihak profesional yang dipandang terlibat dalam usaha pemberian keterampilan untuk pemberdayaan perempuan selama ini adalah penyuluh pertanian Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Pada Perkembangannya, para pengurus Kelompok Wanita Tani “Hemara” berusaha mengajak para anggota untuk memajukan kegiatan pemberdayaan. Dalam hal ini para pengurus menjadi fasilitator, komunikator dan motivator untuk memberdayakan para anggotanya. Upaya tersebut dapat menjadikan para anggota ikut berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan. Para anggota yang ikut terlibat akhirnya dapat percaya dan kemudian menerapkan kegiatan tersebut pada kehidupan sehari-hari untuk menunjang kehidupannya.

Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatnya kesejahteraan petani dan keluarganya adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan peran serta penyuluh didukung dengan kompetensi dan hubungan yang baik dengan anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” dapat mendukung kegiatan pelaksanaan pemberdayaan bagi ibu-ibu, anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

3) Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Pemberdayaan masyarakat harus digali berdasarkan potensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Usaha pemberdayaan bisa

dimulai dari dukungan pihak luar dengan memfasilitasi berupa pelatihan, diskusi, pemberian teknologi, bantuan pemasaran, pendampingan usaha, dan sebagainya. Jika berhasil dikembangkan potensi tersebut kearah yang produktif dan menghasilkan, maka usaha tersebut bisa menciptakan kemandirian untuk komunitas.

Sumber daya alam yang dimaksud adalah keberadaan potensi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang digunakan oleh warga masyarakat setempat sebagai upaya melaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk pemberian keterampilan khususnya perempuan. Potensi alam yang didayagunakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat menangani minimnya pengetahuan keterampilan ini ternyata mencakup keberadaan kawasan pertanian. Keberadaan tanah kawasan pertanian yakni berupa lahan pategalan ataupun lahan persawahan.

Lahan tersebut selain digunakan untuk tanaman-tanaman dan ada juga yang digunakan sebagai peternakan kelinci. Pendayagunaan potensi alam hasil pertanian tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat melalui kerjasama antara pemilik lahan dengan para anggota Kelompok Wanita tani “Hemara” yang memproduksi beberapa makanan olahan. seperti pisang, abon, dan lan sebagainya. Kerjasama tersebut terlihat melalui pemilik lahan langsung menjual bahan mentah pada Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya satu keahlian produk saja yang dikuasai masyarakat, melainkan perlu adanya inovasi produk baru agar masyarakat khususnya perempuan semakin inovatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya lokal yang dikembangkan oleh Kelompok Wanita Tani “Hemara” melalui pembuatan produk olahan pangan merupakan cara yang positif untuk meningkatkan peran perempuan pedesaan. Dalam hal ini, upaya pemberdayaan terlihat efektif melalui kegiatan yang dapat menghasilkan dan mampu menjadikan salah satu usaha untuk para perempuan pedesaan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di lingkungan setempat juga terbukti mampu memperkenalkan keunggulan lokal yang ada di Desa Ngijo, Kecamatan Karangpulo Kabupaten Malang.

Sumber daya lokal yang ada di daerah setempat memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing antara satu daerah dan daerah lainnya. Sumber daya alam yang dimaksud adalah keberadaan potensi di Desa Ngijo Kecamatan Karangpulo Kabupaten Malang yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan Kelompok Wanita Tani “Hemara” salah satunya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Ngijo Kecamatan Karangpulo Kabupaten

Malang berupa hasil pertanian yang tergolong mudah dicari di lingkungan sekitar.

Selain itu, Kelompok Wanita Tani “Hemara” berupaya untuk melakukan inovasi melalui pemanfaatan tanaman-tanaman pangan yang ada di daerah sekitar. Sumber daya lokal yang dikembangkan oleh Kelompok Wanita Tani “Hemara” melalui pembuatan produk olahan pangan merupakan cara yang positif untuk meningkatkan peran perempuan pedesaan. Dalam hal ini, upaya pemberdayaan terlihat efektif melalui kegiatan yang dapat menghasilkan dan mampu menjadikan salah satu usaha untuk para perempuan pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kecamatan Karangploso merupakan faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya potensi pertanian yang ada. Hasil potensi pertanian tersebut, dapat dijadikan sebagai hasil olahan yang mempunyai nilai beli lebih, dibanding bahan mentah hasil pertanian. Kelompok Wanita Tani “Hemara” melakukan pengolahan terhadap hasil potensi pertanian yang ada tersebut.

4) Jalur Pariwisata

Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap

dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif, sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Perencanaan tata letak didefinisikan sebagai perencanaan dan integrasi aliran komponen-komponen suatu produk untuk mendapatkan intelerasi yang paling efektif dan efisien antar operator, peralatan, dan proses transformasi material dari bagian penerimaan sampai ke bagian pengiriman produk jadi.

Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah dimana akan menempatkan kegiatan operasional, maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi yang dapat memberikan keuntungan maksimal, karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi, khususnya bagi Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam pengambilan keputusan untuk memasarkan produknya. Keputusan yang paling penting yang perlu dibuat oleh Kelompok Wanita Tani “Hemara” adalah dimana Kelompok Wanita Tani “Hemara” harus menempatkan operasi mereka.

Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan Kelompok Wanita Tani “Hemara” secara keseluruhan. Hal ini berarti

bahwa seperempat total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutup biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi yang keluar dari Kelompok Wanita Tani “Hemara”. Biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi antara lain adalah pajak, upah, biaya bahan mentah, dan sewa. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat (atau menghancurkan) strategi bisnis.

Kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, sedangkan untuk bisnis eceran dan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada memaksimalkan pendapatan. Kelompok Wanita Tani “Hemara” memasarkan produknya di jalur pariwisata, dikarenakan lokasi produksi pun juga berdekatan dengan jalur wisata menuju ke Kota Batu.

Kebanyakan pusat lalu lalang yang terbaik adalah di outlet-outlet makanan. Kadang-kadang, di seberang jalan tempat Pariwisata juga menjadi tempat yang dipenuhi orang lalu lalang dan biasanya harga sewanya juga lebih murah. Lokasi bisnis merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan bisnis, baik teknis, administrasi, ataupun

manajerial. Sebab, dengan lokasi yang strategis kamu dapat memperbesar peluang demi mendapatkan konsumen.

Lokasi bisnis yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan Kelompok Wanita Tani “Hemara” untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan dan sebaliknya apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan lokasi akan menghambat kinerja bisnis dan secara otomatis keuntungan maksimal tidak akan dapat dirasakan oleh Kelompok Wanita Tani “Hemara”. Maka, pemilihan lokasi bisnis yang dekat dengan target pasar serta ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan sebuah strategi yang juga dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk/jasa yang diinginkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, lokasi Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang merupakan daerah jalur wisata menuju Kota Batu. Hal tersebut menyebabkan potensi wirausaha yang sangat strategis bagi para ibu-ibu, Kelompok Wanita Tani “Hemara”. Kelompok Wanita Tani “Hemara” menitipkan hasil olahan pertanian ke toko-toko terdekat area tempat wisata.

b. Faktor Penghambat, yaitu Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemandirian masyarakat (bisa diterjemahkan sebagai suatu komunitas perempuan) adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang

ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan, dan melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan seperti kemampuan kognitif. Konatif, psikomotorik, efektif, dengan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Dalam pemberdayaan masyarakat, dituntut pula partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai perencanaan sampai implementasi di lingkungan masyarakat tinggal. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, material, maupun finansial diharapkan akan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan yang dilakukan pada masyarakat tersebut.

Pemberdayaan diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Selanjutnya, perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan, dengan demikian masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mutlak diperlukan sebagai pilar utama pembangunan. Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikelola elemen-elemen mendasar yang kurang mendapat “sentuhan” sebagaimana mestinya. Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) laki-laki dan perempuan, sehingga kedua sumber daya tersebut harus mampu berperan secara optimal.

Apabila salah satu sumber daya tersebut mengalami kesenjangan, maka belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Namun saat ini masih tampak jelas ketidakefektifan peran perempuan di masyarakat. Munculnya permasalahan kaum perempuan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri. Hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki dalam pembangunan maupun kegiatan wirausaha.

Pemberdayaan perempuan di pedesaan merupakan salah satu upaya untuk menghapuskan kesenjangan sosial terhadap kaum perempuan. Upaya pemberdayaan tersebut perlu berlatar belakang pada sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat. Latar belakang di pedesaan yang cenderung sebagai masyarakat petani perlu adanya pemberdayaan

perempuan yang berlatar belakang pada potensi sumber daya lokal yang dimiliki.

Selama ini, upaya pemberdayaan untuk perempuan cenderung melatih keterampilan sebagai wadah pengembangan potensi perempuan. Sebagai wahana yang dapat menimbulkan kesempatan bagi peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui penghimpunan kerja sama antara perempuan yang berada di pedesaan. Penghimpunan kerja sama yang dimaksud adalah melalui satu wahana yang bernama kelompok wanita tani. Disisi lain dengan adanya penambahan pengetahuan dan keterampilan berarti kegiatan sosial kemasyarakatan perempuan tersebut mampu berperan sebagai instrument pendidikan bagi pengembangan potensi.

Kemampuan kelompok petani dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” seharusnya berfokus pada usaha pemberdayaan masyarakat pada suatu komunitas, sehingga memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan *stakeholder* lain. Pemberdaayaan masyarakat bisa diartikan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang selaras dengan konsep *people centered development*. Pemberdayaan ini bisa terjadi pada tingkatan individu, keluarga, kelompok sosial maupun komunitas.

Kegiatan yang dilaksanakan belum dapat mandiri dan cenderung pasif keberadaannya di masyarakat, sehingga kelompok wanita tani di Kecamatan Karangploso minim kegiatan dan bahkan ada yang sudah tidak berjalan. Permasalahan lain kemudian muncul, yaitu apakah dengan berkumpulnya para wanita untuk bekerjasama dalam sebuah kelompok wanita tani akan efektif memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat, keluarga maupun pribadi wanita itu sendiri. Masyarakat di daerah ini terutama perempuan rata-rata memiliki pengetahuan dan keterampilan yang masih kurang. Keterampilan-keterampilan yang dimiliki belum tergarap dengan baik dan belum merata ke seluruh Sumber Daya Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”, sehingga perlu dilakukan pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada, guna meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan kualitas perempuan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kaitan upaya pemberdayaan perempuan pada Kelompok Wanita Tani “Hemara” difokuskan pada warga masyarakat setempat sebagai sosok manusia yang berfigur etnis Jawa. Selain itu, sebagai manusia yang bertempat tinggal di kawasan pedesaan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Hal ini difokuskan pada upaya keikutsertaan, kemampuan dan pemikiran warga masyarakat setempat, khususnya perempuan dalam mengupayakan kegiatan pemberdayaan untuk perempuan yang masih minim perannya di masyarakat.

Uraian mengenai keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan dalam kaitan dengan upaya membantu pemberian pengetahuan keterampilan untuk perempuan di atas mengandung makna, bahwa warga masyarakat di pedesaan lokasi kajian ternyata mampu menggali, mendayagunakan dan memelihara keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyangkut pemikiran, ketenagaan atau keikutsertaan dan kemampuan kelompok masyarakat tersebut ternyata juga berdaya guna dalam upaya untuk membantu memberikan pengetahuan keterampilan perempuan, meskipun belum mencapai keberhasilan secara optimal.

Dilihat dari latar belakang pendidikan terakhir para anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”, menunjukkan bahwa perempuan di pedesaan memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Selain itu pengetahuan keterampilan pun masih tergolong minim. Adanya kegiatan Kelompok Wanita Tani “Hemara” ini mampu sebagai salah satu wadah untuk memberikan pengetahuan keterampilan untuk perempuan di pedesaan. Secara tidak langsung dan mungkin tanpa disadari anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” telah memperoleh pengetahuan keterampilan melalui kegiatan pemanfaatan sumber daya alam local menjadi olahan makanan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani “Hemara” tersebut merupakan salah satu upaya pemberdayaan untuk masyarakat khususnya perempuan pedesaan. Para anggota yang memiliki latar

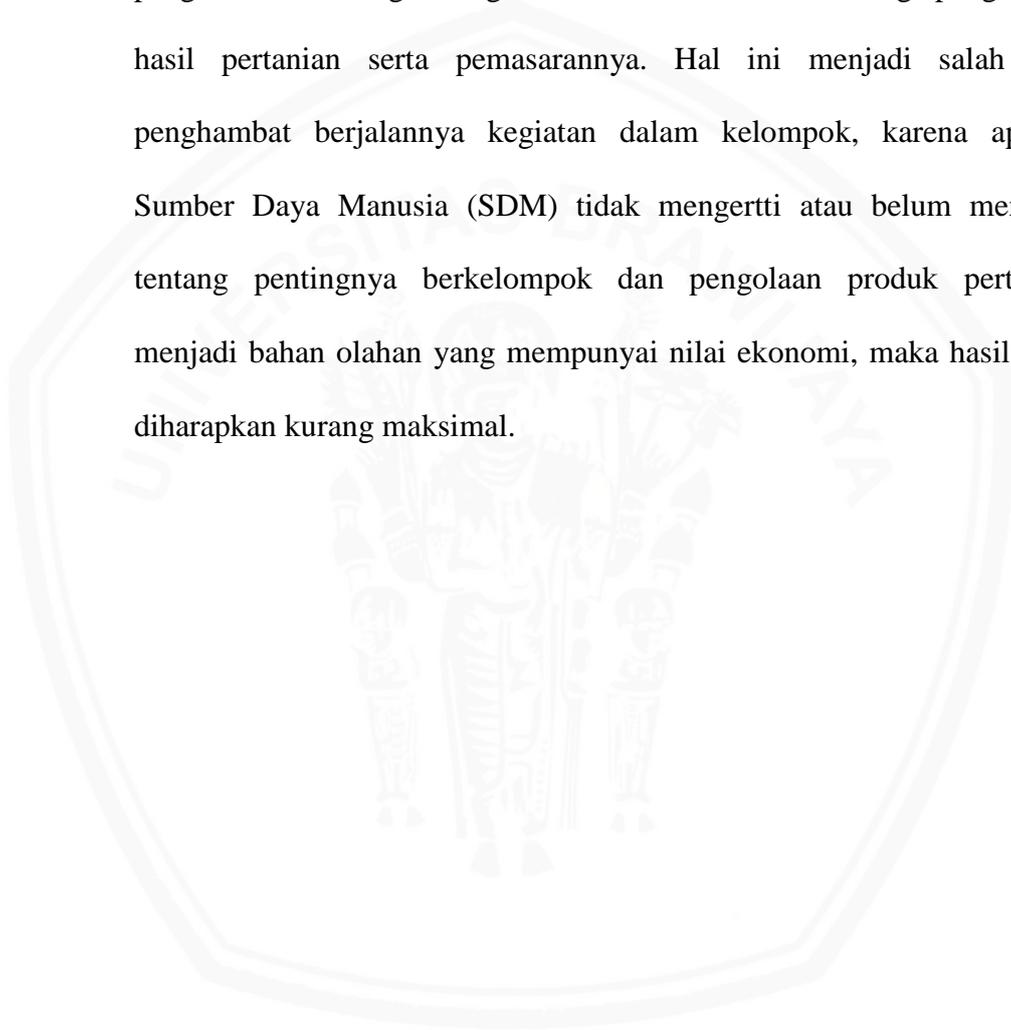
belakang pendidikan rendah ternyata mampu membuktikan bahwa pendidikan sekolah bukan satusatunya alasan mereka untuk berhenti berkarya. Masyarakat mampu mewujudkan pendidikan yang diprakarsai oleh minat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kegiatan yang dilakukan tersebut dapat menjadi suatu kebutuhan anggota secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung anggota kelompok mendapatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang lain melalui mengikuti beberapa kegiatan pelatihan maupun seminar yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Dinas Pertanian Kabupaten Malang maupun pihak swasta. Selain itu, secara tidak langsung anggota kelompok mendapatkan pengetahuan dan pengalaman melalui ketua kelompok maupun pengurus lain yang secara langsung mengikuti pelatihan maupun acara di luar kegiatan kelompok.

Program-program pendidikan dan pelatihan, kursus dan peningkatan keterampilan maupun kegiatan *study banding* mampu mengarahkan dan membimbing anggota kearah perkembangan yang lebih baik. Dari kegiatan yang dilakukan ternyata dapat membawa mereka pada suatu perubahan atau tahap pembelajaran dan peningkatan pengetahuan. Sebagai contoh yang paling dirasakan manfaatnya adalah pengetahuan mengenai cara pengolahan dan pemanfaatan sumber daya lokal setempat berupa hasil pertanian. Selain itu, belajar mengenai cara pengelolaan

administrasi dan manajemen usaha melalui pelaksanaan diklat, kursus, peningkatan keterampilan atau pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Wanita Tani “Hemara” masih kurang dalam hal pengetahuan tentang berorganisasi dan informasi teknologi pengolahan hasil pertanian serta pemasarannya. Hal ini menjadi salah satu penghambat berjalannya kegiatan dalam kelompok, karena apabila Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mengerti atau belum mengerti tentang pentingnya berkelompok dan pengolahan produk pertanian menjadi bahan olahan yang mempunyai nilai ekonomi, maka hasil yang diharapkan kurang maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga, yaitu:

a. Proses Pemberdayaan, meliputi:

1) Pemukiman

Kelompok Wanita Tani dapat merasakan manfaat berorganisasi (Kelompok) dengan pengolahan manajemen yang baik dapat menciptakan usaha yang produktif dapat memumuk modal usaha dan dapat melakukan kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kegiatan penyuluh sangat berperan penting dalam mengubah pola pikir ibu-ibu yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, dan yang tadinya para ibu-ibu hanya menjadi ibu rumah tangga yang menganggur dan berkumpul tidak menghasilkan apa-apa kini para ibu-ibu berkumpul bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

2) Penguatan

Kegiatan tersebut dapat perlahan-lahan membangun dan memotivasi agar Kelompok Wanita Tani “Hemara” dapat terus bersemangat berkarya, tidak patah semangat dengan lebih banyak mendapatkan inovasi-inovasi teknologi yang menjadi peluang dalam berwirausaha.

a. Penysadaran dan Pembentukan Perilaku

Pada Penysadaran dan Pembentukan Perilaku, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan informal, misalnya kegiatan tahlilan, kumpul bersama, dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat berpengaruh baik kepada masyarakat, khususnya perempuan agar mempunyai keinginan dan motivasi untuk menghasilkan usaha serta membantu pendapatan keluarga.

b. Transformasi Kemampuan

Pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilakukan secara berkelanjutan dengan materi penyuluhan pemanfaatan potensi lingkungan ataupun individu dan kelompok. Masyarakat mendapatkan ilmu tentang pengelolaan bahan yang banyak di sekitar lingkungan masyarakat dan dapat bisa diperjual belikan.

c. Peningkatan Kemampuan Intelektual

Pendampingan di Kelompok Wanita Tani “Hemara” secara berkelanjutan dan dengan memberikan materi penyuluhan berdasarkan inovasi teknologi yang berkembang saat ini. Pendampingan tersebut dilakukan melalui keterampilan yang terus dikembangkan melalui orientasi pasar, maka akan terbentuk kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terjadi inisiatif untuk melaksanakan kegiatannya secara mandiri dan professional.

3) Perlindungan

Kerjasama yang baik akan mendapatkan hasil yang baik, dimana para penyuluh memupuk Kelompok Wanita Tani agar dapat berkelompok dan menjalin tali silaturahmi yang baik, sehingga kerjasama antar kelompok dan antar anggota kelompok mendapatkan hasil yang baik. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan.

4) Penyokongan

Pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani dilakukan secara berkesinambungan melalui bimbingan dan dukungan agar mampu menjalankan kegiatan yang mampu menambah kualitas produk, cita rasa produk dan perijinan produk agar bisa diterima pasar. Selain itu, semua pihak juga ikut membantu dalam melakukan perijinan dalam penjualan produk.

b. Indikator Peningkatan Pendapatan

Status dan profesi dalam keluarga dapat lebih mandiri melalui kegiatan keterampilan yang berkelanjutan dapat menghasilkan uang untuk menambah pendapatan keluarga sekaligus perubahan kesejahteraan keluarga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “HEMARA” dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

a. Faktor pendukung

1) Adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Beberapa kegiatan pemberdayaan banyak yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Selain itu, di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) juga disediakan beberapa alat-alat untuk mendukung kegiatan pemberdayaan, misalnya pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengolahan hasil pertanian.

2) Kompetensi Penyuluh

Meningkatnya kesejahteraan petani dan keluarganya adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian. Keberadaan dan peran serta penyuluh didukung dengan kompetensi dan hubungan yang baik dengan anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” dapat mendukung kegiatan pelaksanaan pemberdayaan bagi ibu-ibu, anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

3) Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kecamatan Karangploso merupakan faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani “Hemara” dalam meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya potensi pertanian yang ada. Hasil potensi pertanian tersebut, dapat dijadikan sebagai hasil olahan yang mempunyai nilai beli

lebih, dibanding bahan mentah hasil pertanian. Kelompok Wanita Tani “Hemara” melakukan pengolahan terhadap hasil potensi pertanian yang ada tersebut.

4) Jalur Pariwisata

Lokasi Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang merupakan daerah jalur wisata menuju Kota Batu. Hal tersebut menyebabkan potensi wirausaha yang sangat strategis bagi para ibu-ibu, Kelompok Wanita Tani “Hemara”. Kelompok Wanita Tani “Hemara” menitipkan hasil olahan pertanian ke toko-toko terdekat area tempat wisata.

b. Faktor Penghambat, yaitu Rendahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kelompok Wanita Tani “Hemara” masih kurang dalam hal pengetahuan tentang berorganisasi dan informasi teknologi pengolahan hasil pertanian serta pemasarannya. Hal ini menjadi salah satu penghambat berjalannya kegiatan dalam kelompok, karena apabila Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mengerti atau belum mengerti tentang pentingnya berkelompok dan pengolaan produk pertanian menjadi bahan olahan yang mempunyai nilai ekonomi, maka hasil yang diharapkan kurang maksimal.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Malang

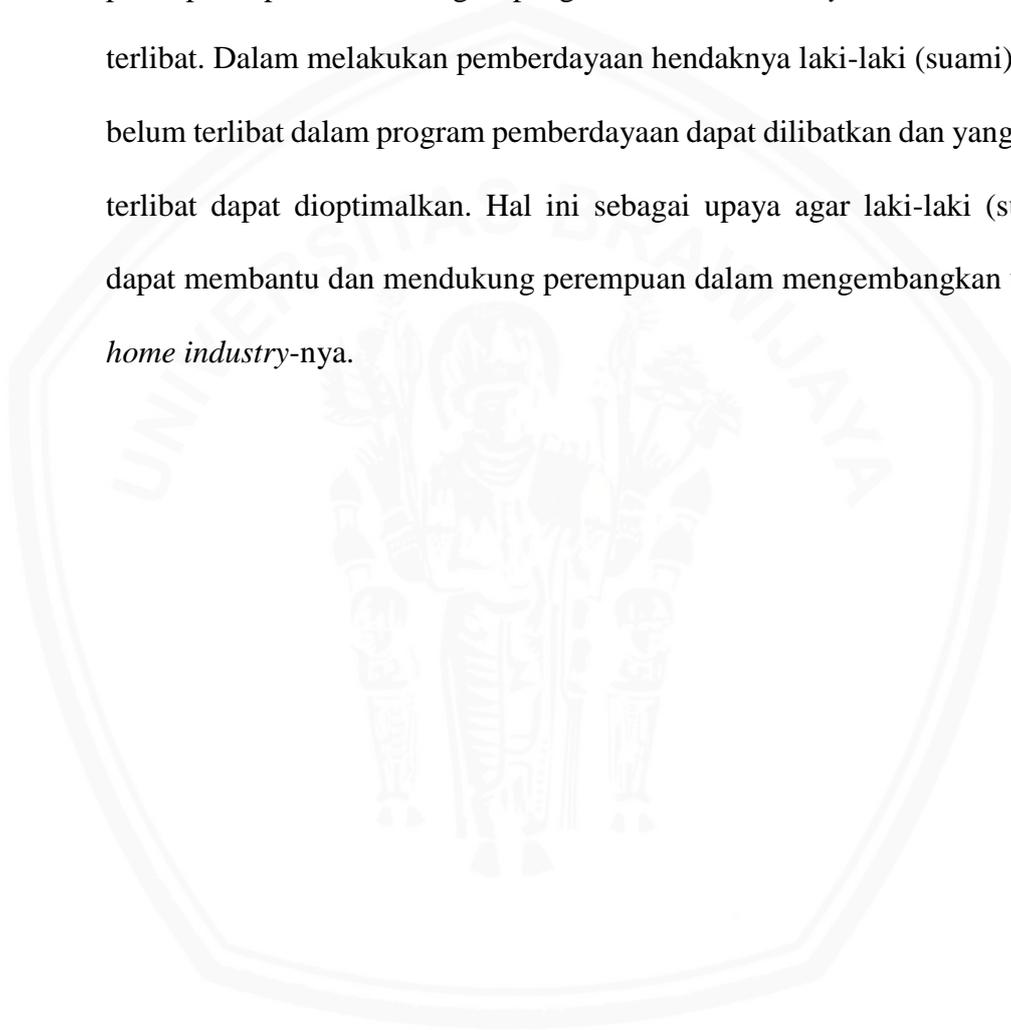
Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malang melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang serta Dinas Pertanian Kabupaten Malang untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” maupun beberapa Kelompok Wanita Tani yang lain, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dari Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan, baik anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara” maupun Kelompok Wanita Tani yang lain.

2. Saran untuk Penyuluh di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

- a. Salah satu bentuk program pemberdayaan dalam upaya mengembangkan *home industry* adalah dengan memberikan pelatihan tentang pembukuan. Dalam realisasinya belum semua subjek penelitian melakukan pembukuan. Oleh karena itu bagi perempuan sekaligus pengelola *home industry* hendaknya dapat menyusun pembukuan yaitu mencatat secara rutin jumlah pemasukan dan pengeluaran dari *home industry*.
- b. Penyuluh melaksanakan pendampingan secara personal secara intensif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”.

3. Saran untuk Anggota Kelompok Wanita Tani “Hemara”

Bentuk program pemberdayaan telah mengkombinasikan antara pendekatan *Women in Development* (WID) dan *Gender and Development* (GAD), namun dalam melakukan pemberdayaan keterlibatan laki-laki (suami) dari perempuan pemilik sekaligus pengelola *home industry* belum semuanya terlibat. Dalam melakukan pemberdayaan hendaknya laki-laki (suami) yang belum terlibat dalam program pemberdayaan dapat dilibatkan dan yang telah terlibat dapat dioptimalkan. Hal ini sebagai upaya agar laki-laki (suami) dapat membantu dan mendukung perempuan dalam mengembangkan usaha *home industry*-nya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Riana M. 2010. *Peran Industri Kerajinan Kipas Bambu Dalam Penyerapan Tenaga Kerja, Pendapatan Keluarga dan Pendidikan Anak: Studi Kasus Di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Skripsi. Pendidikan Ekonomi. FISE. UNY. Riana Mustika.*
- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Catharina, Tri. 2011. *Psikologi Belajar dan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hati, Lila,P. 2005. *Kekuasaan dalam Masyarakat*. Edisi No.21/TahunX/ Agustus 2005.
- Gilarso, T. SJ; 2003. *Pengantar ilmu Ekonomi Mikro*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Hughes, Owen E. 1994. *Public Management and Administration*. New York: Santa Martin Press Inc.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Malangkab.go.id, diakses pada tanggal 22 Juni 2018.
- Mathew B. Miles, A. Michael Huberman, & Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: An Methods sourcebook, Edition 3*. Arizona State University, CA: Sage Publications.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'arifuddin. 2011. *Pemberdayaan Petani Anggrek Melalui Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan Di Kelompok Tani Anggrek Jrobang Indah*

Orchid Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
Semarang: Skripsi.

Nugroho, Riant. 2003. *Reiventing Pembangunan.* Jakarta. Elex Media Komputind.

Nugraheny Mustikasari. 2009. *Hubungan Antara Tingkat Pendapatan Orang Tua Dan Prestasi Belajar Akuntansi Dengan Minat Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi Smk Negeri 1 Depok.* Skripsi. Pendidikan Akuntansi. FISE. UNY.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Poerwoko, Soebianto, dan Totok Mardikanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Prijono Onny S., & A.M. W. Pranaka, 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi.* Jakarta: Center for Strategic and International Studies.

Quah, Stella R., & Sales, Arnaud (eds). 2000. *The International Handbook of Sociology.* London: SAGE Publication. Ltd.

Sadan, Elisheva, 2004. *Empowerment And Community Planing* (e- book). url : www.mpow.org/elisheva_sadan_empowerment_spreads.pdf.

Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Haji Masagung.

Sihombing, Umberto. 2001. *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat.* Yogyakarta.

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2010. *Dasar-Dasar Dan Teori Adminitrasi Publik.* Malang: Intrans Publishing.

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.* Jakarta: Rineka Cipta.

Soetomo. 2013. *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri,* cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Sugiharto, Eko. 2007. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik". *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan EPP*.Vol.4. No. 2.2007:32-36.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyanti, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparjan dan Hempri S. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Wahyu Adji. 2004. *Ekonomi SMK Untuk Kelas XI*. Bandung: Ganeca Exacta.
- Widjajanti, Kesi. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi.

PROGRAMA PENYULUHAN BBP KEC. KARANGPLOSO TAHUN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
BPP KECAMATAN KARANGPLOSO**

K. Penutup

Profil sederhana ini kami sadari tidak sempurna dan masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik teknis penyusunan maupun isinya, namun mudah-mudahan dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Didasari atas niat, semangat dan keinginan yang mantap untuk memajukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui Kelompok Wanita Tani, sehingga usaha agribisnis yang berbasis pengolahan home industri berjalan dengan baik serta dapat meningkatkan pendapatan petani dilingkungannya.

Akhirnya, dengan segala daya upaya, kami berharap mudah-mudahan senatiasa dilindung dan diridlai Allah SWT. Amin.

Penyuluh Wilayah Binaan

Karangploso, 25 Desember 2015
Kelompok Wanita Tani "HEMARA"
Ketua

Yustanto Dwi Sumadi
NIP 196007301994031003

Binti Niswatul Mufida, S.Pd.I

- e. Tomat : 100 polybag
- f. Brukoli : 300 polybag
- g. Kubis, dan lain-lain : 250 polybag
- 4. Buah-buahan dengan lahan pekarang dan tegalan
 - a. Pisang (pekarangan) : 100 batang pohon
 - b. Jeruk : 150 batang pohon
- 5. Peternakan
 - a. Ternak Besar
 - 1) Sapi potong : 15 ekor
 - 2) Kambing : 15 ekor
 - b. Ternak Kecil
 - 1) Kelinci : 900 ekor
 - 2) Ayam Ras : 100 ekor
 - 3) Bebek : 300 ekor
 - c. Perikanan
 - 1) Lele : 500 ekor
 - 2) Gurame : 500 ekor

I. Aset Kelompok

1. Kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh kelompok adalah
 - a. Buku Tamu
 - b. Buku Daftar Pengurus
 - c. Buku Daftar Anggota
 - d. Buku Daftar Hadir Pertemuan
 - e. Buku Agenda Kegiatan
 - f. Buku Inventaris
 - g. Buku Rencana Kerja (*action plan*)
 - h. Buku Kas
 - i. Buku Tabungan
 - j. Buku Keluar Masuk Surat
 - k. Buku Analisa Usaha
 - l. Stempel Kelompok

F. Letak Geografis

Kelompok Wanita Tani (KWT) "HEMARA" terletak di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan dusun Kedawung
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kepuh Harjo
3. Sebelah utara berbatasan dengan desa Ngenep
4. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ampeldento

G. Bentuk Kegiatan KWT "HEMARA"

1. Mengadakan pertemuan kelompok 1 bulan 1 kali.
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan
3. Memanfaatkan lahan pekarangan melalui program KRPL
4. Mengolah Hasil Pertanian menjadi kripik singkong, kripik pisang, opak singkong, stick sayur, nugget sayur, stick keju, abon kelinci, abon lele, nugget kelinci, kripik belut, dan lain-lain.

H. Komoditas yang Diusahakan

Komoditas unggulan yang diusahakan kelompok Wanita Tani "HEMARA" meliputi:

1. Tanaman Pangan dengan lahan persawahan
 - a. Padi sawah : 1 Ha
 - b. Jagung manis : 5000 m²
2. Palawija
 - a. Ubi Kayu/singkong : 5000 m²
 - b. Ubi Jalar : 5000 m²
3. Holtikultura melalui sistem program KRPL
 - a. Terung : 300 polybag
 - b. Cabe Besar : 250 polybag
 - c. Cabe Rawit : 200 polybag
 - d. Sawi daging : 300 polybag

B. Nama dan Alamat Kelompok Wanita Tani

Nama Kelompok : Kelompok Wanita Tani "HEMARA"
Alamat : Dusun Kagrengan RT 11 RW 01
Desa : Ngijo
Kecamatan : Karangploso
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur
Tahun berdiri : 2014
Kelas Kelompok : Pemula
Nomor SK Bupati : 411.61/05/421.207.132/2014.

C. Tujuan

Tujuan didirikan Kelompok Wanita Tani (KWT) "HEMARA" adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya alam.
2. Menciptakan lapangan kerja dan keterampilan usaha.
3. Menambah nilai jual dan estetika produk pertanian.
4. Meningkatkan sikap profesionalisme dibidang kewirausahaan masyarakat pedesaan.
5. meningkatkan produktivitas pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

D. Struktur Pengurus KWT "HEMARA"**Pembina/ Penasehat:**

1. Kepala Desa Ngijo Kecamatan Karangploso
2. Ka UPT-BP Kecamatan Karangploso
3. PTP2 Kecamatan Karangploso
4. POPT Kecamatan Karangploso
5. Penyuluh Wilayah Binaan (wilbin)

PROFIL
KELOMPOK WANITA TANI “HEMARA”
KAGRENGAN NGIJO KARANGPLOSO MALANG

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat perempuan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dan memandirikannya. Masyarakat harus didorong untuk dapat melaksanakan, menyelenggarakan, menikmati serta bertanggungjawab sendiri terhadap pembangunan. Pemberdayaan masyarakat inilah yang pada intinya adalah terciptanya *sustainable development* yang dapat memberikan manfaat secara *massive* pada semua warga masyarakat termasuk dalam ketahanan pangan serta ketersediaan pangan lingkup keluarga dan lingkungannya.

Dalam rangka mensukseskan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan tersebut, pemerataan hak kaum perempuan dalam berkarya, serta kesetaraan gender, Kelompok Wanita Tani (KWT) “HEMARA” Dusun Kagrengan Desa Ngijo Karangploso telah tepat memposisikan dirinya sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, mengolah hasil produksi pertanian menjadi produk olahan, yang tentunya akan menambah nilai jual dan nilai estetika bagi produk pertanian lokal serta meningkatkan produktivitas pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kelompok Wanita Tani (KWT) “HEMARA” yang kedudukan di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Karangploso berdiri atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama dengan motto **”Dengan Tetap Mempertahankan Fungsi Kodrati Sebagai Ibu Rumah Tangga KITA BISA!”** sehingga mereka mampu bersaing dengan segala kemampuan, daya dukung potensi sumber daya alam (SDA), dan pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sehingga terbentuklah Kelompok Wanita Tani “HEMARA” pada tanggal, 4 Desember 2014 berdasar Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 411.61/05/421.207.132/2014.

4.2.3.2. Masalah Perilaku

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku utama dalam berkelompok, pengetahuan berorganisasi yang baik dan berorientasi bisnis.
2. Kelembagaan petani, seperti HIPPA, UPJA dan lain sebagainya belum optimal.
3. Sebagian besar pelaku utama belum berpengalaman menanam padi hibrida.
4. Masih banyak pelaku utama yang belum bermitra dengan industri pengolahan hasil.

8. Kelompok tani/gapoktan belum yakin bahwa mengolah bahan pangan dengan sentuhan teknologi tepat guna dapat menambah pendapatannya.
9. Masih lemahnya pengetahuan dari pelaku usaha mengenai agroindustri.
10. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
11. Masih rendahnya motivasi dan partisipasi petani tentang kualitas produksi tradisional.
12. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama tentang kualitas produksi sesuai dengan standar mutu yang diminta pasar.

4.2.3. Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan

4.2.3.1. Masalah Non Perilaku

1. Secara umum pembangunan pertanian masih cenderung terfokus pada usahatani (*On-Farm*) dengan sasaran utama peningkatan produksi, sementara keterkaitan dengan industri hulu dan hilir masih perlu ditingkatkan.
2. Masih belum optimalnya pencapaian produksi, produktivitas dan kualitas komoditas hortikultura.
3. Menurunnya kapasitas lahan akibat lahan pertanian semakin marjinal, produktivitas lahan yang rendah dan cenderung sangat peka terhadap degradasi lahan.
4. Belum sepenuhnya diterapkan teknologi usahatani sesuai anjuran dan belum sepenuhnya para petani mampu menerapkan sistem tanam jajar legowo.
5. Pengaruh penggunaan pupuk an-organik yang telah cukup lama dan berkecenderungan tidak seimbang, mengakibatkan kandungan bahan organik menjadi sangat rendah.
6. Relatif masih terbatasnya alat dan mesin pertanian (*Alsintan*) khususnya alat pengering (*Dryer*) untuk dapat mengantisipasi panen disaat musim hujan.
7. Terjadinya dampak fenomena iklim dan gangguan OPT, khususnya hama tikus dan penggerek batang pada komoditas padi, penyakit layu bakteri, fusarium dan hama lalat buah pada komoditas hortikultura.
8. Masih cukup tingginya kehilangan hasil (*losses*) akibat penanganan yang kurang tepat saat panen dan pasca panen.
9. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang kualitas produksi sesuai dengan standar yang diminta pasar.
10. Pengetahuan tentang peluang pasar khususnya komoditas hortikultura baik dalam negeri maupun ekspor belum dikuasai dengan baik.

4. Pembiayaan penyuluhan masih terbatas dari pusat dan kontribusi dari petani dan swasta, sementara dari APBD belum nampak.
5. Kurangnya informasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan.
6. Tidak adanya fasilitasi untuk kegiatan evaluasi program penyuluhan sehingga standarisasi keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan sulit diukur.

4.2.2. Sub. Sektor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

4.2.2.1. Masalah Non Perilaku

1. Belum optimalnya gerakan pengembangan diversifikasi konsumsi pangan beragam dan bergizi serta bereimbang.
2. Produk pangan olahan yang berbasis pangan lokal belum terdaftar PIRT
3. Pada saat panen raya harga jual rendah sehingga pendapatan petani menurun
4. Belum teridentifikasi dan terinventarisasinya makanan tradisional sesuai dengan potensi daerah.
5. Masih cukup tingginya kehilangan hasil (*losses*) saat panen dan pasca panen padi.
6. Kualitas hasil produk pertanian baik segar maupun olahan dari petani/kelompok tani masih belum sepenuhnya memenuhi permintaan pasar.
7. Kapasitas kelembagaan/petani masih lemah baik dibidang kerjasama/kekompakan/afinitas, manajemen kelompok usahatani, keterampilan teknis maupun bisnis usahatani.
8. Masih lemahnya kemampuan kelompok tani dalam menjangkau mitra usaha dengan industri pengolahan hasil

4.2.2.2. Masalah Perilaku

1. Terbatasnya sarana/prasarana penyuluhan bagi penyuluh
2. Belum optimalnya penggunaan berbagai metode penyuluhan yang sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran.
3. Masih rendahnya pemahaman pelaku utama terhadap aksesibilitas pangan dalam membangun kemandirian pangan di masyarakat dan di tingkat rumah tangga.
4. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani serta belum menyadari pentingnya penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi.
5. Rendahnya pemahaman kelompok dalam hal penanganan lumbung pangan dan cadangan pangan dalam mengantisipasi krisis pangan dan musim paceklik.
6. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dari pelaku utama dan pelaku usaha tentang pemasaran hasil secara berkelompok dapat meningkatkan posisi tawar dari produk.
7. Kelompok tani/gapoktan belum menyadari tentang pentingnya manajemen keuangan.

**BAB IV
MASALAH**

4.1 MASALAH UMUM

4.1.1. Kelembagaan

1. Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) belum sepenuhnya dilaksanakan, utamanya belum semua desa terbentuk Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES).
2. Fungsi penyuluhan di kecamatan belum berjalan optimal karena kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan.
3. Kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi penyuluhan karena ego sektoral masing masing sub sector dan belum berjalannya aturan tata hubungan kerja antara lembaga penyuluhan, dinas teknis dan lembaga penelitian
4. Kualitas penyelenggaraan penyuluhan kurang optimal sebagai akibat dari belum mantapnya kelembagaan dan fungsi penyuluhan di semua tingkatan
5. Pemerintah Daerah belum optimal menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Kerjasama kemitraan antara kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya belum optimal.

4.1.2. Ketenagaan

1. Biaya operasional penyuluh (BOP) dirasakan belum memadai apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan rencana kerja penyuluh dan tidak sepadan dengan BOP penyuluh dari dinas kelautan dan perikanan.
2. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan fasilitasi dalam pembinaan penyuluh swasta dan swadaya sehingga registrasi keberadaannya dalam membantu pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan berjalan lambat.

4.2. MASALAH KHUSUS

4.2.1. Penyelenggaraan Penyuluhan

1. Penyelenggaraan penyuluhan belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif.
2. Kegiatan penyuluhan masih bersifat parsial dan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Materi dan metode penyuluhan belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah.

3.4.1 Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1. Padi sawah : 7,5 ton GKP/Ha
- 2. Jagung : 5 ton pipil kering/Ha
- 3. Jagung Manis : 12 ton gelondong basah/Ha
- 4. Bawang Merah : 9,6 ton/Ha
- 5. Cabe Merah : 10 ton / Ha
- 6. Apel : 25 ton/Ha
- 7. Jeruk : 22 ton/Ha

3.4.2 Tanaman Perkebunan

- 1. Tebu : 800 kw/Ha
- 2. Kopi : 9 kw ose/Ha

3.4.3 Peternakan

- 1. Sapi Perah : 3700 ltr susu/ekor/tahun
- 2. Ayam Buras : 200 butir/ekor/tahun

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan Umum

Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangploso diharapkan dapat mempercepat perkembangan ekonomi daerah yang sedang digulirkan pemerintah saat ini. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk membangun ekonomi daerah yang dapat menjamin perekonomian rakyat adalah sistem pertanian berbasis pada sumberdaya lokal, untuk itu keterpaduan pengelolaan antara Sumberdaya Alam (SDA) dengan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan didukung akses permodalan, informasi dan teknologi (IT) serta pasar harus diprioritaskan dalam pilar pembangunan pertanian di Kecamatan Singosari.

Programa Penyuluhan Pertanian adalah suatu dokumen kontrak pemberdayaan dan pembelajaran antara pelaku utama, pelaku usaha dengan stake holder dan aparat penyuluhan, yang akan dilakukan bersama-sama secara sinergis dalam rangka memecahkan masalah untuk meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya.

3.2. Tujuan Khusus

Memperhatikan potensi wilayah dan lahan, dimana kecamatan Karangploso usaha taninya sangat lengkap dan ditunjang dengan adanya Pasar Sayur, maka pembangunan pertanian ditujukan :

1. Memberdayakan kelompok tani dan Gapoktan untuk berwawasan agribisnis, dan berwawasan budidaya organik ramah lingkungan.
2. Meningkatkan Pelayanan sarana dan prasarana pertanian di tingkat desa, dan Gapoktan.
3. Memfasilitasi kerjasama antara petani/peternak dengan lembaga terkait.
4. Meningkatkan teknologi di bidang konservasi tanah dan air secara benar.
5. Meningkatkan pengetahuan petani pola diversifikasi pangan dalam keluarga.
6. Meningkatkan konsumsi pangan non beras untuk menunjang program ketahanan pangan.

3.3. Sasaran Umum

Dengan meningkatnya sumber daya petani dan peternak diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan pendapatan petani/peternak yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani/peternak.

3.4. Sasaran Khusus

Setelah menganalisa potensi wilayah dan agroekosistem maka dapat disimpulkan sasaran produksi masing-masing komoditas :

2.2.6. Penggilingan Padi dan Kapasitas

No.	D e s a	Nama Pemilik	Kapasitas
1.	Girimoyo	- Sudirman - Sugiono	- Kecil - Kecil
2.	Ngijo	- KUD Karangploso	- Besar
3.	Kepuharjo	- Nurkholis - Mukhlas	- Kecil - Kecil
4.	Bocek	- Kastam	- Kecil
5.	Ngenep	- H. Rastam - Mintoyo - Asim - Dulasim - Sri Mulya	- Besar - Besar - Kecil - Kecil - Kecil
6.	Donowarih	- A. Dulgoni - H. Tarip - Suwito - H. Suliami	- Besar - Kecil - Besar - Besar
7.	Tawang Argo		-
8.	Ampeldento	- H. Nur Salim - Ridwan	- Kecil - Kecil
9.	Tegalgondo	- Darsono - Abdul Rahman - Kodir - Suyatno	- Besar - Besar - Kecil - Kecil

2.2.5. Produk Unggulan pembinaan UPPK

No.	Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua	Nama Produk
1.	Girimoyo	- DW 10 Genengan - Guyub Rukun - DW 01 Girimoyo	- Rianah - Tunis Winarni - Rumani	- Keripik talas, keripik singkong, ikan asin goreng - Fried Chicken, tahu crispy - Bandeng presto, Otak-otak
2.	Ngijo	- Mawar 03	- Sa'adah	- Keripik pisang
3.	Kepuharjo	-	-	-
4.	Bocek	- Fatayat 01	- Tumsiah	- Keripik pisang, kacang sembunyi, Ting-ting jabe
5.	Ngenep	- PKK Babat'an 02 - Mawar Kubung	- Nanik - Nurul	- Kerupuk grandong, samliet - Carang mas
6.	Donowarih	Mawar 04	- Erni Agus W	- Mi sodok lidi
7.	Tawang Argo	- Barokah	- Ida Afifah	- Dawet
8.	Ampeldento	- Mawar 01, Jumput - Mawar 04 - Mawar 05	- Liik - Anik Erningsih - Romdiyah	- Stik Casava, kue kering cialik - Ontok yuyu - Sale pisang
9.	Tegalgondo	- PKK Dawuhan 01	- Istiharoh Z	- Stik bawang

2.2.4. Kelembagaan Ekonomi Pedesaan

No.	D e s a	Jenis Kelembagaan Ekonomi					
		KUD	Kios Pupuk	Kios Saprotaan	Pasar	Lumbung Desa	Lumbung Kelompok
1.	Girimoyo	-	3	4	1	-	-
2.	Ngijo	1	-	-	-	-	-
3.	Kepuharjo	-	2	1	1	-	1
4.	Bocek	-	1	2	-	-	-
5.	Ngenep	-	-	-	-	-	-
6.	Donowarih	-	-	-	-	-	-
7.	Tawang Argo	-	-	-	-	-	-
8.	Ampeldento	-	1	1	-	-	-
9.	Tegalondo	-	1	1	-	-	-
	JUMLAH	1	6	6	2	-	1

2.2.3. Sarana dan Pra Sarana

No.	Desa	Jenis Alat Mesin Pertanian												
		Hand Sprayer	Power Sprayer	Power Treser	Pedal Treser	Pompa Air	APPO	Hand Traktor	Huller	Emposan Tikus	Combine Harvester	Kuliti vator	Traktor	Trans planie
1.	Girimoyo	245	-	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-
2.	Ngijo	95	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-
3.	Kepuharjo	65	-	1	1	4	1	4	2	-	-	-	-	-
4.	Bocek	356	35	-	-	17	2	18	4	-	-	-	-	-
5.	Ngenep	244	14	1	-	1	5	5	7	-	-	-	-	-
6.	Donowarth	715	-	-	-	-	1	4	-	4	-	1	-	-
7.	Tawangargo	852	7	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	-
8.	Ampeldento	141	-	-	-	1	-	5	3	-	-	-	-	-
9.	Tegalgondo	640	5	-	-	1	-	5	4	-	1	-	-	2
JUMLAH		2741	61	3	1	28	11	52	23	4	1	1	1	2

PROFIL

**KELOMPOK WANITA TANI (KWT) "HEMARA"
DUSUN KAGRENGAN DESA NGIJO
KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG**



UPT-BP KARANGPLOSO
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN MALANG
2015

2

No.	Desa	Nama Kelompok Tani	SK Bupati	Klas Sempula	413		Penyuluh	Keterangan
					Hasil Penilaian Skor	Klas Sekarang		
9	Ngijo	Loh jinawi	411.61/45/421.207.132/1980/2010	Pemula	161	Pemula	Yustanto Dwi S.	
		Tani Makmur I	411.61/46/421.207.132/1980/2010	Lanjut	394	Lanjut	Yustanto Dwi S.	
		Tani Makmur II	411.61/47/421.207.132/1999/2010	Lanjut	445	Lanjut	Yustanto Dwi S.	
		Slamet Budi Luhur	411.61/48/421.207.132/1999/2010	Pemula	202	Pemula	Yustanto Dwi S.	
		Makmur II	411.61/49/421.207.132/1980/2010	Pemula	122	Pemula	Yustanto Dwi S.	
		Sumber Makmur I	411.61/50/421.207.132/1999/2010	Pemula	199	Pemula	Yustanto Dwi S.	
		Rojo Koyo	411.61/51/421.207.132/2002/2010	Lanjut	408	Lanjut	Yustanto Dwi S.	

I. Chriesna C.R.

No.	Desa	Nama Kelompok Tani	SK Bupati	Kelas Semula	Hasil Penilaian		Penyuluh	Keterangan
					Skor	Kelas Sekarang		
5	Donowarih	Sumber Rejeki I	411.61/20/421.207.132/1980/2010	Lanjut	360	Lanjut	Harianto	
		Sumber Rejeki II	411.61/21/421.207.132/1980/2010	Pemula	240	Pemula	Harianto	
		Sumber Rejeki III	411.61/22/421.207.132/1980/2010	Lanjut	340	Lanjut	Harianto	
		Sumber Rejeki IV	411.61/23/421.207.132/1980/2010	Madya	610	Madya	Harianto	
		Sumber Rejeki V	411.61/24/421.207.132/2002/2010	Lanjut	314	Lanjut	Harianto	
6	Girimoyo	Rojo Koyo Mulyo	411.61/25/421.207.132/2002/2010	Lanjut	512	Lanjut	Harianto	
		Sari Tani I	411.61/26/421.207.132/1980/2010	Lanjut	336	Lanjut	Yustanto Dwi S.	
		Sari Tani II	411.61/27/421.207.132/1980/2010	Lanjut	293	Lanjut	Yustanto Dwi S.	
		Sari Tani III	411.61/28/421.207.132/1980/2010	Pemula	238	Pemula	Yustanto Dwi S.	
		Sari Tani	411.61/29/421.207.132/2009/2010	Pemula	247	Pemula	Yustanto Dwi S.	
7	Bocek	Tri Rejeki	411.61/30/421.207.132/1989/2010	Pemula	248	Pemula	Harianto	
		Teguh Subur	411.61/31/421.207.132/1989/2010	Lanjut	495	Lanjut	Harianto	
		Mekarsari	411.61/32/421.207.132/1989/2010	Lanjut	475	Lanjut	Harianto	
		Maju	411.61/33/421.207.132/1982/2010	Madya	505	Madya	Harianto	
		Guyub Rukun	411.61/34/421.207.132/1999/2010	Lanjut	496	Lanjut	Harianto	
8	Ngep	Joyo Mulyo	411.61/35/421.207.132/2001/2010	Lanjut	494	Lanjut	Harianto	
		Sri Mulyo	411.61/36/421.207.132/1980/2010	Lanjut	288	Lanjut	Ir. Christesna C.R.	
		Sumber Makmur	411.61/37/421.207.132/1980/2010	Lanjut	383	Lanjut	Ir. Christesna C.R.	
		Suka Maju	411.61/83/421.207.132/1980/2010	Lanjut	279	Lanjut	Ir. Christesna C.R.	
		Mulya I	411.61/39/421.207.132/1980/2010	Lanjut	290	Lanjut	Ir. Christesna C.R.	
		Mulya II	411.61/40/421.207.132/1985/2010	Lanjut	315	Lanjut	Ir. Christesna C.R.	
		Rukun Makmur	411.61/41/421.207.132/1980/2010	Lanjut	275	Lanjut	Ir. Christesna C.R.	
		Mulia	411.61/42/421.207.132/2002/2010	Lanjut	510	Lanjut	Ir. Christesna C.R.	
		Mitra Mandiri Jaya	411.61/43/421.207.132/2006/2010	Pemula	247	Pemula	Ir. Christesna C.R.	

Programa Kecamatan Karangploso th 2018

2.2.2. Kelembagaan Kelompok Tani
2.1. Karakteristik Kelompok Tani

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK
KECAMATAN KARANGPLOSLO TAHUN 2014

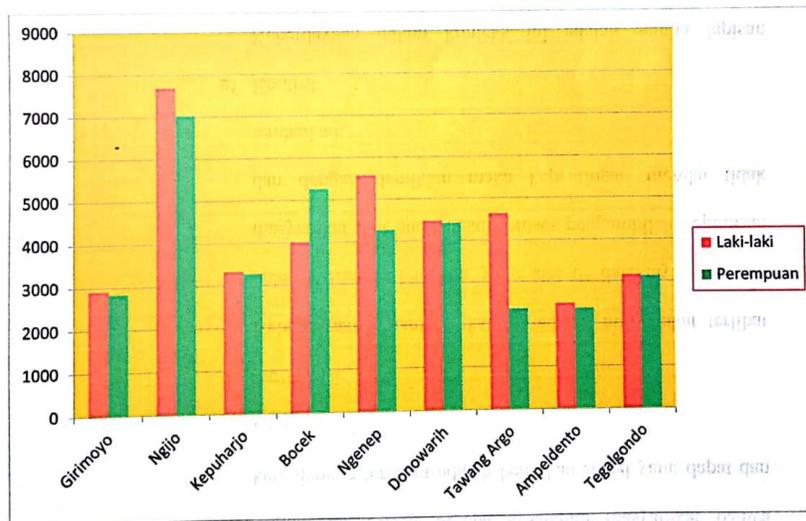
No.	Desa	Nama Kelompok Tani	SK Bupati	Klas Semula	Hasil Penilaian		Penyuluh	Keterangan
					Skor	Klas Sekarang		
1	Ampeldento	Sumber Makmur I	411.61/01/421.207.132/1980/2010	Lanjut	385	Lanjut	Catur S.W. Spt	
		Sari Wangi	411.61/02/421.207.132/1980/2010	Lanjut	325	Lanjut	Catur S.W. Spt	
		Sumber Makmur II	411.61/03/421.207.132/1980/2010	Lanjut	382	Lanjut	Catur S.W. Spt	
2	Kepuharjo	Tani Mulyo III	411.61/04/421.207.132/1999/2010	Lanjut	302	Lanjut	Catur S.W. Spt	
		Gemah Ripah	411.61/05/421.207.132/1980/2010	Lanjut	320	Lanjut	Ir. Christna C.R.	
		Dewi Sri	411.61/06/421.207.132/1980/2010	Lanjut	305	Lanjut	Ir. Christna C.R.	
		Rukun Makmur	411.61/07/421.207.132/1980/2010	Pemula	220	Pemula	Ir. Christna C.R.	
		Sari Bumi I	411.61/08/421.207.132/1980/2010	Pemula	245	Pemula	Ir. Christna C.R.	
		Sari Bumi II	411.61/09/421.207.132/1980/2010	Pemula	235	Pemula	Ir. Christna C.R.	
3	Tegalcondo	Margi Rukun I	411.61/10/421.207.132/1980/2010	Lanjut	386	Lanjut	Yustanto Dwi S.	
		Margi Rukun II	411.61/11/421.207.132/1980/2010	Lanjut	385	Lanjut	Yustanto Dwi S.	
		Sumber Rejeki	411.61/12/421.207.132/1980/2010	Lanjut	306	Lanjut	Yustanto Dwi S.	
		Amartani	411.61/13/421.207.132/1980/2010	Lanjut	470	Lanjut	Catur S.W. Spt	
4	Tawangargo	Budi Daya	411.61/14/421.207.132/2002/2010	Lanjut	335	Lanjut	Catur S.W. Spt	
		Budi Daya I	411.61/15/421.207.132/2002/2010	Lanjut	397	Lanjut	Catur S.W. Spt	
		Budi Daya II	411.61/16/421.207.132/2002/2010	Lanjut	392	Lanjut	Catur S.W. Spt	
		Tani Mulyo	411.61/17/421.207.132/1980/2010	Lanjut	485	Lanjut	Catur S.W. Spt	
		Rukun Damai	411.61/18/421.207.132/1980/2010	Lanjut	498	Lanjut	Catur S.W. Spt	
		Tani Makmur	411.61/19/421.207.132/1980/2010	Lanjut	377	Lanjut	Catur S.W. Spt	

Programa Kecamatan Karangpuloslo th 2018

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

2.2.1. Jumlah Penduduk

No.	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		L	P	JUMLAH
1.	Girimoyo	2904	2830	5734
2.	Ngijo	7681	7020	14701
3.	Kepuharjo	3317	3268	6585
4.	Bocek	3990	3686	7676
5.	Ngenep	5567	5256	10823
6.	Donowarih	4466	4261	8727
7.	Tawang Argo	4623	4411	9034
8.	Ampeldento	2479	2362	4841
9.	Tegalgondo	3149	3121	6270
	JUMLAH	38176	36215	74391



4. Data Potensi Perikanan

NO	D E S A	LUAS KOLAM (M 2)	JENIS IKAN
1.	TAWANGARGO	242	LELE
2.	DONOWARIH	985	NILA, LELE, KOI
3.	GIRIMOYO	768	NILA, LELE
4.	BOCEK	456	LELE
5.	NGENEP	342	LELE
6.	NGIJO	428	LELE
7.	KEPUHARJO	664	LELE
8.	TEGALGONDO	546	LELE
9.	AMPELDENTO	742	LELE
	JUMLAH	5.173	

5. Data Potensi Kehutanan

No.	D e s a	Hutan Rakyat (Ha)	Hutan Negara (Ha)		
			Hutan Produksi	Hutan Lindung	Konservasi
1.	Girimoyo	6	-	-	-
2.	Ngijo	3	-	-	-
3.	Kepuharjo	-	-	-	-
4.	bocek	26	760	-	-
5.	Ngenep	34	760	-	-
6.	Donowarih	20	660	-	-
7.	Tawang Argo	14	20	-	-
8.	Ampeldento	-	-	-	-
9.	Tegalgondo	-	-	-	-
	JUMLAH	112	2200	0	0

2. Data Input – Output Tanaman Perkebunan

No.	Komoditi	Desa	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Tebu	Girimoyo	60,00	60,00	3840,00	64
		Ngijo	38,32	38,32	2644,32	68
		Kepuharjo	6,43	6,43	417,95	65
		Boccek	168	168	11424	68
		Ngenep	155	155	12400	80
		Donowarih	33	33	2145	65
		Tawang Argo	30	30	195	65
		JUMLAH	490,75	490,75	33066,27	67,86
2.	Kopi	Boccek	23	23	18,4	0,8
		Ngenep	65	65	52	0,8
		Donowarih	15	15	11,25	0,75
		Tawang Argo	5	5	4,5	0,9
		Girimoyo	2	2	1,6	0,8
		JUMLAH	110	110	87,75	0,81

3. Data Populasi Ternak

No.	Desa	Populasi (ekor)										
		Sapi Perah	Sapi Peke rja	Sapi Poto ng	Kam bing	Dom ba	Kerb au	Ayam Ras	Ayam Buras	Itik	Kelin ci	Aneka Ternak
1.	Girimoyo	-	-	35	25	29	-	3000	4535	-	-	-
2.	Ngijo	30	-	18	15	35	-	-	3625	-	3000	-
3.	Kepuharjo	-	-	14	10	18	-	-	3135	1450	115	-
4.	Bocek	558	-	342	242	146	-	21.000	5825	-	-	-
5.	Ngenep	85	-	30	40	62	-	-	5328	-	-	-
6.	Donowarih	269	-	85	110	78	-	-	4635	50	-	-
7.	Tawang Argo	10	-	15	86	148	-	-	4515	-	-	-
8.	Ampeldento	-	-	8	51	25	-	12500	4635	100	-	-
9.	Tegalondo	-	-	10	24	18	-	-	3723	18	-	10
	JUMLAH	952	-	557	603	559	-	36500	39956	1618	3115	10

N o.	Komoditi	D e s a	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
8.	Sawi	Ngijo	0,20	0,20	3,32	16,6
		Kepuharjo	0,3	0,3	4,98	16,6
		Donowarih	63	63	1008	16
		Tawang Argo	168	168	2016	12
		Ampeldento	0,5	0,5	7,5	15,0
		Girimoyo	2,5	2,5	37,5	15,0
		Ngenep	5,00	5,00	78,50	15,7
	JUMLAH	239,5	239,5	3155,8	15,27	
9.	Kentang	Donowarih	2	2	30	15
		Tawang Argo	5	5	75	15
		JUMLAH	7	7	105	15
11	Buncis	Donowarih	12	12	96	8
		Tawang Argo	24	24	156	6,5
		JUMLAH	36	36	252	7,25
12	Wortel	Donowarih	5	5	45	9
		Tawang Argo	28	28	294	10,5
		JUMLAH	33	33	339	9,75
13	Apel	Donowarih	20	20	400	20
		Tawang Argo	12	12	144	12
		Ngenep	6,5	6,5	78	12
		JUMLAH	38,5	38,5	622	14,67
14	Jeruk	Donowarih	120	120	2220	18,5
		Tawang Argo	40	40	800	20
		Ngenep	8	8	160	20
		JUMLAH	168	168	3180	19,5

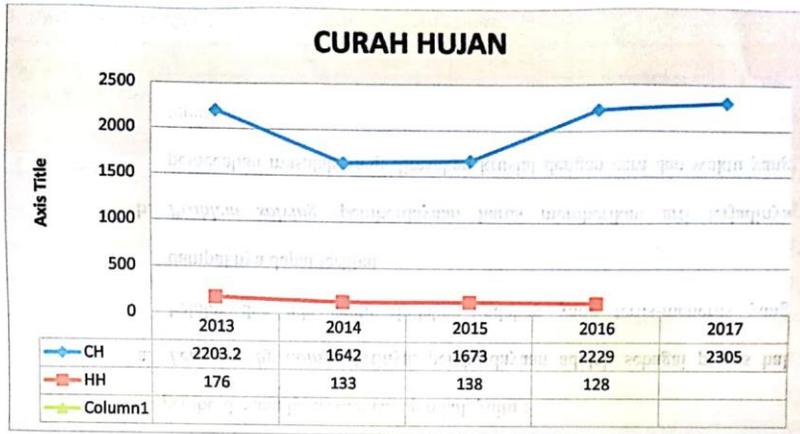
N o.	Komoditi	D e s a	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
4.	Cabe Merah	Ngijo	10,80	10,80	92,88	8,6
		Kepuharjo	1,15	1,15	9,89	8,6
		Bocek	150	150	1350	9
		Donowarih	15	15	120	8
		Tawang Argo	56	56	616	11
		Ngenep	24,5	24,5	171,5	7
		JUMLAH	257,45	257,45	2360,27	8,7
5.	Cabe Rawit	Donowarih	7	7	70	10
		Tawang Argo	52	52	410,8	7,9
		Bocek	165	165	1650	10
		JUMLAH	224	224	2130,8	9,3
6.	Bawang Merah	Girimoyo	1	1	10,5	10,5
		Ngijo	2,15	2,15	20,64	9,6
		Kepuharjo	5,90	5,90	56,05	9,5
		Tawang Argo	43	43	387	9
		Ampeldento	1	1	11,0	11,0
		Tegalgondo	4	4	38	9,5
		Ngenep	3	3	25,5	8,5
		JUMLAH	60,05	60,05	548,69	9,66
7.	Tomat	Donowarih	9	9	405	45
		Tawang Argo	41	41	1968	48
		Ampeldento	2	2	50	25
		Ngenep	8,5	8,5	246,5	29
		Ngijo	1,75	1,75	43,75	25
		Bocek	25	25	625	25
		JUMLAH	87,25	87,25	3338,25	32,83
10	Kubis	Donowarih	7	7	105	15
		Tawang Argo	63	63	945	15
		Ngenep	7	7	63	9
		JUMLAH	77	77	1113	13

2.1.4. Komoditas Utama menurut Sub Sektor

1. Data Input – Output Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Komoditi	Desa	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Padi	Girimoyo	48,7	48,7	365,25	7,5
		Ngijo	375,85	375,85	2818,875	7,5
		Kepuharjo	326,75	326,75	2450,625	7,5
		Bocek	105,9	105,9	751,89	7,1
		Ngenep	200	200	1400	7
		Donowarih	144,5	144,5	1127,1	7,8
		Tawang Argo	165	165	1166,4	7,2
		Ampeldento	120,25	120,25	925,925	7,7
		Tegalondo	385,825	385,825	3206,1825	8,1
	JUMLAH	1872,775	1872,775	14212,2475	7,48	
2.	Jagung	Girimoyo	42	42	159,6	3,8
		Ngijo	25,00	25,00	90,00	3,6
		Ngenep	5	5	21	4,2
		Donowarih	19,00	19,00	85,50	4,5
		Tawang Argo	26,5	26,5	106	4
		Ampeldento	10	10	38	3,8
		Bocek	7	7	28	4
	JUMLAH	134,5	134,5	528,1	3,98	
3.	Jagung Manis	Girimoyo	4	4	36	9,0
		Ngijo	21,14	21,14	137,41	6,5
		Kepuharjo	2	2	18,6	9,3
		Bocek	22,5	22,5	270	12
		Tawang Argo	212	212	2544	12
		Ampeldento	7	7	66,5	9,5
		Tegalondo	6	6	60	10
		Ngenep	25	25	227,5	9,1
		Donowarih	130	130	1170	9
	JUMLAH	429,64	429,64	4530,01	9,6	

Grafik Curah Hujan selama 5 tahun terakhir



Keterangan : CH = Curah Hujan, HH = Hari Hujan

2.1.3. Luas Lahan menurut Ekosistem

1. Data Luas Lahan menurut Penggunaan

No	D e s a	Luas (km ²)	Penggunaan Lahan (Ha)						
			Sawah	Tegal	Pemuki man	Keb un	Kolam/ Tambak	Hutan	Lain
1.	Girimoyo	345,25	25	200,400	60,400	-	-	-	-
2.	Ngijo	399,904	140	37,000	167,469	-	0,6	-	19,035
3.	Kepuharjo	219,002	115	1,68	81,32	-	-	-	0,400
4.	Bocek	704,980	100	437,750	275,771	-	-	725	-
5.	Ngenep	1130,061	180	567,9	91,764	-	-	285	95,061
6.	Donowarih	1305,011	150	371,204	103,000	-	-	660,000	-
7.	Tawang Argo	637,000	180	315,000	98,000	-	-	20,000	-
8.	Ampeldento	153,196	110	-	16,575	-	0,019	-	3,897
9.	Tegalondo	220,235	133	39,728	73,204	-	0,500	-	19,769
	JUMLAH	5114,639	1133	1970,662	967,503	-	1,119	1690	138,162



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

USULAN KOMISI PEMBIMBING

Kepada : Yth. Ketua Prodi Administrasi Publik
 Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya
 Malang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadlika Kurniawan

NIM : 135030107111112

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Judul Skripsi : Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Kapanjen dalam kegiatan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) (Studi kasus Program Pemberdayaan Kelompok Tani "Seruni")

Mengajukan nama-nama dosen berikut ini sebagai :

Ketua Komisi Pembimbing :

1. Dr Lely Indah Mindarti, M.Si

Menyetujui,

Malang, 12 Juni 2017

a.n Dekan
 Ketua Prodi Administrasi Publik

Yang Mengajukan


Dr Lely Indah Mindarti, M.Si
 NIP. 196905242 002122 002

Fadlika Kurniawan
 NIM. 135030107111112

BAB II
KEADAAN UMUM

2.1. Kondisi Wilayah

2.1.1. Deskripsi Wilayah

Secara geografis kecamatan Karangploso memiliki batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara : daerah hutan Gunung Arjuno
2. Sebelah Timur : Kecamatan Singosari
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Dau
4. Sebelah Barat : Kota Batu

Jumlah desa seKecamatan Karangploso ada 9 desa, 46 dusun, 105 RW, 473 RT.

2.1.2 Curah Hujan

No	Bulan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		CH mm	HH	CH mm	HH	CH mm	HH	CH mm	HH	CH mm	HH
1.	Januari	366	28	385	28	228	25	203	16	373	
2.	Pebruari	214	21	179	23	394	23	603	24	234	
3.	Maret	287	23	182	21	248	20	180	11	406	
4.	April	218	18	294	20	297	21	30	2	253	
5.	M e i	120	13	40	11	100	12	182	14	42	
6.	J u n i	184	18	44	6	30	1	106	11	35	
7.	J u l i	132	12	9	5	0	0	55	7	39	
8.	Agustus	0,2	2	40	4	0	0	85	4	-	
9.	September	0	0	0	0	0	0	79	5	46	
10.	Oktober	88	5	17	2	0	0	199	9	112	
11.	Nopember	169	16	141	11	166	12	329	16	489	
12.	Desember	425	25	338	2	210	24	178	9	276	
J u m l a h		2203,2	176	1642	133	1673	138	2229	128	2305	

Sumber : BMG Karangploso

3. Mengatur pendayagunaan tenaga, peralatan, dana, sarana dan prasarana serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan efektif dan efisien.
4. Menjadi acuan dasar pada penyuluh untuk menyusun Rencana Kerja Penyuluh Pertanian.

1.4 Manfaat Program Penyuluhan.

Manfaat dari program penyuluhan pertanian yang jelas dan sistematis dapat digunakan sebagai

1. Dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Penyuluh bagi setiap tim/orang di wilayah kerja (Desa, BPP, Kabupaten, Provinsi, Nasional).
2. Dasar untuk merencanakan dan menerapkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program tersebut.
3. Dasar untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja (misal koordinasi, pendampingan, pelatihan, dll).
4. Dasar bagi wilayah kerja (Desa, BPP, Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Koordinasi Penyuluhan) dalam perumusan usulan proyek/kegiatan penyuluhan yang ingin dilaksanakan tahun berikutnya untuk dibahas pada diskusi unit daerah kerja pembangunan. Program penyuluhan pertanian disusun secara partisipatif dan berdasarkan kebutuhan petani. Karena itu, program juga berguna bagi petani dan penyuluh untuk:
 - Memecahkan masalah petani dan mengembangkan usaha taninya.
 - Menanamkan rasa tanggung jawab bersama-sama terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien,

1.5 Tahapan Penyusunan Penyuluhan Pertanian.

Penyusunan Program Penyuluhan tahun 2018 di Kecamatan Karangploso melibatkan berbagai pihak antara lain: Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, KTNA, Penyuluh, Mantri Tani, PPOT, Pengusaha/Pedagang, Peternak dan Kepala Desa serta Instansi terkait. Kegiatan ini terbagi dalam 5 (lima) tahap, sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi Wilayah
2. Analisa Potensi Wilayah
3. Menyusun RUK
4. Penetapan Faktor Penentu
5. Perumusan dan Penyusunan Program

Hal ini dilakukan sebagai upaya proses pembangunan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Selama ini program pembangunan masyarakat lebih banyak direncanakan oleh pemerintah/lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran, pengalaman menunjukkan pembangunan dengan proses seperti itu mengakibatkan program pembangunan tidak menyentuh kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. Apabila masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan, maka selain program itu lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, rasa memiliki program akan semakin tinggi, juga ketrampilan-ketrampilan analisis, perencanaan akan menjadi kemampuan masyarakat, sehingga ketergantungan pada pihak luar dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program akan berkurang.

Salah satu strategi penyuluh pertanian dalam membangun kemandirian dan prakarsa, tanggungjawab serta partisipasi masyarakat tani dalam pembangunan pertanian yang terencana dan terukur adalah dengan terwujudnya Program Penyuluhan Pertanian yang tersusun disetiap wilayah. Kerangka dasar yang dianut dalam strategi ini adalah mencoba dengan konsisten menerapkan prinsip keswadayaan, pengambilan keputusan bersama, kemitraan, serta pembinaan yang dipandu kondisi agroekologi spesifikasi lokasi melalui keterpaduan sistem operasional yang harmonis antara Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta didukung fasilitas pelayanan dan pengaturan.

Mengingat Penyuluh adalah proses mendidik masyarakat, maka penumbuhan partisipasi itu harus dilakukan melalui proses belajar mengajar masyarakat secara wajar dan partisipatif, edukatif, dengan peran pemerintah (aparatur) sebagai fasilitator dalam memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat secara optimal melalui penyiapan komunikator yang handal.

Upaya penumbuhan partisipasi adalah proses menggali dan mengolah aspirasi dan prakarsa masyarakat, oleh karena itu perencanaan yang dilakukan masyarakat harus bersifat rasional, dan pragmatis. Maka dalam penyusunan rencana harus berpijak pada kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, sebagai konsekuensinya masyarakat harus memiliki kemampuan mengidentifikasi kondisi mereka sendiri dan kondisi lingkungannya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.

Penyusunan program penyuluhan pertanian mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah/pedoman bagi penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan pertaniandi wilayah kerjanya.
2. Membangun kesiapan dan kesediaan penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan yangdisusun dalam nilai yang kongkrit pada setiap tahapan penyuluhan.

BABI
PENDAHULUAN

1.1 Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian

Pembangunan Pertanian pada dasarnya menciptakan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, artinya dalam konteks ini memberikan kondisi dan peluang menumbuhkembangkan prakarsa serta kreativitas masyarakat dalam pembangunan, baik sebagai obyek maupun dalam fungsi pengawasan.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu unsur penggerak dinamika pembangunan telah menetapkan kerangka landasan menuju " *Pertanian Maju, Efisien dan Tangguh* " yang di tandai oleh transformasi struktural ke arah kesinambungan peranan sektor pertanian dengan sektor industri. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka pengamalan " *PANCA YASA* " Pembangunan Pertanian yang meliputi : *Perbaikan Infrastruktur, Penguatan Kelembagaan melalui kelompok tani / gapoktan / koperasi, Peningkatan Penyuluhan, Dukungan Biaya, Pengembangan Pemasaran*. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk direalisasikan. Dinamika proses tersebut akan tampil bila mana aparatur, petani, lembaga sosial ekonomi, organisasi profesi, serta perusahaan pembimbing senantiasa mengamalkan perilaku " *Pro aktif* ", tidak terkotak-kotak terutama dalam posisi strategisnya sebagai penggerak utama dalam melaksanakan pembangunan pertanian.

Erat kaitannya dengan proses tersebut, maka peran penyuluh mempunyai kedudukan yang sangat strategis sesuai dengan mandatnya sebagai penyelenggara pendidikan di luar sekolah (*non formal*) bagi petani dan anggota keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Sehubungan dengan hal itu penyuluh merupakan tenaga penggerak dalam dinamika rentang mata rantai agribisnis, melalui manajemen alokasi sumber daya manusia secara optimal dengan pedekatan partisipatif, keterpaduan serta proses belajar mengajar orang dewasa yang menyangkut sistem kerja, metode dan teknologi dengan tolak ukur keberhasilan yang ditinjau dari proses dinamika secara timbal balik antara tindakan dan refleksinya.

1.2 Latar Belakang

Programa penyuluhan pertanian di era sekarang adalah pemberdayaan penyuluhan yang diprogramkan melalui PRA (*Participatory Rural Appraisal*) suatu cara atau teknik pelibatan masyarakat untuk turut serta dalam proses mengamati dan mengkaji wilayahnya sendiri agar mereka mampu membuat rencana dan tindakan pembaharuan yang lebih baik sesuai dengan kondisi di wilayahnya.

DAFTAR TABEL

1. Data Curah Hujan	4
2. Data Luas Lahan menurut Penggunaan	5
3. Data Input-Output Tanaman Pangan dan Hortikultura	6
4. Data Input-Output Tanaman Perkebunan	9
5. Data Populasi Temak	9
6. Data Potensi Perikanan	10
7. Data Potensi Kehutanan	10
8. Data Jumlah Penduduk	11
9. Karakteristik Kelompok Tani	12
10. Sarana dan Pra Sarana	15
11. Kelembagaan Ekonomi Pedesaan	16
12. Produk Unggulan pembinaan UPK	17
13. Penggilingan Padi dan Kapasitas	18
14. Matrik dan RKP Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan	27

4.2. Masalah Khusus	21
4.2.1. Penyelenggaraan Penyuluhan	21
4.2.2. Sub. Sektor Ketahanan Pangan	22
4.2.2.1. Masalah Non Perilaku	22
4.2.2.2. Masalah Perilaku	22
4.2.3. Sub. Sektor Pertanian Perkebunan	23
4.2.2.1. Masalah Non Perilaku	23
4.2.2.2. Masalah Perilaku	24
BAB V CARA MENCAPAI TUJUAN	25
BAB VI PENUTUP	26
LAMPIRAN	
1. Peta Kecamatan Karangploso	
2. Peta Potensi Wilayah	
3. Peta Transek	
4. Foto Kegiatan	

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Programa	2
1.4. Manfaat Programa Penyuluhan	3
1.5. Tahapan Penyusunan Programa	3
BAB II KEADAAN UMUM	
2.1. Kondisi Wilayah	4
2.1.1. Drskripsi Wilayah	4
2.1.2. Data Curah Hujan	4
2.1.3. Luas Lahan menurut Ekosistim	5
2.1.4. Komoditi Utama menurut Sub Sektor	6
2.2. Sumber Daya Manusia	11
2.2.1. Jumlah Penduduk	11
2.2.2. Kelembagaan Kelompok Tani	12
2.2.3. Sarana dan Prasarana	15
2.2.4. Kelembagaan Ekonmi Pedesaan	16
2.2.5. Produk Unggulan pembinaan UPK	17
2.2.6. Penggilingan dan Kapasitas	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Tujuan Umum	19
3.2. Tujuan Khusus	19
3.3. Sasaran Umum	19
3.4. Sasaran Khusus	19
BAB IV M A S A L A H	
4.1. Masalah Umum	21
4.1.1. Kelembagaan	21
4.1.2. Ketenagaan	21
<hr/>	
<i>Programa Kecamatan Karangploso th 2018</i>	III

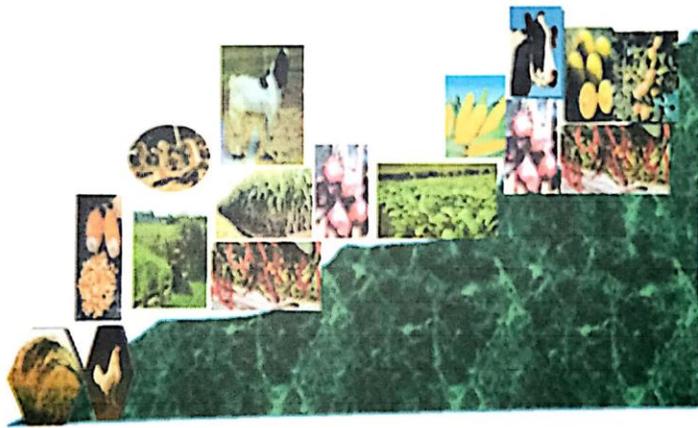
MOTTO:

PETANI KUAT

*Profesional, Empati, Transparan, Akuntabel, Networking, Independen,
Kerjasama, Unggul, Amanah dan Tangguh*



SEBARAN KOMODITI BERDASAR TOPOGRAFI
DI KECAMATAN KARANGPLOSO

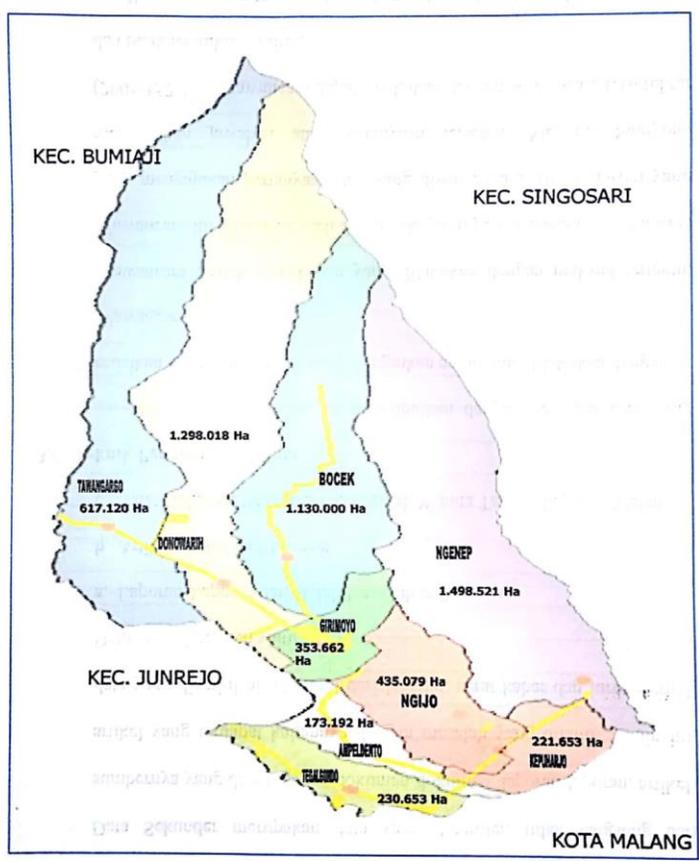


527 DPL



1024 DPL

PETA WILAYAH KECAMATAN KARANGPLOSO





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 321./UN10.F03.11.11/PN/2018
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey
 Kepada : Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 Balai Penyuluhan Pertanian
 Karangploso – Kabupaten Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya malang mohon dengan hormat bantuan bapak / Ibu / Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset / survey bagi mahasiswa :

Nama : Fadlika Kurniawan
 Alamat : Jl Mt Haryono Gg 9 no 308A Dinoyo, Malang
 NIM : 135030107111112
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) "HEMARA" Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Pada UPT Balai Penyuluhan Pertanian Karangploso Kabupaten Malang)

Lamanya : Satu Bulan
 Peserta : Satu Orang
 Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih

Malang, 09 Januari 2018
 an Dekan
 Kepala Prodi Administrasi Publik



Dr Lely Indah Mindarti, M.Si
 NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :
 1. Perusahaan
 2. Mahasiswa
 3. Jurusan
 4. Arsip TU